

RENCANA STRATEGIS

2016 -- 2021



DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROVINSI JAMBI

KATA PENGANTAR

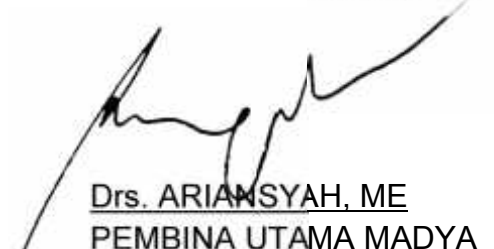
Rencana Strategi (Renstra) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi Tahun 2017 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara perencanaan, Pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, Tata cara Evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, Rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan Rencana kerja pemerintah daerah.

Dengan demikian penetapan kinerja ini harus dipandang sebagai salah satu langkah sistematis yang diperlukan dalam rangka pencegahan tindak pidana korupsi. Penetapan kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi memberikan gambaran tentang tahapan yang akan dicapai dalam menjalankan kegiatan-kegiatan. Untuk mendukung program dan kegiatan yang akan ditetapkan pada tahun 2016 yang didanai dari APBD Provinsi Jambi tahun 2016, dalam prosesnya bermuara pada Kebijakan Umum APBD Provinsi Jambi Tahun 2016.

Akhir kata terima kasih kepada semua pihak yang telah menyumbangkan pikiran dan tenaganya baik secara langsung maupun tidak langsung dalam penyusunan Rencana Kerja ini.

Jambi, Desember 2017

KEPALA DINAS,



Drs. ARIANSYAH, ME
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19720630 199302 1 001

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GRAFIK	v
DAFTAR GAMBAR	vi
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERINDAG PROVINSI JAMBI	
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	6
1.3. Maksud dan Tujuan	8
1.4. Sistematika Penulisan	9
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU	11
2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi	11
2.2. Sumber daya Dinas Prindag Provinsi Jambi	19
2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Perindag Provinsi Jambi	23
2.4. Tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Dinas Perindag Provinsi Jambi	40
BAB III ISI STRATEGIS	41
3.1. Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan	42
3.2. Telaah visi, Misa dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	48
3.3. Telaah Renstra Kementerian Perindustrian dan Kementerian Perdagangan RI	51
3.4. Telaahan Rencana tat ruang wilayah Provinsi Jambi dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	57
3.5. Penentuan Isu-isu Strategis	61
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN	64
4.1. Tujuan dan sasaran Dinas Perindag Provinsi Jambi	64
4.2. Strategi dan kebijakan Disperindag Provinsi Jambi	72

BAB V	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN	76
	5.1. Rencana program dan kegiatan	76
	5.2. Indikator kinerja dan pendanaan	91
BAB VI	INDIKATOR KINERJA	110
	6.1. Tujuan dan sasaran RPJMD.....	111
	6.2. Indikator kinerja yang mengacu pada RPJMD	111
BAB VII	PENUTUP	114
	7.1. Kesimpulan	114
	7.2. Kaidah transisi	115
	7.3. Kaidah Pelaksanaan	116

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1. Komposisi ASN Disperindag Provinsi Jambi Menurut jenjang pendidikan	19
Tabel 2.2. Sarana dan prasarana kerja Disperindag Provinsi Jambi	22
Tabel 2.3. Pagu dan realisasi anggaran Disperindag Provinsi Jambi Tahun 2010 • 2015	24
Tabel 2.4. Perkembangan PAD dari jasa pelayanan	25
Tabel 2.5. Perusahaan/Industri di Provinsi Jambi	27
Tabel 2.6. Perkembangan tenaga kerja Industri Kecil Menengah dan Besar..	27
Tabel 2.7. Perkembangan usaha perdagangan Provinsi Jambi	31
Tabel 2.8. Perkembangan aktivitas perdagangan melalui kegiatan pasar lelang agro di Provinsi Jambi	32
Tabel 2.9. Perkembangan pelaksanaan pengujian mutu komoditi ekspor	33
Tabel 2.10. Perkembangan nilai ekspor Provinsi Jambi	34
Tabel 2.11. Perkembangan Nilai impor Provinsi Jambi	35
Tabel 2.12. Perkembangan Penerbitan API	35
Tabel 2.13. Perkembangan penrbitan SKA	35
Tabel 2.14. Perkembang eksportir baru di Provinsi Jambi €	36
Tabel 2.15. Pencapaian kinerja pelayanan Disperindag Provinsi Jambi	37
Tabel 3.1. Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi Disperindag Provinsi Jambi	47
Tabel 3.2. Faktor penghambat dan pendorong pelayanan SKPD terhadap capaian visi, misi dan program Gubernur dan wakil Gubernur	52
Tabel 3.3. Permasalahan pelayanan SKPD berdasarkan sasaran Renstra K/I beserta faktor penghambat dan pendorong	56
Tabel 3.4. Hasil analisis terhadap dokumen KLHS Provinsi Jambi	60
Tabel 4.1. Tujuan dan sasaran jangka menengah Disperindag Provinsi Jambi	71
Tabel 4.2. Hubungan hirarki anatara Misi, Tujuan, Strategi dan Kebijakan ...	74
Tabel 5.1. Indikator dan tolak ukur kinerja program dan kegiatan Disperindag Provinsi Jambi	82
Tabel 5.2. Lokasi pelaksanaan dan pendanaan indikatif program Disperindag Provinsi Jambi	91
Tabel 5.3. Rencana Program , Kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan Pendanaan	93
Tabel 5.3. Indikator kinerja Disperindag Provinsi Jambi yang mengacu pada tujun dan sasaran RPJMD	113

DAFTAR GRAFIK

	Halaman
Tabel 2.1. Komposisi ASN	19
Tabel 2.2. Persentase ASN berdasarkan jenjang pendidikan €€€ .€€€	20
Tabel 2.3. Komposisi ASN berdasarkan Pangkat/Golongan	20
Tabel 2.4. Komposisi ASN berdasarkan jabatan	21
Tabel 2.5. Komposisi ASN Berdasarkan usia	21
Tabel 2.6. Perimbangan ASN Berdasarkan tingkat diklat struktural	22
Tabel 2.7. Pertumbuhan sektor Industri pengolahan (%) Provinsi Jambi	26
Tabel 2.8. Pertumbuhan sektor perdagangan (%) Provinsi Jambi	30

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1.1. Kerangka pikir Penyusunan Renstra SKPD	3
Gambar 2.2. Hubungan Renstra Disperindag Provinsi Jambi dengan Dokumen perencanaan lainnya	6
Gambar 2.3. Struktur Organisasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi	18

BAB I | PENDAHULUAN



DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROVINSI JAMBI

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

*P*erencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan - tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan didalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial di lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara perencanaan, Pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, Tata cara Evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, Rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan Rencana kerja pemerintah daerah.

Renstra SKPD atau Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah merupakan salah satu dokumen rencana resmi daerah pada level SKPD yang dipersyaratkan untuk mengarahkan pelayanan SKPD khususnya dan pembangunan daerah pada umumnya dalam jangka waktu 5 (lima) tahun kedepan masa kepemimpinan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih. Renstra SKPD menjawab 3 pertanyaan dasar; (1) kemana pelayanan SKPD akan diarahkan pengembangannya dan apa yang hendak dicapai dalam 5 (lima) tahun mendatang; (2) bagaimana mencapainya dan ; (3) langkah langkah strategis apa yang perlu dilakukan agar tujuan tercapai.

Adapun fungsi dari Renstra SKPD yaitu sebagai pedoman dalam pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan tahunan dan lima tahunan sesuai dengan hasil pelaksanaan rencana pembangunan yang telah ditetapkan. Dalam konteks ini sangat penting bagi Renstra SKPD untuk mengklarifikasikan secara eksplisit visi dan misi kepala daerah terpilih dan RPJMD, kemudian menerjemahkan secara strategis, sistematis dan

Bab 1 Berisi :

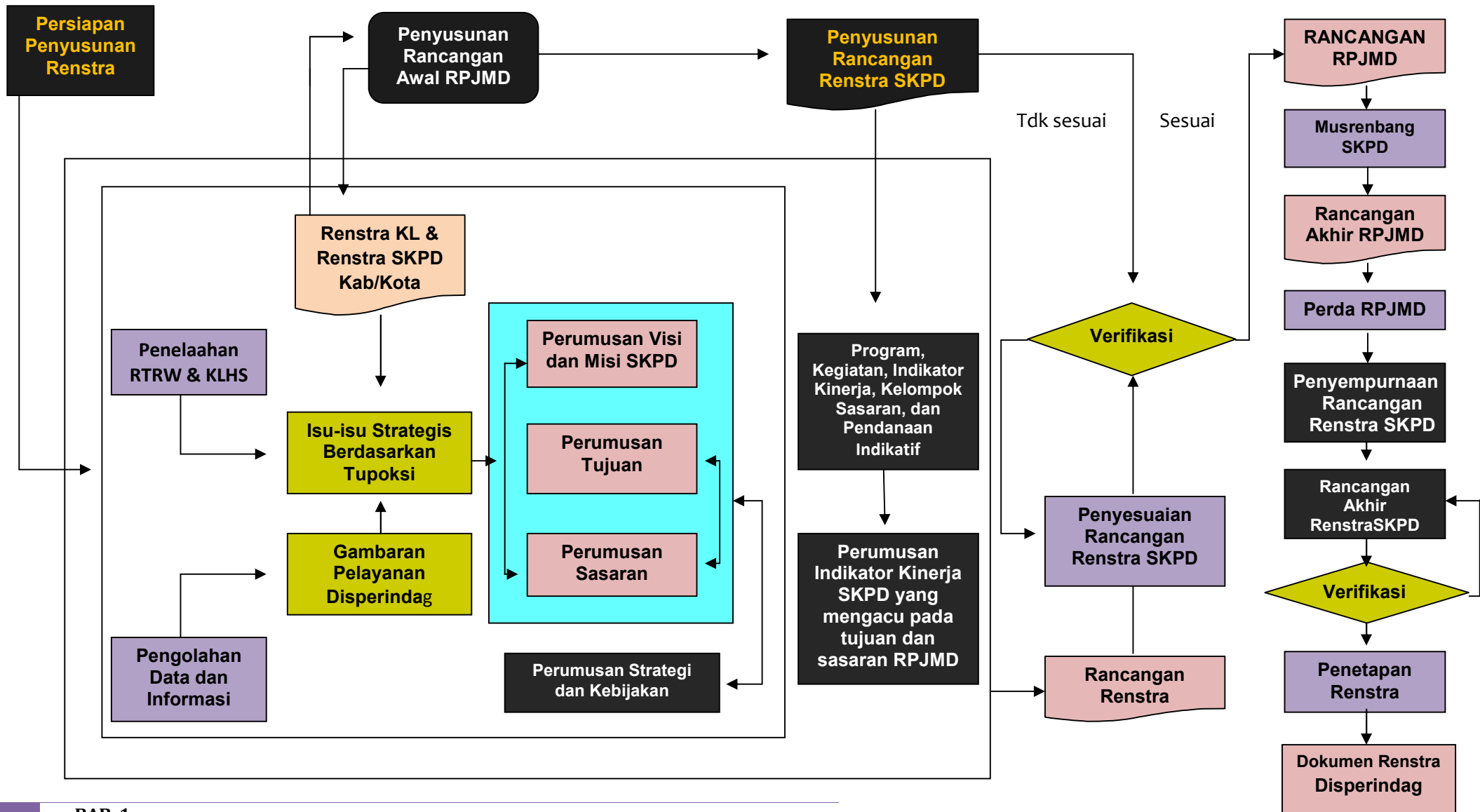
- 1.1 Latar Belakang*
- 1.2 Landasan Hukum*
- 1.3. Maksud dan Tujuan*
- 1.4. Sistematika Penulisan*

terpadu ke dalam tujuan, strategi, kebijakan, dan program prioritas SKPD serta tolok ukur pencapaiannya.

Penyusunan Rencana Strategis Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi disusun berdasarkan ketentuan didalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017. Proses pelaksanaan penyusunan Rencana Strategis dimulai dari tahap persiapan sebagai bagian dari kegiatan telaah terhadap peraturan dan kebijakan maupun perumusan konsep awal sampai dengan rancangan renstra tersebut selesai disusun dan menjadi input didalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Proses penyusunan Rencana Strategis tersebut secara prinsip akan berjalan simultan dengan proses penyusunan RPJMD. Dalam pelaksanaannya, Renstra ini sangat ditentukan oleh komitmen, keterlibatan serta dukungan dari pada masyarakat, stake holder yang terkait dengan perindustrian dan perdagangan serta pihak eksekutif dan legislatif baik dalam bentuk fasilitasi kebijakan maupun pendanaan yang sangat erat kaitannya dengan implentasi program dan kegiatan yang menjadi wewenang Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi. Secara lebih jelasnya diagram alir proses penyusunan renstra sampai dengan proses ditetapkannya renstra dapat dilihat pada gambar berikut ini :

Gambar 1.1. Kerangka Pikir Penyusunan Renstra SKPD



Sesuai dengan sistem perencanaan pembangunan berdasarkan UU Nomor 25 Tahun 2004, Hubungan Renstra SKPD dengan Dokumen perencanaan lainnya adalah sebagai berikut :

1. Renstra Dinas Perindag Provinsi Jambi dengan RPJPD Provinsi Jambi

Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi 2016 € 2021 merupakan rencana pembangunan tahap kedua dari pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 2005-2025. Oleh sebab itu, penyusunan Renstra selain memuat visi, misi dan program prioritas SKPD juga berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jambi. Dalam RPJPD Provinsi Jambi 2005 € 2025, dengan visi **JAMBI YANG MAJU, MANDIRI, ADIL DAN SEJAHTERA**, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari visi Pembangunan Nasional Tahun 2005-2025 yang diarahkan pada pencapaian tujuan nasional sebagaimana tertuang dalam Pembukaan UUD 1945. Untuk mewujudkan visi pembangunan jangka panjang tersebut ditempuh melalui 6 (enam) misi pembangunan yaitu : (1) Mewujudkan daerah yang memiliki keunggulan kompetitif; (2) Mewujudkan Masyarakat beriman, bertaqwa dan Berbudaya; (3) Mewujudkan masyarakat demokratis dan berbudaya hukum; (4) Mewujudkan kondisi yang aman, tentram dan tertib; (5) Mewujudkan pembangunan yang merata dan berkeadilan; (6) Mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan. Pada tahap kedua Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi yang dimuat di dalam RPJPM Provinsi Jambi, menepatkan fokus pembangunan lebih di arahkan pada peningkatan kualitas pelayanan dasar, pertumbuhan ekonomi serta peningkatan kualitas pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup. Ketiga fokus pembangunan ini ditujukan dalam rangka meningkatkan dan memperkuat identitas pembangunan Provinsi Jambi yang konsisten menuju terwujudnya visi dan misi pembangunan Provinsi Jambi 2005-2025.

2. Renstra Dinas Perindag Provinsi Jambi dengan RPJMD Provinsi Jambi

Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi 2016 € 2021 merupakan penjabaran teknis RPJMD yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional yang memuat Visi, Misi, Arah Kebijakan Teknis dan Indikasi Rencana Program setiap Bidang Kewenangan dan atau Fungsi Pemerintahan untuk jangka waktu lima tahunan dan disusun oleh setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di bawah koordinasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Jambi. Dengan demikian kesinambungan dan konsistensi perencanaan pembangunan dapat berjalan dengan baik.

3. *Renstra Dinas Perindag Provinsi Jambi dengan Rencana Strategis Kementerian Perdagangan dan Kementerian Perindustrian*

Renstra Kementerian Perdagangan 2014 - 2019 dan Renstra Kementerian Perindustrian 2014 - 2019 menjadi acuan dalam penyusunan Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi 2016 € 2021 sehingga terwujudnya keterpaduan, sinkronisasi dan sinergitas pencapaian sasaran pelaksanaan Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi terhadap sasasaran renstra Kementerian.

4. *Renstra Dinas Perindag Provinsi Jambi dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD)*

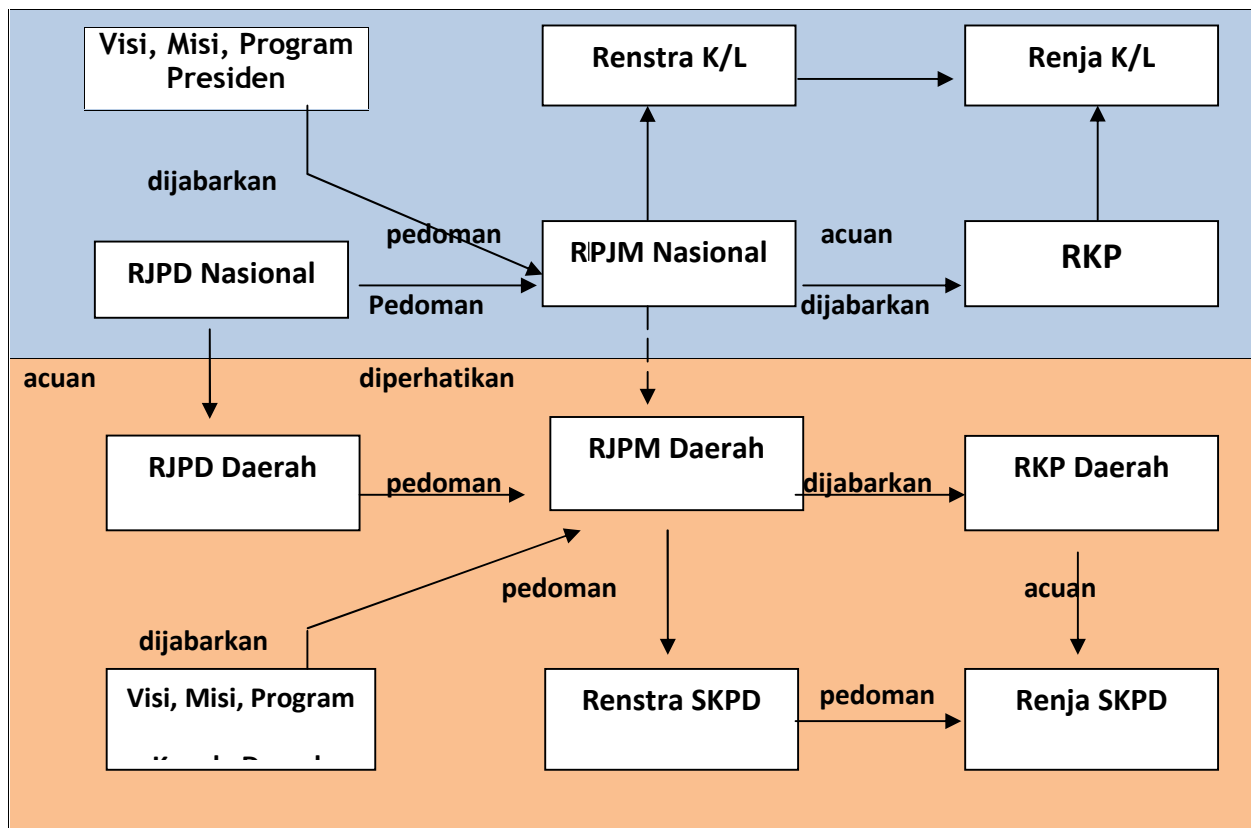
RKPD menjadi acuan dalam pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang dilaksanakan secara berjenjang mulai dari tingkat desa/kelurahan, kecamatan, kabupaten. Selanjutnya SKPD dengan berpedoman pada Renstra SKPD dan RKPD menyusun rencana kerja tahunan berupa Rencana Kerja (Renja) SKPD.

5. *Renstra Dinas Perindag Provinsi Jambi dengan Rencana Kerja (Renja) Dinas Perindag Provinsi Jambi*

Renja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi merupakan dokumen perencanaan tahunan setiap unit kerja daerah dan disusun sebagai penurunan Renstra SKPD dan memuat rencana kegiatan pembangunan tahun berikutnya, yang dilengkapi dengan formulir kerangka anggaran dan kerangka regulasi serta indikasi pembiayaan.

Secara lebih jelasnya diagram keterkaitan antara Renstra Dinas Perindag Provinsi Jambi dengan dokumen perencanaan lainnya dapat dilihat pada gambar 1.2. berikut ini.

Gambar 1.2. Hubungan Renstra Disperindag Provinsi Jambi dengan Dokumen Perencanaan Lainnya



1.2. Landasan Hukum

Dasar Hukum penyusunan Renstra SKPD Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi Tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembara Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);

5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4585);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737).
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) ;
13. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008, tentang Urusan yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Jambi (lembaran Daerah Pemerintah Provinsi Jambi Tahun 2008 Nomor 7);

17. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jambi Nomor 16);
18. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2009 Nomor 6);
19. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jambi 2013-2033 (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2013 Nomor 10);
20. Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jambi Tahun 2016 € 2021 (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2016 Nomor 07);
21. Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2016 Nomor 08, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jambi Nomor 8);
22. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 31.1/M-IND/PER/3/2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Perindustrian Tahun 2015-2019 ;
23. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 27/M-DAG/PER/4/2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Perdagangan Tahun 2015-2019 ;
24. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 26 Tahun 2009 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) pada Dinas Daerah dan Dinas Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB) pada Badan Daerah Provinsi Jambi.
25. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 47 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta tata Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi (Berita Daerah Provinsi Jambi Tahun 2016 Nomor 47) ;
26. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara perencanaan, Pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, Tata cara Evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, Rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan Rencana kerja pemerintah daerah.

1.3. Maksud dan Tujuan

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Jambi Tahun 2016-2021 ini disusun dengan maksud dan tujuan sebagai berikut :

1.3.1. Maksud

- a. Memenuhi amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan PP Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional;
- b. Memberikan arah kebijakan dan strategi pembangunan bidang perindustrian dan perdagangan dengan melakukan perencanaan terpadu dan menyelaraskan pelaksanaan program serta mengendalikannya untuk kurun waktu 2016-2021, sehingga diharapkan mampu mendukung pencapaian tugas pokok dan fungsi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi;
- c. Sebagai pedoman bagi seluruh komponen/aparatur Dinas Perindustrian dan perdagangan Provinsi Jambi dalam melaksanakan kegiatan selama kurun waktu 5 (lima) tahun.

1.3.2. Tujuan

- a. Penyediaan suatu dokumen yang strategik dan komprehensif yang menjamin adanya konsistensi perumusan kondisi atau masalah di bidang perindustrian dan perdagangan;
- b. Sebagai sarana sinkronisasi dan pelaksanaan kebijakan RPJMD Provinsi Jambi tahun 2016-2021;
- c. Sebagai dasar dalam penyusunan rencana kerja (renja) tahunan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi;
- d. Sebagai indikator pengukuran kinerja lima tahunan bagi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penyusunan Renstra Dinas Perindag Provinsi Jambi periode 2016 € 2021 adalah sebagai berikut :

1. BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini berisi mengenai latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika penyusunan Rencana Strategis Dinas Perindag Provinsi.

2. BAB II : GAMBARAN PELAYANAN DINAS PERINDAG PROVINSI JAMBI

Bab II memuat tugas, fungsi yang di dalamnya memuat struktur organisasi, susunan kepegawaian, tugas pokok dan fungsi yang terkait dengan kewenangan urusan pilihan bidang industri dan perdagangan, kondisi capaian kinerja pembangunan bidang industri

dan perdagangan di Provinsi Jambi 2016-2021 dan tantangan serta peluang pelayanan SKPD Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi;

3. BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

Komponen dalam Bab III memuat permasalahan pokok berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Dinas, telaahan visi, misi dan program Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih, RT/RW dan Kajian Lingkungan strategis, serta penentuan isu-isu strategis.

4. BAB IV. VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Bab IV memuat berbagai konsensus dan komitmen mengenai visi, misi, tujuan dan sasaran serta strategi kebijakan bidang Industri dan Perdagangan yang diarahkan untuk dapat mendukung terwujudnya visi dan misi Pemerintah Provinsi Jambi Tahun 2016 € 2021;

5. BAB V. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN SERTA PENDANAAN INDIKATIF

Bab ini memuat program dan kegiatan untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Disamping itu juga memuat tentang indikator kinerja kelompok sasaran serta pendanaan indikatif untuk lima tahun kedepan. Bab ini menguraikan tentang program dan kegiatan organisasi, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran serta Pendanaan Indikatif dalam kurun waktu 5 tahun kedepan.

6. BAB VI. INDIKATOR KINERJA YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Bab ini menguraikan Indikator Kinerja SKPD yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai SKPD dalam 5 tahun mendatang sebagaimana komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

7. BAB VIII. PENUTUP

Bab ini berisi tentang kesimpulan dan penegasan terhadap komitmen untuk melaksanakan Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi Tahun 2016 € 2021 secara konsisten yang implementasinya dijabarkan dalam Rencana Kerja Tahunan serta berlaku sebagai pedoman standar kinerja pelaksanaan program serta kegiatan 5 (lima) tahunan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi dalam kaidah pelaksanaan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN



**DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROVINSI JAMBI**

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi

Gambaran Pelayanan SKPD dalam konteks penyusunan Rencana Strategis diperlukan didalam menjabarkan tujuan, fungsi dan struktur organisasi yang dalam hal ini adalah terkait dengan kelembagaan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi. Sumberdaya yang dimiliki oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi yang terkait dengan kondisi kepegawaian, kondisi sarana dan prasarana yang dimiliki, kinerja pelayanan yang dilaksanakan tentunya terkait dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi, serta tantang dan peluang didalam usaha untuk mengembangkan pelayanan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi.

Bab 2 Berisi :

- 2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi*
- 2.2. Sumber Daya SKPD*
- 2.3. Kinerja Pelayanan*
- 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD*

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Melaksanakan ketentuan Pasal 4 Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan Pasal 3 Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jambi, ditetapkanlah Peraturan Gubernur Jambi Nomor 47 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi, yang merupakan lembaga teknis daerah sebagai unsur penunjang Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas dan bertanggung jawab kepada Gubernur Jambi, Tugas dan fungsi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi sebagai berikut :

2.1.1. Tugas

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi. Sebagaimana Pasal 3, mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian urusan dibidang perindustrian dan

perdagangan berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan dibidang perindustrian dan perdagangan.

2.1.2. Fungsi

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi menyelenggarakan ***fungsi sesuai Pasal 4*** yaitu :

1. Perumusan kebijaksanaan teknis dibidang Perindustrian dan Perdagangan
2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan Umum dibidang Perindustrian dan Perdagangan.
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang Perindustrian dan Perdagangan
4. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai tugas dan fungsinya.

Berdasarkan Peraturan Gubernur Jambi Nomor 47 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi dan dan Peraturan Gubernur Jambi Nomor 26 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas daerah dan Unit Pelaksana Teknis Badan pada Badan Daerah Provinsi Jambi, mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai berikut :

1. Kepala Dinas .

Tugas Kepala Dinas yaitu melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 serta memimpin dan mengkoordinasikan seluruh kegiatan Sekretariat, Bidang, UPTD dan Kelompok jabatan Fungsional.

2. Sekretariat

Sesuai dengan Pasal 6, Sekretariat mempunyai tugas membantu dinas dalam rangka merencanakan pelayanan administrasi, kepegawaian umum, keuangan, hukum, program, pelaporan, monitoring dan evaluasi kepada semua satuan organisasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan maupun pihak-pihak terkait. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Sekretariat mempunyai fungsi yaitu :

- a. Pelaksanaan koordinasi keuangan, kepegawaian umum, keuangan, hukum, program, pelaporan, monitoring dan evaluasi ;
- b. Penyelenggaraan petunjuk pengelolaan administrasi surat menyurat, pemeliharaan gedung di lingkungan kantor, kendaraan operasional, protokoler dan rumah tangga Dinas Perindustrian dan Perdagangan ;
- c. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Sekretariat dibantu oleh tiga Sub Bagian yaitu :

- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- b. Sub Bagian Keuangan dan Asset
- c. Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan

Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

3. Bidang Industri Kecil dan Kerajinan

Tugas pokok Bidang Industri Kecil dan Kerajinan sebagaimana Pasal 14 yaitu melaksanakan bimbingan teknis kebijakan pembinaan dan pengembangan sarana produksi, teknologi pemasaran/permodalan, kemitraan, promosi pemasaran Industri Kecil dan Kerajinan serta memfasilitasi kemudahan Investasi Industri, analisa iklim usaha pengendalian lingkungan dan kerjasama bidang industri. Untuk melaksanakan tugas tersebut sesuai Pasal 15, Bidang Industri Kecil dan Kerajinan mempunyai fungsi yaitu :

- a. Menyusun juknis, bimbingan pembinaan dan pengendalian industri.
- b. Pelaksanaan fasilitasi bantuan teknis teknologi (proses produksi), pemasaran, modal peralatan dan kemitraan.
- c. Pelaksanaan fasilitasi promosi Pameran Dalam Negeri dan Luar Negeri, sinergi dengan program instansi terkait.
- d. Pelaksanaan fasilitasi kemudahan pengurusan investasi industri, kemudahan perolehan modal dengan mitra usaha industri/dagang
- e. Pelaksanaan bimbingan dan pemantauan penanganan pengendalian lingkungan.
- f. Pelaksanaan sosialisasi kebijakan teknis dan peraturan Perundangan-undangan Bidang Industri.
- g. Kerjasama dengan bidang lain untuk pengembangan industri.
- h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Bidang Industri Kecil dan Kerajinan dibantu oleh tiga Seksi yaitu :.

- a. Kepala Seksi Bimbingan Usaha dan Daya Saing
- b. Kepala Seksi Bimbingan Produksi dan Pengendalian Lingkungan
- c. Kepala Seksi Sarana Promosi dan Publikasi

Masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

4. Bidang Industri Menengah dan Besar

Tugas pokok Bidang Industri Menengah dan Besar sebagaimana Pasal 22 yaitu melaksanakan penyiapan pemberian bimbingan teknis terhadap pelaksanaan kebijakan pembinaan dan pengembangan sarana, usaha, produksi, analisis iklim usaha lingkungan, peningkatan kerjasama dan pemantauan serta evaluasi kebijakan teknis di bidang industri Menengah dan Besar. Untuk melaksanakan tugas tersebut sesuai Pasal 23, Bidang Industri Menengah dan Besar mempunyai fungsi yaitu :

- a. Penyusunan perencanaan dibidang industri dan menyusun petunjuk teknis pembinaan serta pedoman kegiatan usaha dibidang industri menengah dan besar.
- b. Pengkoordinasian pemberian bimbingan teknis pembinaan dan pengembangan sarana, usaha dan produksi dibidang industri menengah dan besar.
- c. Pengkoordinasian bahan pembinaan dibidang industri menengah dan besar.
- d. Pengkoordinasian menganalisa iklim usaha dan peningkatan kerjasama dengan dunia usaha dibidang industri menengah dan besar.
- e. Pelaksanaan fasilitasi promosi pameran di Dalam dan Luar Negeri sinergi dengan program instansi terkait.
- f. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian usaha industri
- g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Bidang Industri Menengah dan Besar dibantu oleh tiga Seksi yaitu :

- a. Seksi Industri Agro, Kimia dan Aneka
- b. Seksi Industri Mesin, Logam dan Alat Transportasi
- c. Seksi Pengawasan dan Pengendalian Usaha Industri

Masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

5. Bidang Perdagangan

Tugas pokok Bidang Perdagangan sebagaimana Pasal 30 yaitu melaksanakan kebijakan teknis perdagangan meliputi pembinaan dan pelaksanaan perdagangan dalam negeri dan luar negeri meliputi pengendalian stabilisasi bahan pokok dan barang penting, pengembangan ekspor, memperkecil ketergantungan pada impor, bina usaha dan sarana perdagangan dan pencitraan cinta produk dalam negeri.

Untuk melaksanakan tugas sesuai Pasal 31 tersebut, Bidang Perdagangan menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis dan pembinaan dibidang bahan pokok dan barang penting, bahan berbahaya (b2) minuman beralkohol (minol) perdagangan gula antar pulau terdaftar (pgapt), pusat distribusi regional dan provinsi.

- b. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijaksanaan teknis dan pembinaan dibidang pengembangan ekspor dan memperkecil ketergantungan pada impor dan pembinaan terhadap pelaku usaha yang berpeluang ekspor dan eksportir potensial.
- c. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijaksanaan teknis dan pembinaan dibidang bina usaha dan sarana perdagangan.
- d. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Bidang Perdagangan Dalam Negeri dibantu oleh tiga Seksi yaitu :

- a. Seksi Perdagangan Dalam Negeri
- b. Seksi Perdagangan Luar Negeri
- c. Seksi Bina Usaha, sarana, pengembangan pasar dalam dan luar negeri

Masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

6. Bidang Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga

Tugas pokok Bidang Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga sebagaimana Pasal 38 yaitu melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pemberdayaan konsumen dan pengawasan barang beredar dan / atau jasa di pasar serta pengendalian distribusi barang.

Untuk melaksanakan tugas tersebut sesuai Pasal 39, Bidang Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga mempunyai fungsi yaitu :

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pemberdayaan konsumen,
- b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pengawasan barang beredar dan atau jasa di pasar.
- c. Persiapan bahan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan analisa kasus perlindungan konsumen dan perdagangan, bimbingan operasional petugas pengawas barang dan jasa (PPBJ), petugas pengawas tertib niaga (PPTN), dan penyidik pegawai negeri sipil perdagangan (PPNS-DSG)
- d. Pelaksanaan dan evaluasi penegakan hukum perlindungan konsumen, penegakan hukum perizinan dibidang perdagangan, penegakan hukum terhadap kegiatan distribusi barang pokok, barang penting dan barang yang diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- e. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pemberdayaan konsumen, pengawasan barang beredar dan jasa di pasaran.
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Bidang Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga dibantu oleh tiga Seksi yaitu :

- a. Seksi Perlindungan Konsumen
- b. Seksi Pengawasan Barang Beredar dan Jasa
- c. Seksi Tertib Niaga

Masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

7. Unit Pelaksana Teknis Daerah

Sesuai dengan Peraturan Gubernur Jambi Nomor 26 Tahun 2009 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) pada Dinas Daerah dan Dinas Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB) pada Badan Daerah Provinsi Jambi, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi hanya memiliki 1 (satu) UPTD yaitu :

Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang (BPSMB)

Tugas pokok Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang (BPSMB) yaitu melaksanakan sebagian kewenangan dan tugas teknis tertentu yang diberikan Dinas Perindustrian dan Perdagangan dibidang pengawasan, pengujian, penelitian dan sertifikasi mutu barang serta memberikan bimbingan teknis kepada para produsen, eksportir dan dunia usaha lainnya. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang (BPSMB mempunyai fungsi yaitu :

- a. Pelaksanaan kegiatan perencanaan dan program penyelenggaraan dibidang standarisasi, pengawasan, pengujian, penelitian dan sertifikasi mutu barang;
- b. Penyusunan dan pengembangan sistem jaminan mutu untuk memenuhi penerapan standar internasional ISO/IEC 17025 (SNI 19-17025-2000) dengan mempersiapkan dokumen mutu laboratorium;
- c. Pelaksanaan pengawasan mutu barang ekspor tertentu melalui kegiatan pengambilan contoh, pengujian, Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang (BPSMB ;
- d. Pelaksanaan pengambilan contoh dan pengujian dalam rangka sertifikasi produk pengajuan tanda SNI;
- e. Pelaksanaan pengawasan dan pengujian mutu barang yang beredar di pasaran, baik produk dalam negeri, maupun produk ekspor, impor dalam rangka perlindungan konsumen;
- f. Pelaksanaan pengembangan serta penyusunan standar dan metode pengujian;
- g. Pelaksanaan pelayanan jasa dibidang standarisasi dan pengendalian mutu barang serta bimbingan teknis kepada dunia usaha dan masarakat;

- h. Pelaksanaan kalibrasi teknis peralatan laboratorium pengujian/pabrik/perusahaan;
- i. Pelaksanaan pelatihan dibidang teknis laboratorium kalibrasi;
- j. Pemberian bimbingan dan konsultasi penerapan ISO/IEC 17025 (SNI 19-17025-2000) kepada laboratorium pengujian dan kalibrasi perusahaan dan organisasi lainnya;
- k. Pengelolaan sarana laboratorium dan sarana penunjang serta bahan-bahan untuk pengujian dan kalibrasi;
- l. Pelaksanaan analisa dan evaluasi mutu hasil pengujian serta data yang berkaitan dengan pengawasan, penelitian dan sertifikasi mutu barang;
- m. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang (BPSMB) dibantu oleh :

a. Sub Bagian Tata Usaha

Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD

b. Kelompok Jabatan Fungsional

2.1.3. Struktur Organisasi

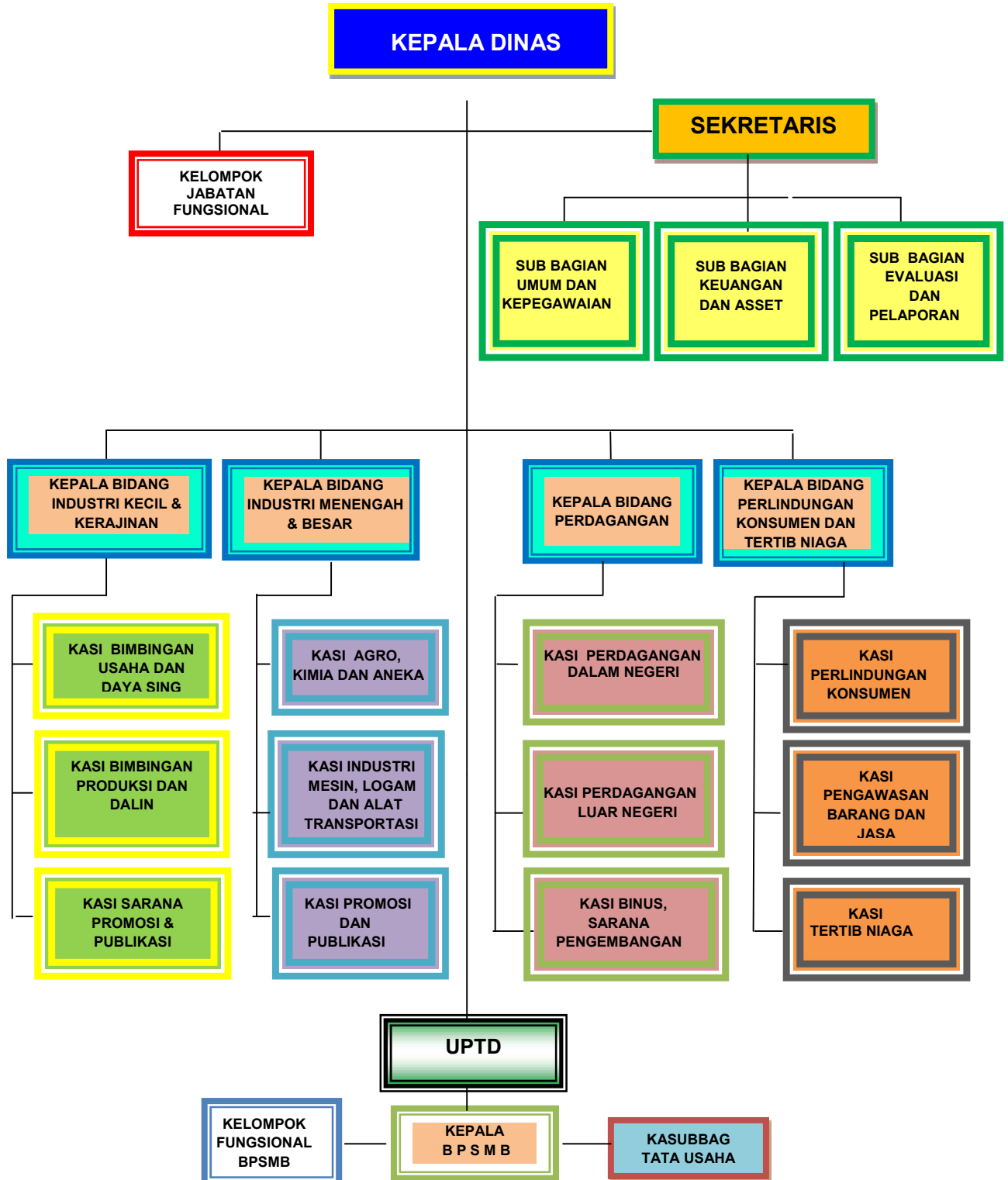
Berdasarkan Peraturan Gubernur Jambi Nomor 47 Tahun 2016 tanggal 29 Desember 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta tata Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi terdiri dari ;

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretaris;
- c. Bidang Industri dan Kerajinan;
- d. Bidang Industri Menengah dan Besar;
- e. Bidang Perdagangan;
- f. Bidang Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga;
- g. UPTD;
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

Adapun struktur organisasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi sebagaimana pada gambar di bawah ini :

Gambar 2.1.

Struktur Organisasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi



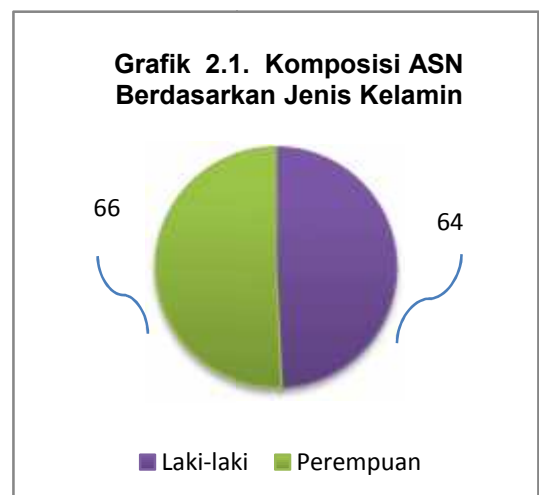
2.2. Sumber Daya Dinas Perindag Provinsi Jambi

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi Dinas memiliki kapasitas SDM dalam jumlah dan kualitas yang memadai. Per 31 Desember 2017, jumlah ASN di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi sebanyak 121 orang dengan rincian sebagai berikut :

1. Dinas Perindag Provinsi Jambi sebanyak 111 orang
2. UPTD BPSMB sebanyak 19 orang

A. Komposisi ASN Berdasarkan Jenis Kelamin

Dengan perimbangan laki laki sebanyak 64 orang (49,23 %) dan perempuan sebanyak 66 orang (50,76 %), yang menunjukkan perimbangan gender yang baik sebagaimana nampak dalam grafik disamping ini :

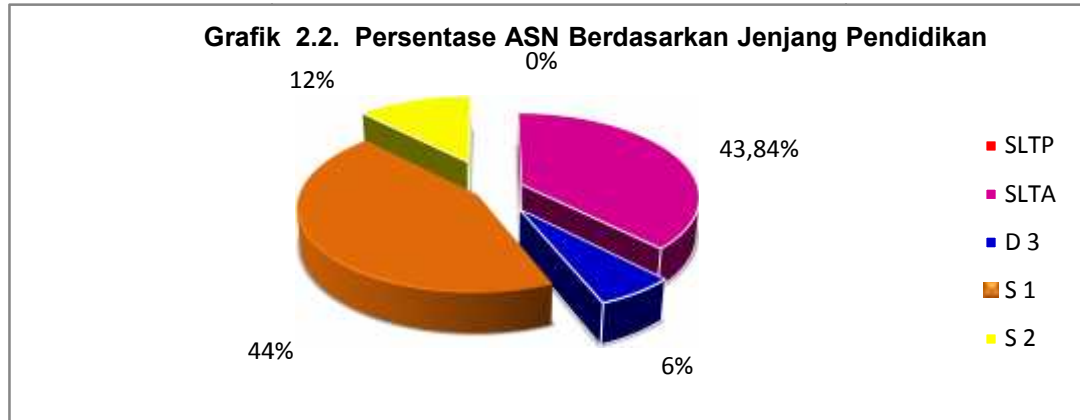


B. Komposisi ASN Berdasarkan Jenjang Pendidikan

Bila dirunut per jenjang pendidikan, maka persentase terbesar adalah jenjang pendidikan S1 sebanyak 57 orang (43,84%), kemudian SLTA sebanyak 49 orang (37,69%). Selain itu, ASN dengan pendidikan S2 juga sudah mulai banyak yaitu sebanyak 16 orang. Hal ini menunjukkan bahwa dari segi jenjang pendidikan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi memiliki keragaan sumber daya manusia yang baik. Selanjutnya apabila datanya dipilah menurut tingkat pendidikan dan jenis kelamin, maka datanya menunjukkan perimbangan gender yang baik. Komposisi per jenjang pendidikan adalah sebagai berikut :

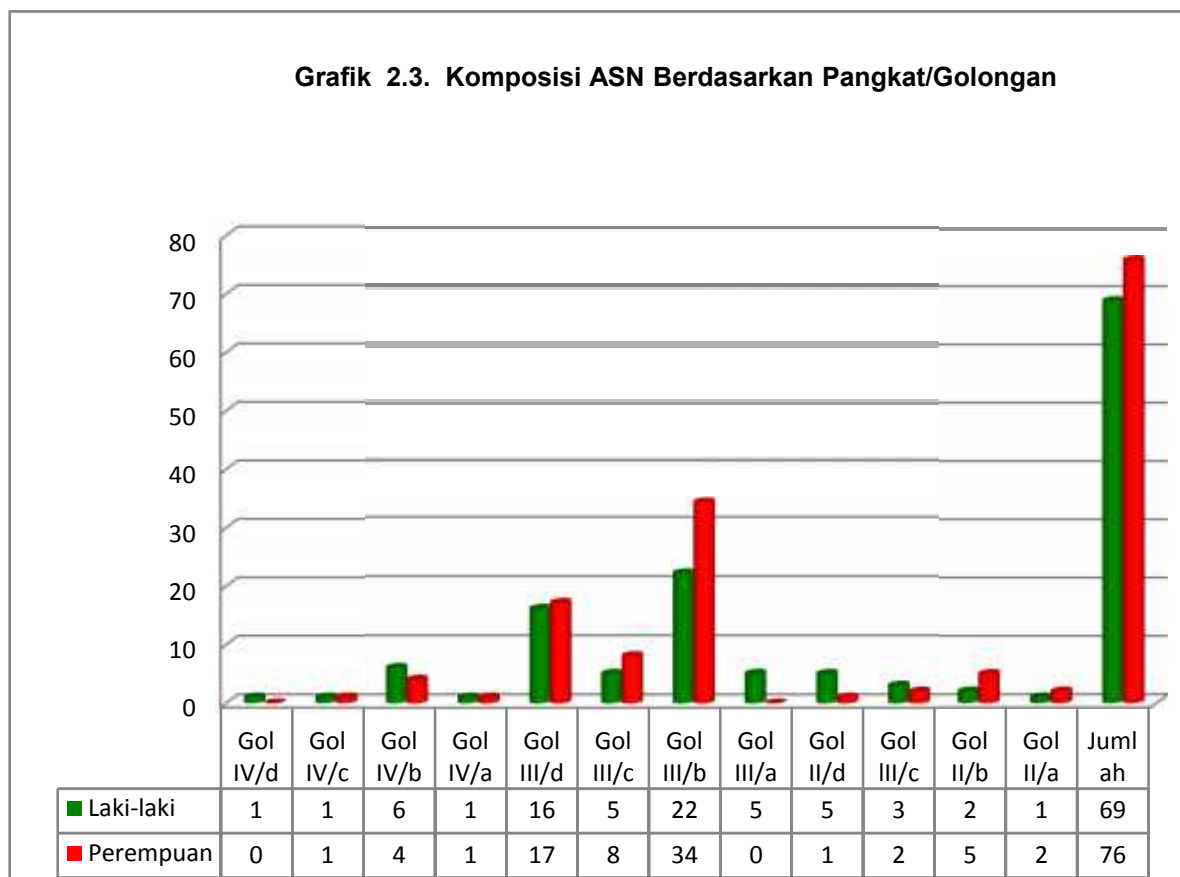
Tabel 2. 1. Komposisi ASN Disperindag Prov. Jambi Menurut Jenjang Pendidikan

No.	Pendidikan	L	P	Jumlah
1.	S2	10	6	16
2.	S1	28	29	57
3.	D3	4	4	8
4.	SLTA	22	27	49
5.	SLTP	0	0	0
	JUMLAH	64	66	130



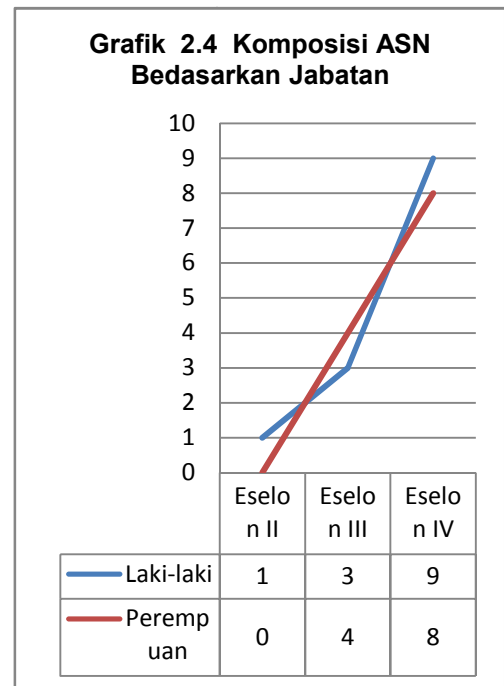
C. Komposisi ASN Berdasarkan Pangkat/Golongan

Sebagian besar SDM Dinas Perindag Provinsi Jambi berdasarkan golongan 73,80.% adalah golongan III (107 orang). Untuk pegawai yang bergolongan IV memiliki presentase 10,34 % (15 orang). Sedangkan pegawai dengan golongan II memiliki persentase 15,86 % (23 orang) dari keseluruhan pegawai.



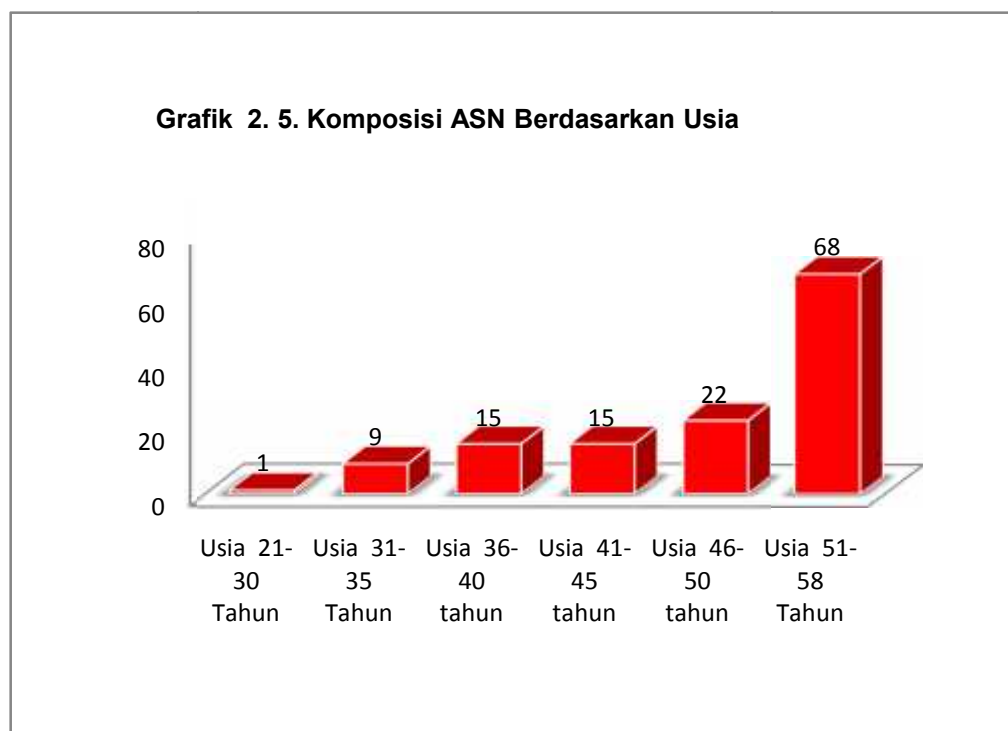
D. Komposisi ASN Berdasarkan Jabatan

Dikarenakan institusi Dinas Perindag Provinsi Jambi merupakan institusi teknis yang mengharuskan latar belakang pendidikan tertentu maka pegawai laki-laki dan perempuan di Dinas Perindag Provinsi Jambi memperoleh perlakuan yang setara serta memiliki kesempatan yang sama dalam berkarir. Hal ini dibuktikan dengan adanya 3 (tiga) pegawai perempuan yang menduduki jabatan eselon III dan 8 (delapan) pegawai perempuan yang menduduki jabatan eselon 4. Untuk jelasnya komposisi pegawai berdasarkan jabatan dapat dilihat pada grafik disamping ini :



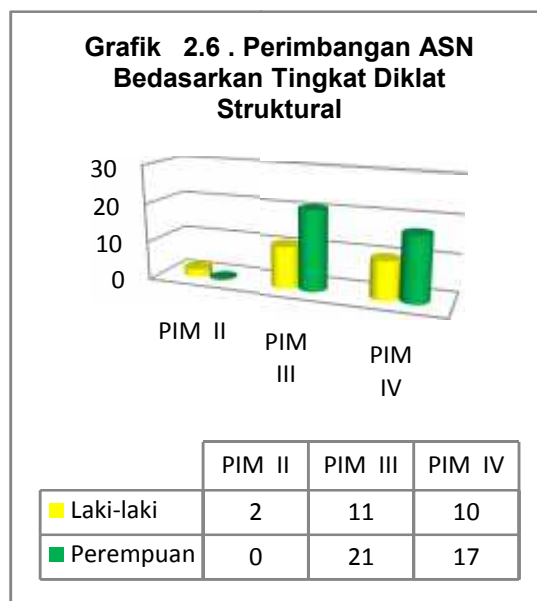
D. Komposisi ASN Berdasarkan Usia

ASN di lingkungan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi pada umumnya didominasi di usia antara 41 - 50 tahun dan 51-58 tahun. Komposisi ASN berdasarkan usia dapat dilihat pada bagan dibawah ini :



E. Komposisi ASN Berdasarkan Tingkat Diklat Struktural

Dari 130 orang SDM Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi yang sudah mengikuti Diklat Struktural baru sebanyak 51 orang yaitu PIM II sebanyak 3 orang, PIM III sebanyak 20 orang dan PIM IV sebanyak 28 orang., Bila dipilah lagi menurut jenis kelamin, datanya menunjukkan bahwa semakin tinggi jenis Diklat Struktural persentase perempuan semakin sedikit. Beberapa upaya perlu didorong untuk membuat pengembangan karir perempuan semakin terbuka termasuk dalam posisi-posisi strategis dalam pengambilan keputusan.



2.2.2. Kondisi Sarana dan Prasarana

Jenis prasarana dan sarana yang berpengaruh langsung terhadap operasional organisasi meliputi ruang dan peralatan kerja, sarana telekomunikasi dan transportasi. Kondisi prasarana dan sarana yang tersedia cukup memadai namun masih perlu ditingkatkan untuk mengoptimalkan kinerja. Secara lengkap, jenis dan jumlah prasarana dan sarana yang dimiliki oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi dapat dilihat pada Tabel dibawah ini :

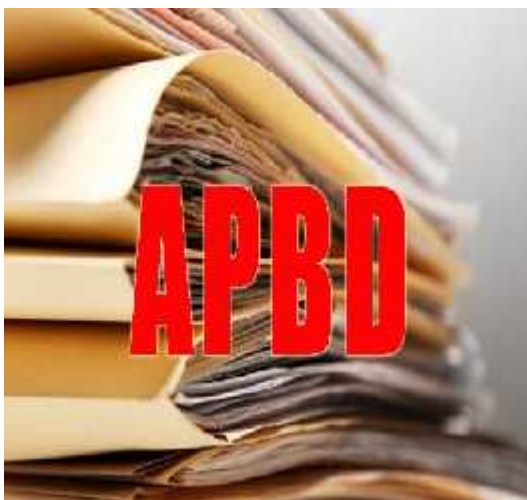
Tabel 2.2. Sarana dan Prasarana Kerja Disperindag Provinsi Jambi

No.	Jenis Barang>Nama Barang	Jumlah	Keterangan
A.	BANGUNAN DAN GEDUNG		
	- Gedung Kantor Disperindag Provinsi Jambi	1 Unit	Tahun 1972 Luas 716 m2
	- Rumah Dinas (Kepala)	1 Unit	Tahun 1972 Luas 120 m2
	- Rumah Dinas	11 buah	Tahun 1972-1984 Total Luas 940 m2
	- Gedung UPTD BPSMB	1 Unit	Tahun 1985 Luas 1000 m2
B.	- Tempat Beribadah (Mushalla)	1 Unit	Luas 36 m2 Tahun 2014
	PERALATAN DAN MESIN		
	Alat angkutan kendaraan roda 4	16 unit	Tahun 1991 - 2015
	Alat angkutan kendaraan roda 2	29 unit	Tahun 1992 - 2015
	Alat Bengkel dan Alat Ukur		Tahun 1998 - 2009
	- Mesin Bubut	1 Unit	
	- Alat Ukur	1 Uni	
	- Perkakas Bengkel	1 Unit	
	Alat Kantor dan Rumah Tangga		
	- Meja Biro	90 Unit	Tahun 1975-2015
	- Meja Rapat	43 Unit	Tahun 1976-1914

<ul style="list-style-type: none"> - Lemari Arsip - Lemari Besi - Lemari kayu - Filling Besi/Metal Filing Cabinet - Kursi Biasa - Kursi Lipat - Kursi Tamu - Kursi Kerja - Kursi Hidrolik - Kipas Angin - Printer - AC Split - AC Window - PC Unit - CPU - Meja Tamu - Stabilizer - Meja Komputer - Kursi Putar - Brankas - Komputer PC - Laptop 	<ul style="list-style-type: none"> 34 Unit 4 Unit 2 Unit 36 Unit 76 Unit 263 Unit 23 Unit 27 unit 7 Buah 28 buah 43 Unit 13 Unit 2 Unit 28 Unit 17 Unit 2 Unit 12 Unit 30 Unit 31 Unit 6 Unit 19 Unit 15 unit 	<ul style="list-style-type: none"> Tahun 1976-2015 Tahun 1981-2013 Tahun 1994-2015 Tahun 1980-2006 Tahun 1980-2014 Tahun 1983-2015 Tahun 1996-2014 Tahun 2009-2015 Tahun 2010 Tahun 1998-2015 Tahun 1980-2015 Tahun 1995-2015 Tahun 1996-2015 Tahun 1995-2009 Tahun 1997-2009 Tahun 1998-2015 Tahun 1986-2015 Tahun 1986-2014 Tahun 1992-2009 Tahun 2015 Tahun 1999-2015
Alat Studio dan Komunikasi <ul style="list-style-type: none"> - Faksimile - Pesawat Telpon - Handy Cam - Peralatan Studio Visual Lain2 	<ul style="list-style-type: none"> 2 Unit 2 Unit 6 Unit 1 unit 	<ul style="list-style-type: none"> Tahun 1994 1995, 2010 Tahun 1998, 2002, 2009 Tahun 2008, 2010 Tahun 2015
Alat-Alat laboratorium <ul style="list-style-type: none"> - Alat laboratorium UPTD Kemetrolgion dan BPSMB 	1.734 item	Tahun 1979-2015
Alat-Alat Keamanan <ul style="list-style-type: none"> - Alat Pembantu Pemadam Kebakaran 	3 buah	Tahun 1998- 2014

2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Perindag Provinsi Jambi

2.3.1. Perkembangan Pagu dan Realisasi Anggaran APBD Tahun 2010 - 2015



Pagu anggaran dan realisasi APBD Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi selama tahun 2010 hingga tahun 2015 menunjukkan angka yang fluktuatif. Pagu anggaran APBD turun sebesar Rp 474.374.550,- atau 3,87 % di tahun 2014 dan turun kembali sebesar Rp 1.135.451.500,- atau 9,64 % di tahun 2015. Untuk lebih jelasnya Pagu anggaran dan realisasi APBD Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi tahun 2010-2015 dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.3. Pagu dan Realisasi Anggaran Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Provinsi Jambi Tahun 2010 - 2015

No.	Tahun	Alokasi Anggaran	Pertumbuhan (%)	Realisasi Anggaran	
				Rp	%
1.	2010	5.379.500.000	€	4.417.298.778	82,11
2.	2011	6.732.853.000	25,16	6.146.037.555	91,28
3.	2012	8.061.910.100	19,74	7.556.037.329	93,73
4.	2013	12.247.590.050	51,92	10.472.986.582	85,51
5.	2014	11.773.215.500	- 3,87	10.825.852.614	91,95
6.	2015	10.637.764.000	- 9,64	9.956.839.914	93,60
Jumlah		54.832.832.650		49.375.052.772	90,05

2.3.2. Perkembangan Penerimaan PAD Tahun 2010 - 2015

Penerimaan Asli Daerah merupakan sumber pendapatan daerah yang berasal dari kegiatan ekonomi. Penerimaan asli daerah merupakan salah satu pilar kemandirian daerah. Penerimaan Asli Daerah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi lima tahun terakhir besarnya selalu meningkat, artinya DINPERINDAG Provinsi Jambi sudah dapat memaksimalkan kemampuannya dan mencerminkan kemampuan ekonomi yang baik dan stabil. PAD tersebut yang nantinya digunakan untuk pembangunan daerah demi kesejahteraan masyarakat



Sumber penerimaan (PAD) pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi diperoleh dari Unit Pelayanan Teknis Daerah (UPTD) Kemetrollogian berupa jasa tera alat Ukur Takar Timbangan dan Perlengkapannya (UTTP) dan Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang (BPSMB) berupa jasa pengujian mutu barang.

Realisasi PAD yang diterima Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi dari 2 UPTD tersebut sebesar Rp. 2.623.068.535,-. atau 10,81 % melebihi target sebesar Rp. 2.367.100.000,-. Perkembangan penerimaan PAD pada UPTD BPSMB dan UPTD Metrologi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi dapat dilihat pada tabel 2.4.

Tabel 2.4. Perkembangan PAD dari Jasa Pelayanan Pengujian Mutu Barang UPTD BPSMB dan Pelayanan Tera/Tera Ulang UPTD Metrologi

No.	Tahun	Penerimaan PAD dari Jasa Pelayanan Pengujian Mutu Barang UPTD BPSMB			Penerimaan PAD dari Jasa Pelayanan Tera/Tera ulang alat UTTP pada UPTD Metrologi		
		Target (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian
1.	2010	160.000.000	192.685.850	120,58	102.500.000	121.662.685	118,70
2.	2011	170.000.000	172.692.500	101,58	121.500.000	135.418.950	111,46
3.	2012	180.000.000	181.280.000	100,71	133.100.000	210.341.000	158,03
4.	2013	190.000.000	211.236.750	111,18	200.000.000	261.902.800	130,95
5.	2014	220.000.000	222.209.000	101,00	277.000.000	294.180.500	106,20
6.	2015	250.000.000	311.208.500	124,48	363.000.000	308.260.000	84,92
Jumlah		1.170.000.000	1.291.312.600	110,37	1.197.100.000	1.331.755.935	111,25

2.3.3. Perkembangan Kinerja Pelayanan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi

Sektor industri dan perdagangan merupakan pilar utama pembangunan ekonomi Provinsi Jambi yang memberikan kontribusi ekonomi cukup besar melalui nilai tambah, lapangan kerja dan devisa. Kedua sector ini merupakan salah satu kegiatan ekonomi yang mempunyai keterkaitan luas dengan sektor-sektor lainnya, secara makro diharapkan mampu berperan sebagai penggerak utama (*prime mover*) perekonomian nasional dan perekonomian daerah.

Pembangunan Provinsi Jambi tidak bisa dipisahkan dari pertumbuhan ekonomi, keduanya bersinergi dan saling terkait. Pertumbuhan ekonomi Provinsi Jambi pada periode waktu tahun 2010-2015 berfluktuasi pada kisaran antara 7,35 • 8,54 persen dengan rata-rata sebesar 7,23 persen per tahun. Dilihat dari laju pertumbuhan, pertumbuhan ekonomi Jambi jauh berada diatas pertumbuhan ekonomi Nasional. Selama periode yang sama, pertumbuhan ekonomi nasional bahkan hanya tumbuh rata-rata kurang dari 6 persen per tahun.

Bila dirinci berdasarkan tahun, pertumbuhan ekonomi tertinggi terjadi pada tahun 2011 yakni 8,54 persen, sementara laju pertumbuhan terendah pada tahun 2015 sebesar 4.21 persen. Pertumbuhan terendah yang dicapai selama kurun waktu 2010-2015 tersebut disebabkan oleh beberapa hal. Selain dikarenakan oleh faktor eksternal (kondisi ekonomi dunia yang lesu, kondisi ekonomi Indonesia yang juga mengalami penurunan, menurunnya harga minyak dunia) juga disebabkan oleh peristiwa kebakaran hutan dan lahan serta kabut asap yang berlangsung selama lebih kurang empat bulan. Kondisi ini menyebabkan hasil sektor pertanian dan perkebunan mengalami penurunan drastis.

Kondisi sektor industri tersebut diatas lebih rendah dibandingkan pertumbuhan pada periode yang sama di tingkat Nasional, dimana sektor industri pengolahan tumbuh sebesar

4,25% sedangkan sektor perdagangan dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor tumbuh lebih baik dibandingkan tingkat nasional yaitu sebesar 2,47%.

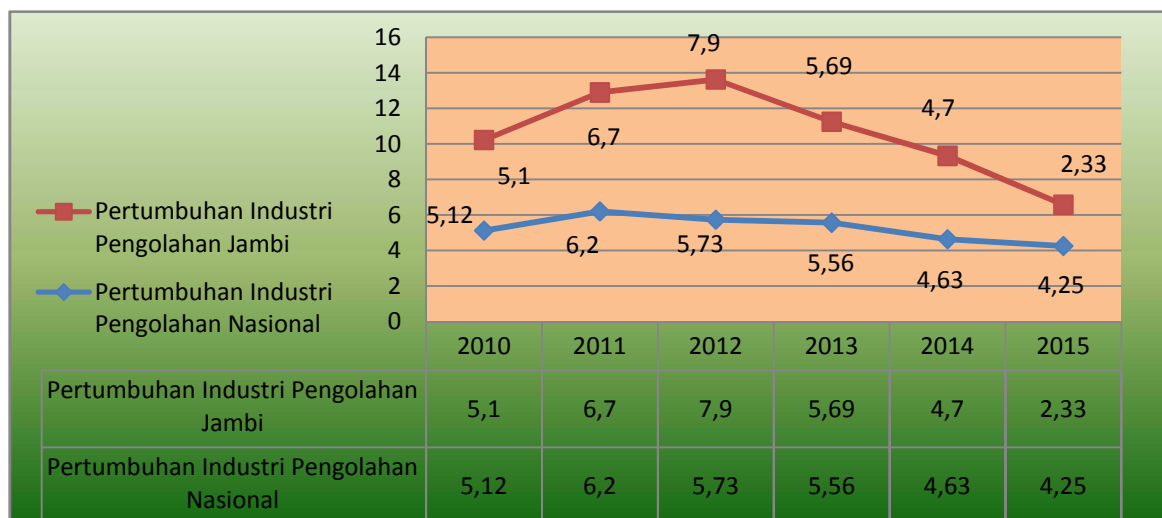
2.3.3.1. Industri

1. Kontribusi dan Pertumbuhan Industri

Sektor industri pengolahan merupakan sektor strategis, karena di samping diharapkan mampu menyerap tenaga kerja sangat besar juga memiliki keterkaitan ke depan (forward linkage) dan keterkaitan kebelakang (backward linkage) yang relative banyak. Hasil penghitungan tahun 2015 total nilai PDRB sektor industri pengolahan atas dasar harga berlaku sebesar Rp 17,134 juta, atau setara dengan 11,05 persen dari total nilai PDRB Jambi. Pertumbuhan sektor ini di tahun 2015 sebesar 2,33 persen, melamban dibanding tahun sebelumnya yang tumbuh sebesar 4,70 persen.

Pertumbuhan sektor industri pengolahan Jambi mengalami fluktuatif selama tahun 2010-2015, dengan tingkat pertumbuhan yang relative menyamai tingkat pertumbuhan sektor industri pengolahan di tingkat Nasional, sebagaimana ditunjukkan pada Grafik 2.7 berikut:

Grafik 2.7
Pertumbuhan Sektor Industri Pengolahan (%) Provinsi Jambi



Sumber : BPS Provinsi Jambi dan Nasional

2. Usaha Industri

Jumlah industri di Jambi dalam lima tahun terakhir mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 2,604 persen. Dalam kurun waktu 2010-2015 tersebut, tercatat jumlah industri pada tahun 2010 sebanyak 24.685 unit perusahaan, tahun 2011 menjadi 25.296 unit perusahaan, tahun 2012 menjadi 26.110 unit perusahaan, tahun 2013 berkembang menjadi 26.833 unit perusahaan, tahun 2014 menjadi 27.369 unit perusahaan dan tahun 2015 meningkat kembali

menjadi 28.075 unit perusahaan. Selengkapnya terkait jumlah industri dan pertumbuhannya tertera seperti dalam tabel 2.4. berikut:

Tabel 2.5.
Perusahaan/Industri di Provinsi Jambi Tahun 2010 € 2015

Uraian	T a h u n					
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Perusahaan/Industri (unit)	24.685	25.296	26.110	26.833	27.369	28.075
Pertumbuhan unit usaha (%)	-	2,45	3,22	2,77	2,00	2,58

Berdasarkan tabel tersebut terlihat bahwa meskipun dari tahun ke tahun jumlah industrinya terus mengalami pertambahan, namun jumlah pertumbuhannya mengalami tren naik turun. Kondisi pertumbuhan industri ini lebih disebabkan dari faktor krisis terutama sebagai akibat dari gejolak perekonomian global yang berpengaruh langsung terhadap penurunan investasi dan pada akhirnya juga memperlambat perkembangan industri baru. Gejolak ekonomi juga ditandai dengan melemahnya nilai tukar rupiah yang berpengaruh pada kinerja industri pengolahan berbahan baku impor. Melambatnya pertumbuhan industri dalam kaitannya dengan gejolak perekonomian global mengindikasikan bahwa Industri di Jambi masih tinggi tingkat ketergantungannya dengan input produksi dari bahan baku impor. Di sisi lain terindikasi pula masih rendahnya daya saing, kualitas dan design produk, hambatan peningkatan efisiensi produksi serta efisiensi biaya transaksi yang juga relatif masih rendah.

3. Tenaga Kerja Industri

Perluasan kesempatan tenaga kerja merupakan usaha untuk mengembangkan sektor-sektor yang mampu menyerap tenaga kerja. Usaha penyerapan tenaga kerja tidak lepas dari faktor yang mempengaruhinya seperti pengembangan jumlah penduduk, pertumbuhan ekonomi, tingkat produktifitas tenaga kerja dan kebijakan pemerintah dalam hal penyerapan tenaga kerja itu sendiri.



Perkembangan jumlah tenaga kerja dari Tahun 2010 sampai dengan Tahun 2015 mengalami fluktuatif untuk semua skala industri baik kecil, menengah dan Besar. Adapun capaian jumlah tenaga kerja industri kecil, menengah dan besar selama 5 tahun terakhir adalah sebagai berikut :

Tabel 2.6.
Perkembangan Tenaga Kerja Industri Kecil Menengah dan Besar
di Provinsi Jambi 2010-2015

No.	Tahun	Perkembangan TK. Industri (orang)	% Pertumbuhan
1.	2010	74.684	-
2.	2011	83.766	12,16
3.	2012	95.977	14,58
4.	2013	101.923	6,20
5.	2014	105.999	4,00
6.	2015	111.390	5,09

Berkaitan dengan deklarasi blueprint Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) 2015 yang ditandatangani oleh 10 kepala negara di Singapura pada November 2007 menjadi bukti komitmen yang kuat dari Negara-negara anggota ASEAN untuk memulai langkah integrasi dari segi ekonomi.

Bagi Indonesia keberadaan MEA menjadi babak awal untuk mengembangkan berbagai kualitas perekonomian di kawasan Asia Tenggara dalam perkembangan pasar bebas. MEA menjadi dua sisi mata uang bagi Indonesia. Satu sisi menjadi kesempatan yang baik untuk menunjukkan kualitas dan kuantitas produk dan SDM Indonesia kepada Negara lain dengan terbuka tetapi pada sisi yang lain dapat menjadi titik balik untuk Indonesia apabila tidak dapat memanfaatkannya dengan baik

Persiapan Indonesia khususnya Provinsi Jambi dengan diberlakukannya MEA 2015 menjadi agenda utama yang harus dilaksanakan guna mendukung pelaku usaha dan konsumen lokal agar dapat memanfaatkan secara optimal trend global dalam pembentukan regionalisme masyarakat ekonomi. Dari segi industri kesiapan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi dengan diberlakukannya MEA yaitu melalui **Penguatan Industri Kecil, Menengah dan Besar** dengan rincian sebagai berikut :

1. Meningkatkan **daya saing industri** dengan memperkuat struktur industri (hilirisasi), SNI Wajib bagi produk-produk tertentu.
2. Meningkatkan sentral atau klaster untuk **mengembangkan produk unggulan daerah** lewat pendekatan on village one product (OVOP).
3. Meningkatkan **kemampuan SDM** sesuai kebutuhan industri (pendidikan vokasi industri berbasis kompetensi, pelatihan-pelatihan dan pemagangan industri serta penyusunan kompetensi wajib).
4. Meningkatkan **kualitas dan standarisasi produk IKM** lewat kerjasama Kementerian Hukum dan HAM serta Badan Standarisasi Nasional.
5. Membantu menciptakan inovasi dan **produk yang kreatif**.

6. Membangun **kemitraan** antara pengusaha daerah dengan pelaku IKM yang pada akhirnya bisa secara bersama-sama memecahkan permasalahan baik itu pemberdayaan maupun pemasaran.

Peranan tenaga kerja dalam memproduksi sampai mendistribusikan produk dan jasa akan menjadi penting. Dalam era persaingan global Indonesia harus memperhatikan tenaga kerja dan produksi yang tidak hanya sekedar soal kualitatif tetapi juga sisi kuantitatif. Daya saing Indonesia yang masih terhitung rendah dapat menjadi sandungan dalam perannya di MEA.

Upaya yang perlu dilakukan untuk meningkatkan produktifitas dan kualitas tenaga kerja (SDM) antara lain :

1. Menyiapkan tenaga ahli dan trampil dengan menyiapkan pendidikan formal bagi masyarakat.
2. Menyiapkan tenaga kerja yang mampu bekerja keras dan produktif dengan meningkatkan kesehatan melalui perbaikan gizi penduduk, memberikan jaminan sosial yang memadai
3. Mengadakan latihan-latihan atau job training bagi tenaga kerja agar memiliki kemampuan kerja yang baik.
4. Mengirimkan tenaga kerja Indonesia ke luar negeri untuk memperluas ilmu pengetahuan dan ketrampilan serta menimba pengalaman kerja.

Dukungan program dan kegiatan untuk pencapaian sasaran ini antara lain kegiatan peningkatan kualitas SDM IKM dan peningkatan mutu produk serta kemasan dalam rangka menghadapi MEA. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi sepanjang 5 tahun terakhir ini telah melakukan pelatihan, bimbingan teknis, sosialisasi dan pembinaan dalam rangka peningkatan kualitas tenaga kerja dan penumbuhan tenaga kerja yaitu sebanyak 2.803 orang IKM dengan rincian sebagai berikut :

a. Bidang Industri Kecil dan Kerajinan

Telah melakukan pembinaan dan pelatihan kepada 2.595 orang IKM guna pengembangan sentra IKM melalui OVOP dan penumbuhan serta penembangan IKM melalui kewirausahaan yang didukung dengan beberapa kegiatan.

b. Bidang Industri Menengah Besar

Telah melakukan pembinaan dan pelatihan kepada 208 orang pelaku Industri Menengah yang didukung melalui beberapa kegiatan antara lain : Pelatihan Pembuatan Sparepart Kendaraan Bermotor Roda Dua dari Karet Kompon, Pelatihan Pembuatan Barang Jadi dari Latek/magang berupa aneka suku cadang karet otomotif dll.

2.3.3.2. Perdagangan

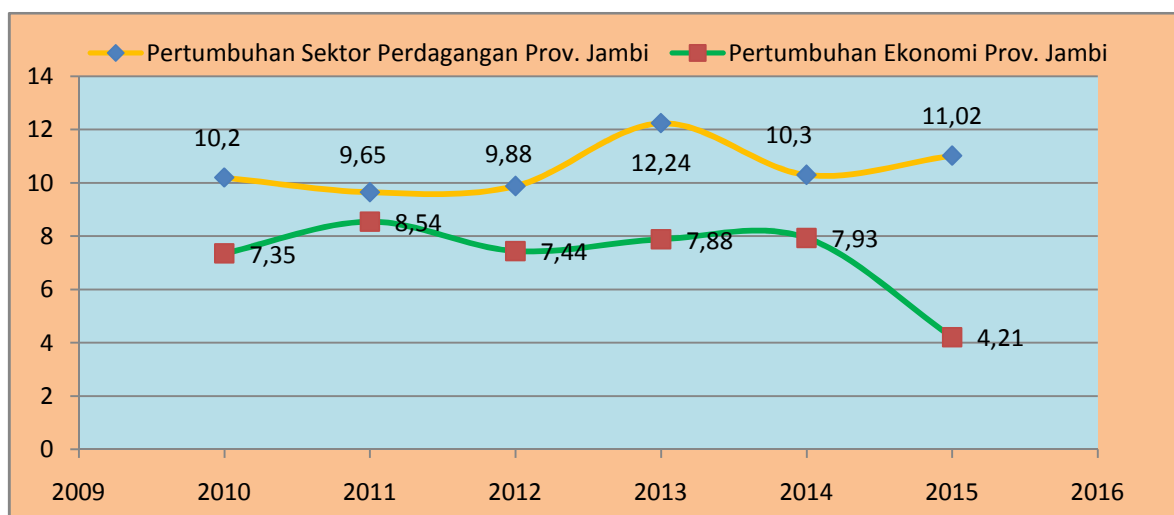
1. Kontribusi dan Pertumbuhan Perdagangan

Peran Sektor perdagangan semakin penting dalam perekonomian masyarakat baik secara kuantitas maupun kualitas. Secara kuantitas, pentingnya peran sektor perdagangan terlihat dari peningkatan kontribusi sektor PDRB Sektor perdagangan. Secara kualitas, semakin pentingnya sektor perdagangan terlihat dari kegiatan-kegiatan yang lebih mengedepankan kualitas jasa perdagangan untuk mendukung sektor industri, pertanian, kehutanan, perikanan, turisme, pertambangan, dan lain-lain. Dukungan kegiatan tersebut memberikan pengaruh yang positif terhadap meningkatnya kontribusi sektor perdagangan. infrastruktur terkait ekspor• impor.

Nilai PDRB Provinsi Jambi Tahun 2015 di sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor atas dasar harga berlaku sebesar Rp 17,249 juta, atau setara dengan 11,12 persen dari total nilai PDRB Provinsi Jambi. Pertumbuhan sektor ini di tahun 2015 sebesar 11,02 persen, meningkat dibanding tahun sebelumnya yang tumbuh sebesar 10,30 persen.

Untuk pertumbuhan sektor perdagangan Jambi pada periode 2010-2015 menunjukkan tren yang naik turun dengan pertumbuhan yang lebih tinggi dibandingkan dengan tingkat pertumbuhan Nasional, sebagaimana ditunjukkan pada Grafik 2.8. berikut:

Grafik 2.8.
Pertumbuhan Sektor Perdagangan (%) Provinsi Jambi



2. Usaha Perdagangan

Usaha perdagangan merupakan suatu kegiatan yang dilakukan oleh suatu perusahaan dalam melakukan transaksi pembelian barang dagang kemudian dijual kembali tanpa

mengubah bentuk. Perkembangan jumlah usaha perdagangan dari Tahun 2010 sampai dengan Tahun 2015 menunjukkan perkembangan yang sangat signifikan. Adapun capaian jumlah usaha perdagangan selama 5 tahun terakhir adalah sebagai berikut :



Tabel 2.7.
Perkembangan Usaha Perdagangan di Provinsi Jambi 2010-2015

No.	Tahun	Realisasi	% pertumbuhan
1.	2010	45.515	-
2.	2011	51.474	13,09
3.	2012	53.873	4,45
4.	2013	67.012	24,39
5.	2014	80.012	19,40
6.	2015	85.357	6,60

3. Transaksi pasar Lelang Agro

Kegiatan Pasar Lelang Komoditi Agro (PLKA) merupakan sarana bertemunya penjual dan pembeli dengan menggunakan sistem lelang dengan penyerahan kemudian. Pelaksanaan lelang ini dimaksudkan untuk menciptakan sistem perdagangan yang lebih baik melalui transparansi mekanisme pembentukan harga dan peningkatan efisiensi pemasaran (tata niaga) dalam bentuk pasar yang terorganisir yang mempertemukan antara penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi menggunakan sistem lelang sedangkan tujuan dari PLKA adalah untuk mendapatkan harga yang wajar, adil dan transparan. Dengan adanya PLKA diharapkan dapat memperpendek mata rantai perdagangan sehingga terciptanya efisiensi perdagangan, mendukung perekonomian daerah dan perekonomian nasional sebagai sarana pembentukan harga.



Komoditi yang dilelang berbagai jenis, selain hasil perkebunan, pertanian dan perikanan, pasar lelang juga menyediakan produk-produk olahan. Komoditi Jambi yang paling diminati

yakni kayu manis asal Kab. Kerinci dan pinang dari Kab. Tanjung Jabung Timur dan Tanjung Jabung Barat. Pinang dan Kayu Manis tidak hanya diminati pembeli dari daerah asal, tapi juga diminati pembeli dari luar provinsi. Persaingan pasar agro semakin diperhitungkan oleh pelaku usaha dan hal itu ditandai dengan munculnya produk-produk baru yang ikut dipasarkan melalui kegiatan lelang ini. Produk baru tersebut salah satunya adalah Sit Angin atau penggilingan karet latek. Selain itu banyak juga produk olahan baru yang dibuat pelaku-pelaku usaha di Jambi.



Perkembangan jumlah aktifitas perdagangan melalui kegiatan lelang agro dari Tahun 2010 sampai dengan Tahun 2015 menunjukkan perkembangan yang sangat signifikan. Adapun capaian jumlah aktifitas perdagangan melalui kegiatan lelang agro selama 5 tahun terakhir adalah sebagai berikut :

Tabel 2.8. Perkembangan Aktifitas Perdagangan Melalui Kegiatan Pasar Lelang Agro di Provinsi Jambi 2010-2015

No.	Tahun	Realisasi (Rp. Juta)	% Pertumbuhan
1.	2010	14.399	-
2.	2011	23.817	65,41
3.	2012	15.963	- 32,98
4.	2013	21.448	34,36
5.	2014	24.626	14,82
6.	2015	10.520	- 57,28

Bila diperhatikan pada tabel tersebut diatas, terlihat bahwa realisasi kinerja aktifitas perdagangan melalui kegiatan lelang agro pada tahun 2015 mengalami penurunan yang sangat signifikan yaitu sebesar Rp. 10.520.079.000,- bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2014 sebesar Rp. 24.626.311.000,- Hal ini disebabkan antara lain :

1. Pelaksanaan lelang hanya dilakukan sebanyak 5 edisi saja sedangkan pada tahun 2014 dilakukan sebanyak 6 edisi.
2. Keanggotaan pasar lelang yang masih sedikit
3. Penjamin terhadap transaksi perdagangan masih rendah
4. Belum ada kesesuaian antara harga dan kualitas serta jenis komoditi yang dilelang dengan kebutuhan dari pihak pembeli.

5. Pelaksanaan pasa lelang dirasakan sangat tergantung dengan kehadiran pembeli dari luar daerah

4. Pengujian Mutu Komoditi Ekspor



Dalam rangka menjamin kesesuaian mutu produk ekspor sesuai dengan permintaan negara tujuan ekspor. Sebagai UPTD Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi, UPTD BPSMB mempunyai 2 laboratorium yaitu Laboratorium Penguji dan Laboratorium Kalibrasi. Sebagai Laboratorium Penguji telah diakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN) sejak tahun 1998 dengan No.LP-032-IDN dan diperpanjang

setiap 4 (empat) tahun dengan ruang lingkup Standar Indonesian Rubber (SIR), Cassia Indonesia, Biji kopi, Pupuk, Crude Palm Oil (CPO), Garam Konsumsi Beryodium dan Biji Pinang. Sedangkan Laboratorium Kalibrasi diakreditasi oleh KAN pada tahun 2010 ini dengan No. LK-117-IDN dengan ruang lingkup besaran suhu, massa, tekanan, panjang dan instrument analitik, gaya, volumetrik dll.

Perkembangan kinerja pelayanan pengujian mutu komoditi ekspor Tahun 2010 sampai dengan Tahun 2015 menunjukkan perkembangan yang sangat signifikan Adapun capaian kinerja pelayanan pengujian mutu komoditi ekspor selama 5 tahun terakhir adalah sebagai berikut :

Tabel 2.10.
Perkembangan Pelaksanaan Pengujian Mutu Komoditi Ekspor 2010-2015

No.	Tahun	Realisasi (sampel)	% Pertumbuhan
1.	2010	6.865	-
2.	2011	3.465	- 0,49
3.	2012	6.971	101,18
4.	2013	7.034	0,90
5.	2014	8.209	16,70
6.	2015	9.250	12,68

5. Ekspor Provinsi Jambi

Secara garis besar, barang-barang yang diekspor Provinsi Jambi terdiri atas dua macam, yaitu minyak bumi dan gas alam (migas) dan nonmigas. Barang-barang yang termasuk migas antara lain minyak tanah, bensin, solar, dan elpiji. Adapun barang-barang yang termasuk nonmigas sebagai berikut.

1. Hasil pertanian dan perkebunan. contohnya, karet, kopi, dan kopra.
2. Hasil laut terutama ikan dan kerang.
3. Hasil industri. Contohnya kayu lapis, konfeksi, minyak kelapa sawit, meubel, bahan-bahan kimia, pupuk, dan kertas.
4. Hasil tambang nonmigas. Contohnya bijih nikel, bijih tembaga, dan batubara.;

Khusus nilai ekspor Non Migas Provinsi Jambi periode lima tahun terakhir (2010-2015) mengalami fluktuatif. Pada tahun 2010 nilai ekspor non migas sebesar 1.209 juta US\$ dan meningkat menjadi 1.751 juta US\$ pada tahun 2011 dan terus mengalami penurunan hingga tahun 2014 sebesar 889 juta US\$. Namun pada tahun 2015 ekspor non migas Jambi menunjukkan peningkatan yaitu sebesar 1.018 juta US\$. Komoditi ekspor non migas di Jambi masih didominasi oleh produk pertanian berupa ikan, udang, kopi, teh, rempah dan lainnya serta produk industri berupa minyak nabati, karet dan olahannya, kayu lapis, arang, pulp dan kertas serta batubara. Negara tujuan utama Jambi yaitu, Singapura, Malaysia, Jerman, Perancis, Inggris, Cina, Australia, Taiwan Thailand, Jepang, Amerika Serikat, India dan Korea Selatan.

Adapun perkembangan nilai ekspor non migas Provinsi Jambi tahun 2010-2015 sebagaimana tabel dibawah ini :

Tabel 2.11.
Perkembangan Nilai Ekspor Provinsi Jambi Tahun 2010 € 2015

No.	Tahun	Nilai Ekspor (Juta US \$)	% Pertumbuhan
1	2010	1.209	-
2	2011	1.751	44,83
3	2012	1.114	(36,38)
4	2013	950	(14,72)
5	2014	889	(6,42)
6	2015	1.018	14,51

6. Impor Non Migas

Untuk impor non migas Jambi mengalami fluktuatif dari tahun 2010 hingga tahun 2015. Tahun 2010 sebesar 252 juta US\$ menurun 28,97 persen dibanding tahun 2011 dan 32,96 persen pada tahun 2012, namun pada tahun 2013 mengalami peningkatan yang sangat signifikan sebesar 129,17 persen dan terus menurun nilai impornya hingga tahun 2015 sebesar 109 US\$. Komoditas utama terhadap total impor antara lain bahan makanan olahan makanan dan minuman, bahan kimia, karet dan sejenisnya, mesin dan alat angkutan dan hasil industri lainnya. Negara impor non migas Jambi yaitu Singapura, Malaysia, Jerman, Perancis, Inggris, Cina, Australia, Taiwan Thailand, Jepang, Amerika Serikat, India dan Korea Selatan.

Tabel 2.12. Perkembangan Nilai Impor Provinsi Jambi Tahun 2010-2015

No.	Tahun	Nilai Impor Non Migas (Juta US \$)	% Pertumbuhan
1	2010	252	-
2	2011	179	(28,97)
3	2012	120	(32,96)
4	2013	275	129,17
5	2014	196	(28,73)
6	2015	109	(44,38)

7. Angka Pengenal Impor (API)

Perusahaan yang akan melakukan kegiatan impor harus memiliki API atau Angka Pengenal Impor dan penerbitan API ini harus sejalin Dirjen bea cukai. API jenis umum yang diterbitkan antara tahun 2011 sampai dengan 2015 yaitu sebanyak 78 penerbitan API, sedangkan API jenis Produsen sebanyak 39 penerbitan API. Jumlah penerbitan API setiap tahunnya antara tahun 2011 sampai dengan tahun 2015 mengalami siklus naik turun sebagaimana tabel dibawah ini :

Tabel 2.13.
Perkembangan Penerbitan API Tahun 2011 € 2015

No.	API Berdasarkan Jenis	Tahun				
		2011	2012	2013	2014	2015
1.	Umum	18	10	25	19	6
2.	Produsen	2	7	24	8	8
Jumlah API		20	17	49	27	14

8 Surat Keterangan Asal (SKA)

SKA mempunyai peranan dan fungsi penting dalam kegiatan ekspor baik untuk meningkatkan daya saing harga melalui pengurangan atau pembebasan bea masuk maupun sebagai syarat diterimanya produk sesuai kesepakatan perdagangan antar Negara. Jumlah penerbitan SKA dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2015 mencapai 7.482 set dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 2.14.
Perkembangan Penerbitan SKA Tahun 2011 € 2015

No.	Tahun	Penerbitan SKA	% Perkembangan
1	2011	1.376 set	-
2	2012	1.190 set	(0,86)
3	2013	1.448 set	1,22
4	2014	1.775 set	1,23
5	2015	1.693 set	(0,95)
Jumlah		7.482 set	

9. Perkembangan Calon Eksportir Baru

Untuk meningkatkan variasi dalam rangka diversifikasi produk, maka upaya yang dilakukan adalah dengan menumbuhkan wirausaha baru dari kalangan UKM yang potensial untuk dapat dikembangkan menjadi UKM ekspor melalui kegiatan Bimbingan Teknis, Pelatihan Ekspor Impor serta melalui peningkatan kerjasama dengan Asosiasi dan Instansi terkait untuk mendorong eksportir baru. Jumlah eksportir di Provinsi Jambi dari tahun 2012 hingga tahun 2015 sebanyak 57 eksportir dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 2.15.
Perkembangan Eksportir Baru di Provinsi Jambi Tahun 2012 € 2015

No.	Tahun	Jumlah Ekspotir	% Perkembangan
1	2012	20 eksportir	-
2	2013	11 eksportir	(0,55)
3	2014	9 eksportir	(0,82)
4	2015	17 eksportir	1,89
Jumlah		57 Eksportir	

Adapun Pencapaian Kinerja Pelayanan serta Anggaran dan Realisasi Pendanaan Dinas perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi pada Tahun 2016-2021 dapat dilihat pada tabel 2.16 dan 2.17

Tabel 2.16. Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi 2011 € 2015

No.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Target SPM	Target IKK	Target Indikator lainnya	Target Renstra SKPD Tahun ke -					Realisasi Capaian Tahun ke -					Rasio Capaian Tahun ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1.	Jumlah Usaha Industri Kecil, Menengah dan Besar (Unit)	-	-	-	25.200	26.160	26.468	26.840	25.200	25.296	26.110	26.833	27.369	28.075	100,38	99,81	101,38	101,97	102,91
2.	Jumlah Tenaga Kerja Industri Kecil, Menengah dan Besar (orang)	-	-	-	83.708	87.949	92.846	97.488	102.362	83.766	95.977	101.923	105.999	111.390	100,07	109,31	109,78	108,73	108,82
3.	Jumlah Nilai Investasi Industri Kecil, Menengah dan Besar (Rp. Triliun)	-	-	-	7,19	7,50	14,86	15,25	15,71	7,38	14,43	15,21	15,97	16,16	102,64	192,40	102,36	104,72	102,86
4.	Jumlah Nilai Produksi Industri Kecil, Menengah dan Besar (Rp. Triliun)	-	-	-	3,020	3,480	3,654	3,840	4,033	3,310	3,680	3,871	3,917	4,225	109,62	105,75	105,94	102,01	104,76
5.	Jumlah Usaha Perdagangan (Unit)	-	-	-	30.550	35.098	38.607	60.000	70.000	51.474	53.873	57.012	80.012	85.357	168,49	153,49	147,67	133,35	121,94
6.	Aktifitas Perdagangan Melalui Kegiatan Pasar Lelang Agro (Rp. Juta)	-	-	-	14.000	14.450	14.995	15.494	25.000	23.817	15.963	21.448	24.626	10.520	170,12	110,47	143,03	158,94	42,08
7.	Aktifitas Perdagangan Melalui Kegiatan Pasar Lelang Karet (Rp. Juta)	-	-	-	89.678	99.803	109.783	120.760	350.000	96.657	378.172	321.761	347.501	387.650	107,78	378,92	293,09	287,76	110,76
8.	Nilai Ekspor (US \$ juta)	-	-	-	1.200	1.400	1.600	1.800	2.000	2.383,56	1.845,24	1.437,14	1.282,43	2.635,8	198,63	131,80	89,82	71,25	131,79
9.	Nilai Neraca Perdagangan (Rp. Milyar)	-	-	-	810	965	1.144	1.349	1.595	2.204,25	1.725,10	1.162,08	1.085,58	2.526,8	272,13	178,76	101,57	80,47	158,42

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
10.	Jumlah Jasa pelayanan pengujian mutu sampel produk (sampel)	-	-	-	3.450	3.750	4.050	4.350	8.000	3.465	6.971	7.034	8.209	9.250	100,43	185,89	173,68	188,71	115,63
11.	Penerimaan PAD Retribusi Pengujian Mutu Sampel Produk (Rp. 000)	-	-	-	170.000	180.000	190.000	220.000	250.000	172.693	181.280	211.237	222.209	311.209	101,58	100,71	111.18	101,00	124,48
12.	Jumlah Jasa Pelayanan Tera Alat UTTP (unit)	-	-	-	10.000	10.000	12.500	12.500	15.000	15.229	15.225	15.175	15.712	14.843	152,29	152,25	121,40	125,70	98,95
13.	Penerimaan PAD Retribusi Jasa Kemetrolagian Legal (Rp.000)	-	-	-	121.500	133.100	200.000	277.000	363.000	135.419	210.341	261.903	294.180	294.180	111,46	158,03	130,95	106,20	84,92

**Tabel 2.17. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan
Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi 2011 € 2015**

Uraian	Anggaran pada Tahun ke -					Realisasi Anggaran Pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Pendanaan untuk Pelayanan Sasaran Strategis 1 (Rp.000) Tumbuh dan Berkembangnya Usaha Industri Kecil, Menengah dan Besar	1.444.048	2.956.498	4.699.015	3.898.952	2.893.316	1.339.867	2.702.588	3.575.790	3.727.764	2.791.701	92,79	91,41	76,10	95,61	96,49	1,04	1.02
Pendanaan untuk Pelayanan Sasaran Strategis 2 (Rp.000) Tumbuh dan Berkembangnya Usaha Perdagangan Dalam Negeri	997.837	907.204	1.938.035	1.573.866	1.995.233	849.206	872.409	1.798.826	1.506.279	1.823.725	85,10	96,62	92,82	95,71	91,40	1,03	1.16
Pendanaan untuk Pelayanan Sasaran Strategis 3 (Rp.000) Pertumbuhan Ekspor Non Migas dalam Perkuatan Perdagangan Daerah	420.100	570.830	495.100	530.047	344.270	385,577	553.762	444.508	227.563	312.006	91,78	97,01	89,78	42,93	90,63	0.78	0.82
Pendanaan untuk Pelayanan Sasaran Strategis 4 (Rp.000) Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari jasa pelayanan UPTD Metrologi dan UPTD BPSMB	249.330	667.278	994.899	1.634.524	1.220.626	222.460	608.560	981.849	1.551.157	1.065.622	89,22	91,20	98,69	94,90	87,37	1.35	1.30

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Perindag Provinsi Jambi

Berdasarkan kinerja pelayanan yang disampaikan pada sub bab sebelumnya, dapat diidentifikasi tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi berdasarkan tugas pokok dan fungsi utamanya berkaitan dengan perumusan kebijakan teknis, pelayanan umum dan pembinaan serta pengembangan dibidang perindustrian dan perdagangan di Provinsi Jambi.

Adapun faktor kunci keberhasilan selain dari suatu unsur organisasi, keberhasilan dan kegagalan strategi, tetapi juga hasil pengembangan informasi yang diperoleh dari unsur perencanaan strategis sebelumnya. Berikut ini adalah tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi selama lima tahun kedepan adalah :

2.4.1. Tantangan

Tantangan merupakan segala aspek yang dapat menghambat kinerja pelayanan dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi. Tantangan pengembangan pelayanan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi adalah sebagai berikut :

- a. Pengaruh globalisasi;
- b. Terbukanya akses pasar produk berbagai negara dengan adanya perdagangan bebas;
- c. Semakin pesatnya perkembangan pusat-pusat perdagangan di Kota yang berbatasan dengan Provinsi Jambi ;
- d. Meningkatnya produk yang masuk ke Provinsi Jambi dengan kualitas teknologi yang lebih baik dibandingkan produk lokal ;
- e. Tersedianya banyak produk yang berkualitas dengan harga yang kompetitif ; dan
- f. Tingginya tingkat persaingan usaha.

2.4.2. Peluang

Peluang merupakan segala sesuatu yang dapat dimanfaatkan dari potensi/kemampuan. Peluang yang dimiliki oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi adalah sebagai berikut :

- a. Respon positif masyarakat terhadap kebijakan pemerintah;
- b. Meningkatnya akses pasar ekspor dengan tingkat tarif yang lebih rendah bagi produk-produk Provinsi Jambi ;
- c. Tersedianya potensi usaha;
- d. Semakin meningkatnya masyarakat untuk melakukan transaksi perdagangan;
- e. Pangsa pasar yang semakin terbuka;
- f. Terbukanya lapangan kerja.

BAB III ISU STRATEGIS



**DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROVINSI JAMBI**

BAB III

ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

Sejalan dengan konteks pembangunan di suatu daerah, maka daerah sebagai bagian dari subsistem yang terintegrasi secara nasional juga memiliki kontribusi terhadap pola pembangunan nasional. Menghadapi dinamika lingkungan strategis baik regional, nasional, maupun global serta memperhatikan perencanaan sebagai alat manajerial untuk memelihara keberlanjutan dan perbaikan kinerja lembaga, maka Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi dalam mengemban tugas dan perannya harus memperhatikan isu-isu strategis yang berkembang saat ini dan lima tahun ke depan.

Hal tersebut sejalan dengan amanat RPJMD Provinsi Jambi, sehingga menuntut terjadinya perubahan peran Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi dalam orientasi dan pendekatan yang digunakan dalam perencanaan dan koordinasi pembangunan sebagai upaya mendukung tercapainya visi dan misi pemerintah daerah Provinsi Jambi tahun 2016-2021.

Berdasarkan pendekatan seperti diamanatkan dalam Undang-Undang No.25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional serta peluang dan ancaman yang terkait dengan dinamika lingkungan strategis juga memperhatikan kekuatan dan kelemahan lembaga/institusi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi, maka permasalahan dan isu-isu strategis penyelenggaraan tugas fungsi menjadi rujukan penting dalam menentukan program dan kegiatan yang diprioritaskan selama lima tahun ke depan (2016-2021).

Bab 3 Berisi :

- 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan*
- 3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program KDH dan Wakil KDH*
- 3.3. Telaahan Renstra Kementerian*
- 3.4. Telaahan RTRW dan KLHS*
- 3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis*

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan

Secara normatif Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang Perindustrian dan Perdagangan. Dalam melaksanakan tugas dan fungsi tersebut terdapat beberapa permasalahan, antara lain:

Bidang Perdagangan

1. Belum terbangunnya sistem distribusi barang kebutuhan pokok dan strategis yang efektif dan efisien

Distribusi barang kebutuhan pokok yang efektif dan efisien merupakan Kebijakan umum pembangunan sektor perdagangan yang ditetapkan dalam rangka pencapaian kinerja. Belum Optimalnya sistem distribusi barang kebutuhan pokok dan strategis yang efektif dan efisien disebabkan karena belum memadainya sarana dan prasarana logistik, seperti sarana transportasi (jalan, akses dan alat angkut), sarana pergudangan dan ketrampilan SDM. Permasalahan ini harus segera mendapatkan solusi, karena sistem distribusi bahan pokok yang tidak strategis menyebabkan kelangkaan dan harga barang pokok yang menjadi beragam.

2. Rendahnya kualitas sarana dan prasarana dagang pasar tradisional

Pasar berfungsi sebagai tempat yang penting dalam penyaluran barang. Sesuai dengan perkembangan pembangunan, saat ini banyak hadir pusat perbelanjaan modern, agar konsumen bisa berbelanja lebih efisien. Jumlah pasar tradisional yang terdapat di Provinsi Jambi sejumlah 512 pada tahun 2014. Pembangunan pasar-pasar tradisional dilakukan sebagai upaya mengikis pasar-pasar modern yang mulai membanjiri masyarakat. Saat ini pasar tradisional dapat bersaing dengan pasar modern karena selain lengkap, harga barang di pasar tradisional juga lebih terjangkau dibandingkan pasar modern. Untuk itu, demi menarik minat beli masyarakat, Dinas Perindag Provinsi Jambi perlu meningkatkan kualitas sarana dan prasarana dagang di pasar tradisional. Banyak pasar yang masih membutuhkan sarana prasarana yang memadai untuk kenyamanan konsumen dan pedagang agar masyarakat mau membeli di pasar tradisional.

3. Masih rendahnya pemahaman konsumen terhadap hak dan kewajibannya.

Konsumen pengguna barang dan jasa harus mendapat perlindungan. Perlindungan terhadap konsumen belum optimal karena kurangnya pengawasan barang beredar, jasa dan kemetrolgian. Selain itu, penyebab lainnya, masih rendahnya pemahaman pelaku usaha dan konsumen terhadap UU PK, masih rendahnya kesadaran pedagang untuk

mentera-ulangkan UTP, banyaknya kasus-kasus yang merugikan konsumen, membanjirnya produk impor yang tidak sesuai dengan ketentuan, terbatasnya jumlah petugas di bidang pengawasan, jumlah LPKSM dan BPSK masih terbatas, serta tempat pengaduan konsumen masih terbatas.

4. Semakin banyaknya produk luar negeri yang beredar di pasaran.

Ketergantungan konsumen Indonesia terhadap produk impor masih tinggi dibandingkan nilai ekspor, padahal yang diharapkan adalah sebaliknya. Penyebab utama kondisi ini adalah daya saing produk-produk manufaktur yang terus melemah. Di dalam negeri, produk manufaktur seperti elektronika rumah tangga kalah bersaing dengan produk impor, apalagi diperburuk dengan banyaknya produk impor ilegal. Di pasar internasional, produk tekstil (TPT) dan produk kayu kalah bersaing dengan produk dari China dan negara ASEAN lainnya. Tujuan dari peningkatan nilai ekspor adalah mengurangi ketergantungan konsumen dengan produk luar negeri sehingga produk dalam negeri dapat bersaing dengan produk luar negeri yang nantinya juga akan berdampak terhadap penerimaan devisa negara.

Penggunaan barang impor dapat disiasati dengan memproduksi di dalam negeri barang-barang kebutuhan yang masih di impor. Indonesia memiliki banyak potensi sumber daya alam yang dijual dalam bentuk bahan mentah. Bahan mentah ini banyak di ekspor ke luar negeri dan di impor kembali dalam bentuk barang setengah jadi maupun bahan jadi. Untuk mengubah bahan mentah yang berpotensi menjadi bahan setengah jadi atau barang jadi yang bernilai guna tentu bukan hal yang mudah. Diperlukan modal yang cukup untuk mengolah bahan mentah menjadi bahan primer. Modal yang dimaksudkan berasal dari investasi. Investasi memiliki korelasi positif terhadap ekspor dan impor. Investasi akan mengakibatkan terjadinya impor barang modal dan bahan baku penolong, dimana produk-produk ini sebagian besar digunakan untuk memproduksi produk untuk keperluan di dalam negeri dan untuk keperluan ekspor. Selain itu, masih banyak kendala dalam memproduksi barang-barang tersebut. Faktor-faktor yang menghambat antara lain:

- a. Rendahnya kualitas produk industri
- b. Peralatan produksi industri kurang memadai.
- c. Kurangnya pasokan bahan baku untuk industri

5. Masih rendahnya pengawasan barang dan jasa yang beredar.

Jumlah penduduk yang sangat besar menjadikan pasar yang potensial bagi produsen. Permintaan pasar domestik yang tinggi seharusnya dapat dipenuhi oleh industri dalam negeri karena dengan memproduksi barang dalam jumlah yang besar maka industri dalam negeri akan dapat meningkatkan efisiensinya. Dengan meningkatnya efisiensi

produksi, maka industri dalam negeri akan memiliki daya saing yang lebih tinggi untuk dapat bersaing dalam memenuhi kebutuhan pasar dunia.

Untuk dapat bersaing dengan produk dalam negeri maka akan ada pelaku usaha luar negeri yang mengurangi biaya produksi dengan cara mengurangi kualitas produknya sehingga harga jual produknya akan dapat menyaingi harga jual produk dalam negeri, dan hal ini akan dapat merugikan konsumen yang menggunakan produk yang berkualitas rendah tersebut terutama bila kualitas produk tersebut berhubungan dengan keselamatan pengguna.

Dengan adanya kemungkinan pengurangan kualitas (mutu) oleh produsen dalam negeri maupun luar negeri, maka sangatlah penting untuk memiliki standar mutu yang mencakup kualitas minimal yang harus dipenuhi oleh semua produsen. Untuk itu, perlu dilakukan kegiatan pengawasan ini bertujuan untuk mencegah dan melindungi masyarakat dari penyebaran produk pangan yang tidak memenuhi syarat mutu dan keamanan. Pengawasan barang dan jasa di pasar dilakukan dengan cara turun langsung di lapangan untuk melihat dan menguji jajanan yang ada di pasar apakah aman dikonsumsi. Apabila ditemukan makanan dengan kandungan bahan makanan berbahaya, maka Dinas Pasar akan memberikan peringatan dan pembinaan lanjutan dengan tujuan memberikan informasi bahwa jenis makanan seperti ini jangan dijual lagi karena berbahaya bagi kesehatan.

Saat ini, pelaksanaan pengawasan barang beredar yang terkait dengan mutu telah didukung oleh beberapa laboratorium di pusat dan daerah melalui pengujian contoh barang yang telah diambil di pasar.

6. Masih kurangnya rasa cinta akan produk dalam negeri.

Penggunaan produk dalam negeri merupakan salah satu upaya dalam rangka pengembangan, pemberdayaan, dan penguatan perdagangan dalam negeri. Strategi ini juga merupakan upaya konkrit untuk meningkatkan kemandirian industri maupun perdagangan Jambi. Baik secara sendiri maupun bersama dengan para pemangku kepentingan, upaya untuk meningkatkan penggunaan produk dalam negeri dilakukan dengan keberpihakan melalui promosi, sosialisasi, atau pemasaran serta memaksimalkan potensi pasar domestik melalui pemanfaatan daya kreasi atau kompetensi unik dari masing-masing wilayah di Jambi.

Penggunaan produk dalam negeri akan mengurangi ketergantungan terhadap produk luar negeri serta menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap hasil produksi dalam negeri.

Bidang Industri

1. Belum optimalnya jejaring kemitraan usaha antara IKM dengan industri besar

Jejaring kemitraan usaha antara IKM dengan industri besar termasuk dalam Program Penataan Struktur Industri. Sektor IKM (Industri Kecil dan Menengah) diharapkan menjadi mitra bisnis bagi perusahaan besar. Namun kendala IKM untuk menjadi mitra bisnis bagi perusahaan besar adalah kurang optimalnya IKM dalam memenuhi persyaratan teknis maupun administrasi dan pasokan barang yang kurang kontinyu yang menyebabkan keterlambatan produksi.

2. Belum optimalnya pengembangan Industri sesuai dengan tata ruang wilayah yang berwawasan lingkungan dalam meningkatkan investasi industri

Peningkatan pembangunan industri hendaknya jangan sampai membawa akibat rusaknya lingkungan hidup. Hal ini diatur oleh Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 24 Tahun 2009 tentang Kawasan Industri, akan mendorong pengembangan industri yang berwawasan lingkungan serta akan memberikan daya tarik investasi industri. Belum optimalnya pengembangan industri yang sesuai dengan tata ruang wilayah yang berwawasan lingkungan disebabkan karena belum adanya program khusus yang focus terhadap peningkatan kualitas dan populasi industri.

3. Terbatasnya dukungan infrastruktur sarana prasarana layanan teknis dan kondisi mesin yang sudah tua

Pelaku IKM harus selalu melakukan inovasi dan kreatif supaya mampu bersaing kendati terkena dampak kebijakan dan permasalahan internal maupun eksternal. Peningkatan sarana dan prasarana Unit Pelayanan Teknis (UPT) dalam rangka optimalisasi pelayanan teknis dilakukan melalui upaya pengembangan dan penerapan hasil rekayasa teknologi industri bagi IKM serta sistem informasi networking. Terbatasnya dukungan infrastruktur sarana dan prasarana layanan teknis dapat menurunkan daya saing di sektor industri. Pengadaan sarana dan prasarana harus diikuti dengan pembinaan agar tidak timbul kekurangan yang tidak diinginkan.

4. Lemahnya Daya Saing Industri Kecil dan Menengah

Kurang kondusifnya lingkungan usaha memiliki implikasi besar terhadap penurunan daya saing ekonomi, terutama sektor-sektor industri sebagai lapangan kesempatan kerja yang merupakan salah satu motor bagi pertumbuhan ekonomi. Lemahnya daya saing juga dirasakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi pada industri kecil menengah logam mesin dan tekstil. Akar masalah dari lemahnya daya saing industri kecil menengah disebabkan karena tingginya harga bahan baku industri, keterbatasannya peralatan industri yang di gunakan, terbatasnya kemampuan dan keterampilan industri, serta kurangnya promosi dan jejaring produk IKM.

Untuk lebih jelasnya Identifikasi permasalahan di Dinas Perindag Provinsi Jambi yang dikelompokkan berdasarkan tugas dan fungsinya, dapat dilihat pada tabel 3.1. berikut ini :

Tabel 3.1.
Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Dinas Perindag Provinsi Jambi

Aspek Kajian	Capaian / Kondisi Saat Ini (2015)	Standar yang Digunakan	Faktor yang Mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan OPD
			Internal	Eksternal	
<p>Beberapa aspek yang perlu dikaji dalam peningkatan sektor industri dan perdagangan yaitu :</p> <p><u>Sektor Industri</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kontribusi Industri terhadap PDRB 2. Pertumbuhan Sektor Industri 3. Persentase Peningkatan Usaha Industri 4. Persentase Peningkatan Tenaga Kerja Industri <p><u>Sektor Perdagangan</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kontribusi Perdagangan terhadap PDRB 2. Pertumbuhan Sektor Perdagangan 3. Persentase Peningkatan Usaha Perdagangan 4. Persentase Peningkatan Nilai Ekspor 5. Persentase Penurunan Nilai Impor 	<p>11.047%</p> <p>2.33%</p> <p>28.075 unit</p> <p>111.390 orang</p> <p>11.12%</p> <p>11.02%</p> <p>85.357 unit</p> <p>US \$ 2.635,8 juta</p> <p>US \$ 109 juta</p>	<p>Untuk pencapaian Aspek yang perlu dikaji dalam peningkatan sektor industri dan perdagangan yaitu salah satunya dengan melaksanakan semua strategi dan kebijakan yang telah ditetapkan dalam rencana strategis Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi tahun 2016-2021</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sumber pembiayaan dalam melaksanakan tugas rutinitas Perkantoran dan pembinaan terhadap usaha industri dan perdagangan yang dibiayai melalui dana APBD dan APBN yang relative terbatas. 2. Rendahnya motivasi, inovasi dan kreatifitas sebagai staf 3. Rendahnya minat baca terhadap peraturan perundangan tentang industri dan perdagangan 4. Kurangnya pendidikan dan pelatihan bagi staf untuk mengatasi berbagai masalah pertumbuhan industri dan perdagangan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sikap mandiri dan ketangguhan masyarakat dalam berusaha masih lemah 2. Belum terjalannya komunikasi/hubungan yang intensif antara hasil riset dan balai riset dalam negeri dengan perusahaan industri dan perdagangan 3. Kurangnya keberpihakan serta ke sadaran masyarakat untuk menggunakan produk dalam negeri 4. Masih lemahnya produk hukum terhadap penyelesaian kasus perlindungan konsumen 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Keterbatasan sarana dan prasarana kelembagaan di lingkup Dinas Perindag dalam mengakses jangkauan pelayanan dan pembinaan kepada pedagang, pelaku ekspor daerah 2. Disiplin aparat Dinas Perindag dirasakan masih rendah dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya 3. Lemahnya koordinasi dengan pihak terkait yang berkaitan dengan industri dan perdagangan

3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Pemerintah RI Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah RI Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.

Berkenaan dengan dasar aturan yang menjadi acuan dalam perencanaan pembangunan serta Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran yang telah disampaikan oleh Gubernur dan Wakil Gubernur pada saat kampanye, maka Visi Pembangunan yang ingin diwujudkan periode 2016 € 2021, adalah :

**“Tertib, Unggul, Nyaman, Tangguh, Adil dan Sejahtera”
JAMBI TUNTAS 2021**

Memperhatikan Visi tersebut serta perubahan paradigma dan kondisi yang akan dihadapi pada masa yang akan datang, diharapkan Provinsi Jambi dapat lebih berperan dalam perubahan yang terjadi di lingkup nasional, regional, maupun global. Dalam rangka pencapaian visi yang telah ditetapkan dengan tetap memperhatikan kondisi dan permasalahan yang ada serta tantangan ke depan, dan memperhitungkan peluang yang dimiliki, maka maksud dari visi tersebut adalah sebagai berikut:

- Tertib** : diartikan sebagai wujud tata kelola pemerintah Provinsi Jambi yang menerapkan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang bersih, transparan, akuntabel dan harmonis yang tercermin dari berkurangnya tingkat korupsi, makin banyaknya keberhasilan pembangunan di berbagai bidang, birokrasi pemerintahan yang professional dan berkinerja tinggi, adanya jaminan kepastian hukum, serta terjadi harmonisasi antar tingkatan pemerintahan dari pusat sampai desa.
- Unggul** : Menggambarkan kualitas Sumber Daya Manusia Provinsi Jambi yang berdaya saing dan mampu menjadi modal sosial bagi perwujudan perekonomian Provinsi Jambi yang berdaya saing.

- Nyaman** : Keadaan yang menggambarkan kehidupan masyarakat di Provinsi Jambi yang hidup dalam suasana aman, tenteram, damai, saling menghargai dan bertoleransi tinggi antar Suku, Agama dan Ras dilandasi supremasi hukum sehingga dapat mendorong iklim investasi dan berusaha yang kondusif.
- Tangguh** : Menggambarkan kemandirian ekonomi masyarakat yang mampu bertahan terhadap guncangan ekonomi global dan mampu bersaing secara global, berkembangnya Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi (IPTEKIN) serta pembangunan yang berwawasan lingkungan
- Adil** : mengartikan perwujudan pembangunan yang adil dan merata, tanpa diskriminasi, baik antar individu, golongan maupun antar wilayah, sehingga hasil dari pembangunan dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat
- Sejahtera** : mengandung makna bahwa kondisi semua lapisan masyarakat secara menyeluruh dapat terpenuhi hak-hak dasarnya, baik dibidang sosial, ekonomi, politik dan budaya

Dalam rangka pencapaian visi yang telah ditetapkan dengan tetap memperhatikan kondisi dan permasalahan yang ada serta tantangan ke depan, dan memperhitungkan peluang yang dimiliki, maka ditetapkan 6 (enam) misi Pembangunan Provinsi Jambi Tahun 2016 € 2021, sebagai berikut:

- Misi satu** : **Meningkatkan tata kelola pemerintahan daerah yang bersih, transparan, akuntabel dan partisipatif yang berorientasi pada pelayanan publik**, yaitu menerapkan prinsip € prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, meningkatkan kuantitas aparatur pemerintahan yang profesional, berkinerja tinggi dan berorientasi melayani masyarakat.
- Misi dua** ; **Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang sehat, terdidik, berbudaya, agamis dan berkesetaraan gender**, yaitu membangun sumber daya manusia yang berdaya saing, ditandai oleh penduduk laki-laki dan perempuan yang memiliki tingkat pendidikan dan derajat masyarakat kesehatan yang lebih baik serta adil dalam kerangka masyarakat yang berbudaya dan agamis .
- Misi tiga** ; **Menjaga situasi daerah yang kondusif, toleransi antar umat beragama dan kesadaran hukum masyarakat**, yaitu melakukan langkah-langkah antisipasi dini dan pencegahan terhadap potensi konflik yang muncul dengan menerapkan kepastian hukum sehingga suasana aman, tenteram dan kondusif.

Misi empat ; Meningkatkan daya saing daerah melalui optimalisasi pembangunan ekonomi kerakyatan yang didukung oleh penerapan Ilmu Pengetahuan, teknologi, dan inovasi (IPTEKIN) berwawasan lingkungan, yaitu meningkatkan nilai tambah produk € produk unggulan daerah dengan memanfaatkan IPTEKIN yang ramah lingkungan.

Misi lima ; Meningkatkan aksesibilitas dan kualitas infrastruktur umum, pengelolaan energi dan sumber daya alam yang berkeadilan dan berkelanjutan, yaitu meningkatkan aksesibilitas dan kualitas infrastruktur dasar serta mengoptimalkan potensi sumber energi terbarukan untuk pemerataan akses energi wilayah sehingga dapat meningkatkan produktivitas dan mobilitas penduduk antar wilayah

Misi enam ; Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat, yaitu meningkatkan aksesibilitas masyarakat miskin terhadap kehidupan yang lebih baik.

Didalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jambi Tahun 2016-2021, menempatkan pembangunan di bidang perindustrian dan perdagangan terutama untuk mendukung Misi 4 (empat) yaitu **€ Meningkatkan daya saing daerah melalui optimalisasi pembangunan ekonomi kerakyatan yang didukung oleh penerapan Ilmu Pengetahuan, teknologi, dan inovasi (IPTEKIN) berwawasan lingkungan €**

Dalam upaya mewujudkan Misi ke 4 (empat) tersebut, maka program pembangunan khusus urusan pilihan perindustrian dan perdagangan yang akan dilakukan tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut :

- 1. Urusan Pilihan Perindustrian,** melalui program antara lain:
 - a. Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah.
 - b. Program Pengembangan Industri Agro dan Kimia.
 - c. Program Peningkatan Daya Saing Kewirausahaan Industri Kecil dan Menengah
 - d. Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri
- 2. Urusan Pilihan Perdagangan,** melalui program antara lain :
 - a. Program Perlindungan Konsumen dan Pengaman Perdagangan.
 - b. Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri.
 - c. Program Peningkatan dan Pengembangan Perdagangan Luar Negeri.
 - d. Program Pengembangan Standarisasi Nasional

Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi Disperindag Provinsi Jambi dan dikaitkan dengan Visi, Misi dan Program Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi, maka Faktor

Penghambat dan Pendorong Pelayanan SKPD Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi dapat dilihat pada tabel 3.2. dibawah ini :

Tabel 3.2.
Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan SKPD Terhadap
Pencapaian Visi, Misi dan Program Gubernur dan Wakil Wakil Gubernur Jambi

Visi Provinsi Jambi : Tertib, Unggul, Nyaman, Tangguh, Adil dan Sejahtera• (TUNTAS) 2021					
Misi dan Program KDH dan Wakil KDH	Permasalahan Pelayanan OPD	Faktor yang Mempengaruhi			
		Penghambat		Pendorong	
<p>Misi 4 (empat) yaitu • Meningkatkan daya saing daerah melalui optimalisasi pembangunan ekonomi kerakyatan yang didukung oleh penerapan Ilmu Pengetahuan, teknologi, dan inovasi (IPTEKIN) berwawasan lingkungan</p> <p><u>Program Perindustrian :</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengembangan Industri Kecil dan Menengah. 2. Pengembangan Industri Agro dan Kimia. 3. Peningkatan Daya Saing Kewirausahaan Industri Kecil dan Menengah 4. Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri <p><u>Program Perdagangan :</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Perlindungan Konsumen dan Pengaman Perdagangan 2. Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri. 3. Peningkatan dan Pengembangan Perdagangan Luar Negeri 4. Pengembangan Standarisasi Nasional 	<p>Bidang Perindustrian :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kebijakan teknis bidang perindustrian dan kerjasama industri belum optimal 2. Daya saing produk rendah 3. Ketersediaan bahan baku produk yang relatif terbatas; 4. Kompetensi sumber daya manusia Pengolah industri yang rendah <p>Bidang Perdagangan ;</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Lemahnya pengawasan di bidang ekspor dan impor 2. Terbatasnya sarana perdagangan/ distribusi yang representative 3. Kurang memadainya jumlah maupun kualitas SDM bidang Perdagangan 4. Infrastruktur sarana perhubungan Antar daerah yang belum memadai 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Anggaran Provinsi relatif terbatas jumlahnya sehingga harus bisa mengefisienkan penggunaan anggaran pada kegiatan-kegiatan tertentu. 2. Keterbatasan jumlah dan kompetensi SDM dalam Mendukung pelaksanaan program/kegiatan belum sesuai dengan yang dibutuhkan, 3. Kurangnya integrasi berbagai kegiatan secara sinergis sehingga tujuan masing-masing kegiatan belum lebih terlihat kontribusinya terhadap tujuan utama yang ditetapkan dalam setiap program 4. Evaluasi dan monitoring Pelaksanaan kegiatan masih perlu Ditingkatkan 5. Industri kreatif belum sepenuhnya dijadikan konsep yang utuh dalam pola pengembangan perekonomian di daerah Kabupaten/Kota; 6. Masih lemahnya daya saing produk khususnya produk yang dihasilkan para Industri Kecil Menengah, yang tidak mampu bersaing dengan produk impor atau produk yang dihasilkan industri yang berskala besar 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah Sumber daya aparatur yang banyak 2. Tersedianya data/informasi sarana dan prasarana industri dan perdagangan 3. Tersedianya standard operasional prosedur kerja 4. Kebijakan Pemerintah Pusat dibidang industri dan perdagangan yang bersifat normatif maupun dukungan finansial dalam pelaksanaan program pembangunan industri dan perdagangan di daerah 5. Potensi sumber daya alam yang memadai, 6. Komitmen yang tinggi dari pemerintah daerah untuk menciptakan iklim investasi, iklim usaha dan kemudahan bagi para investor serta kepedulian yang tinggi terhadap keberadaan Usaha Kecil Menengah dan Mikro (UMKM), 7. Kesadaran yang tinggi dari masyarakat Jambi untuk menciptakan rasa aman dan nyaman, sehingga menjadi daya tarik tersendiri bagi para investor dari luar 		

3.3. Telaahan Renstra Kementerian Perindustrian dan Kementerian Perdagangan RI

Analisis Renstra K/L ditujukan untuk menilai keserasian, keterpaduan, sinkronisasi dan sinergitas pencapaian sasaran pelaksanaan Renstra SKPD Provinsi terhadap sasaran Renstra K/L serta untuk mengidentifikasi apakah sasaran pelaksanaan Renstra SKPD Provinsi telah berkontribusi terhadap pencapaian sasaran Renstra K/L. Kementerian/Lembaga yang terkait dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi adalah Kementerian Perindustrian RI dan Kementerian Perdagangan RI.

1.3.1. Renstra Kementerian Perindustrian 2014-2019

Kementerian Perindustrian sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian dituntut untuk melakukan pengaturan, pembinaan dan pengembangan perindustrian. Tujuan pembangunan industri untuk 5 (lima) tahun kedepan yaitu *•Terbangunnya Industri yang Tangguh dan Berdaya Saing €*.

Penekanan sasaran strategis jangka menengah Kementerian Perindustrian 2015 € 2019. yang terkait dengan tugas-tugas pembangunan yang dilakukan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi antara lain :

1. Meningkatnya peran industri dalam perekonomian nasional, indikator kinerja sasaran sinergisnya adalah :
 - a. Laju pertumbuhan PDB industri pengolahan non migas
 - b. Kontribusi PDB industri pengolahan non migas terhadap PDB Nasional
2. Meningkatnya Penguasaan Pasar Dalam dan Luar Negeri, indikator kinerja sasaran sinergisnya adalah : Kontribusi ekspor produk industri pengolahan non migas terhadap ekspor nasional
3. Meningkatnya peran IKM dalam perekonomian nasional, indikator kinerja sasaran sinergisnya adalah :
 - a. Pertumbuhan jumlah unit usaha IKM
 - b. Penyerapan Tenaga Kerja IKM
4. Meningkatnya penyerapan tenaga kerja di sektor industri, indikator kinerja sasaran sinergisnya adalah : Jumlah penyerapan tenaga kerja di sektor industri
5. Menguat Struktur Industri, indikator kinerja sasaran sinergisnya adalah : Rasio impor bahan baku, barang penolong dan bahan modal terhadap PDB Industri Pengolahan non migas.

6. Meningkatnya Pengembangan Inovasi dan Penguasaan Teknologi, indikator kinerja sasaran sinergisnya adalah : Meningkatnya penguasaan teknologi industri, pengembangan inovasi dan penerapan Hak Kekayaan Intelektual (HKI)
7. Meningkatnya Pemerataan dan Penyebaran Industri, indikator kinerja sasaran sinergisnya adalah : Persentase nilai tambah sektor industri di luar pulau Jawa terhadap total nilai tambah sektor industri dan persentase jumlah unit usaha industri besar sedang diluar pulau jawa terhadap total populasi industri besar sedang nasional.

3.3.2. Renstra Kementerian Perdagangan 2014-2019

Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015,2019 telah menetapkan misi pembangunan nasional yang terkait langsung dengan sektor perdagangan antara lain, yaitu perdagangan sebagai sektor penggerak pertumbuhan dan daya saing ekonomi untuk kemakmuran rakyat yang berkeadilan.

Penekanan sasaran strategis jangka menengah Kementerian Perdagangan 2015 € 2019. yang terkait dengan tugas-tugas pembangunan yang dilakukan Dinas Prindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi antara lain :

1. Meningkatnya pertumbuhan ekspor barang non migas yang bernilai tambah dan jasa, indikator kinerja sasaran sinergisnya adalah :
 - a. Pertumbuhan ekspor non migas;
 - b. Kontribusi produk manufaktur terhadap total ekspor.
2. Meningkatnya pengamanan perdagangan dan kebijakan nasional untuk mendukung daya saing produk Indonesia di pasar domestik, indikator kinerja sasaran sinergisnya adalah :
 - a. Persentase penanganan kasus dalam rangka pengamanan ekspor;
 - b. Persentase pengamanan kebijakan nasional
3. Meningkatnya Promosi Citra Produk Ekspor (*Nation Branding*), indikator kinerja sasaran sinergisnya adalah :
 - a. Meningkatnya promosi citra produk ekspor (*nation branding*);
 - b. Optimalnya kinerja kelembagaan ekspor.
4. Penguatan Pasar Dalam Negeri, indikator kinerja sasaran sinergisnya adalah :
 - a. Meningkatnya Pertumbuhan PDB Sektor Perdagangan
 - b. Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana distribusi dan logistik nasional.
5. Meningkatnya Pemanfaatan Pasar Berjangka Komoditi, SRG, dan Pasar Lelang, indikator kinerja sasaran sinergisnya adalah :
 - a. Pertumbuhan Volume Transaksi Perdagangan Berjangka Komoditi (PBK);
 - b. Pertumbuhan Nilai Resi Gudang yang diterbitkan;

- c. Pertumbuhan Nilai Transaksi di Pasar Lelang.
- 6. Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting, indikator kinerja sasaran sinergisnya adalah : Koefisien variasi harga barang kebutuhan pokok antar waktu.
- 7. Meningkatnya Pemberdayaan Konsumen, Standardisasi, Pengendalian Mutu, Tertib Ukur dan Pengawasan Barang/Jasa, indikator kinerja sasaran sinergisnya adalah :
 - a. Persentase barang beredar yang diawasi yang sesuai ketentuan;
 - b. Persentase barang impor ber-SNI Wajib yang sesuai ketentuan yang berlaku;

Bila dikaitkan dengan sasaran jangka menengah Renstra Kementerian Perindustrian dan Kementerian Perdagangan tersebut diatas, maka beberapa permasalahan yang dihadapi oleh SKPD (Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi) dalam penerapannya terkait dengan tugas pokok dan fungsi serta faktor pembambat dan faktor pendorong dalam pelayanannya dapat dilihat pada tabel 3.3 dibawah ini :

Tabel 3.3.
Permasalahan Pelayanan SKPD Berdasarkan Sasaran Renstra K/L
Beserta Faktor Penghambat dan Pendorong

No	Sasaran Jangka Menengah	Permasalahan Pelayanan OPD	Faktor		
			Penghambat	Pendorong	
Kementerian Perindustrian		Bidang Industri	1. Industri dasar yang menjadi pemasok bahan baku kemampuannya masih terbatas. 2. Penerapan standar produk komponen dan bahan baku yang tersedia di pasar dalam negeri tidak atau belum memenuhi standar yang telah ditetapkan. 3. Belum kuatnya peranan Industri kecil dan menengah. 4. Ketergantungan ekspor pada beberapa komoditi dan beberapa Negara tujuan 5. Masih ditemukan peredaran produk-produk impor ilegal di pasaran. 6. Terbatasnya kawasan/wilayah untuk pembangunan pasar tradisional. 7. Kurangnya koordinasi antar SKPD terkait dalam rangka penyusunan dan pemetaan sector industri dan perdagangan	1. Potensi sumber daya alam Indonesia sangat potensial untuk menumbuh kembangkan industri dan perdagangan berbasis sumber daya alam. 2. Jumlah SDM Sektor industri dan perdagangan relative besar. 3. Investasi mendorong impor teknologi. 4. Adanya komitmen dan konsisten untuk terus melakukan perbaikan iklim usaha dan memajukan IKM. 5. Tersedianya anggaran baik melalui APBN dan APBD I 6. Telah tersedianya RTRW Provinsi Jambi 7. Adanya kebijakan pemerintah pusat dan provinsi tentang pengembangan perindustrian dan perdagangan.	
1.	Meningkatnya peran industri dalam perekonomian nasional	1.			Kebijakan teknis bidang perindustrian dan kerjasama industri belum optimal;
2.	Meningkatnya Penguasaan Pasar Dalam dan Luar Negeri,	2.			Penyelenggaraan dan fasilitasi pengendalian dan pengawasan perindustrian belum optimal;
3.	Meningkatnya peran IKM dalam perekonomian nasional	3.			Daya saing produk rendah;
4.	Meningkatnya penyerapan tenaga kerja di sektor industri	4.			Ketersediaan bahan baku produk yang relative terbatas
5.	Menguat Struktur Industri	5.			Kompetensi sumber daya manusia pengolah industri yang rendah
6.	Meningkatnya Pengembangan Inovasi dan Penguasaan Teknologi				
7.	Meningkatnya Pemerataan dan Penyebaran Industri				
Kementerian Perdagangan		Bidang Perdagangan			
1.	Meningkatnya pertumbuhan ekspor barang non migas yang bernilai tambah dan jasa Meningkatnya pengamanan perdagangan dan kebijakan nasional untuk mendukung daya saing produk Indonesia di pasar domestic	1.			Lemahnya pengawasan di bidang ekspor dan impor;
2.	Meningkatnya Promosi Citra Produk Ekspor (Nation Branding)	2.	Terbatasnya sarana perdagangan/ distribusi yang representatif;		
3.	Penguatan Pasar Dalam Negeri Meningkatnya Pemanfaatan Pasar Berjangka Komoditi, SRG, dan Pasar Lelang	3.	Kurang memadainya jumlah maupun kualitas SDM bidang perdagangan;		
4.	Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	4.	Infratraktur sarana perhubungan antar daerah masih ada yang jelek;		
5.	Meningkatnya Pemberdayaan Konsumen, Standardisasi, pengendalian Mutu, Tertib Ukur dan Pengawasan Barang/Jasa	5.	Kebijakan yang mengatur mata rantai perdagangan sektor hulu dan hilir tidak jelas.		

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jambi dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

3.4.1. Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jambi

Rencana Tata Ruang Wilayah merupakan produk perencanaan ruang yang digunakan sebagai pedoman di dalam pelaksanaan kegiatan yang menggunakan ruang, sehingga segala bentuk perencanaan pembangunan harus mengacu pada rencana tata ruang yang berlaku.

Rencana penataan ruang dan wilayah Provinsi Jambi ditetapkan melalui Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 10 Tahun 2013 tentang Rencana Ruang Wilayah Provinsi Jambi Tahun 2013 € 2033. Adapun tujuan penataan ruang wilayah tersebut yaitu **Terwujudnya ruang yang produktif, Efisien, Nyaman dan Berkelanjutan**.

Kebijakan penataan ruang wilayah Provinsi Jambi meliputi :

- a. Pengurangan kesenjangan pembangunan dan perkembangan wilayah barat , tengah dan timur,
- b. Pengembangan ekonomi sektor primer, sekunder dan tersier sesuai daya dukung wilayah;
- c. Pengoptimalisasian pemanfaatan kawasan budi daya untuk mendukung pengembangan ekonomi daerah;
- d. Penetapan pusat-pusat kegiatan perkotaan untuk mendukung pelayanan sosial/ekonomi dan pengembangan wilayah;
- e. Penetapan kawasan lindung untuk menjaga kelestarian sumber daya alam secara terpadu dengan provinsi yang berbatasan; dan
- f. Peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara.

Strategi pengembangan ekonomi sektor primer, sekunder dan tersier sesuai daya dukung wilayah sebagaimana dimaksud pada huruf b diatas meliputi :

- a. Meningkatkan kegiatan pertanian, kehutanan dan perkebunan melalui pola intensifikasi dan ekstensifikasi dengan tetap mempertahankan ekosistem lingkungan;
- b. Meningkatkan dan mengembangkan kawasan agropolitan dengan melengkapi fasilitas perdagangan pusat koleksi distribusi dan jasa pendukung komoditas pertanian kawasan;
- c. Meningkatkan dan mengembangkan industri berbasis pertanian berupa infrastruktur dan sarana pendukung lainnya;
- d. Meningkatkan dan mengembangkan kegiatan jasa perdagangan untuk mendukung kegiatan primer dan sekunder, serta menciptakan lapangan kerja perkotaan;
- e. Meningkatkan dan mengembangkan kegiatan sektor unggulan pada kawasan strategis antara lain pertanian, perkebunan, pertambangan, industri, perikanan dan pariwisata.

Adapun aspek penataan ruang dan wilayah yang berhubungan dengan bidang perindustrian dan perdagangan adalah *penataan dan pengembangan kawasan peruntukan industri*.

Pengembangan kawasan peruntukan industri meliputi :

a. Kawasan peruntukan industri besar

Dengan prioritas pengembangan meliputi Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan Tanjung Jabung Timur.

b. Kawasan peruntukan industri menengah

Dengan prioritas pengembangan meliputi Kota Jambi, Kabupaten Muaro Jambi, Batanghari, Bungo, Merangin, Sarolangun dan Tebo.

Khusus kawasan industri menengah di perkotaan adalah industri-industri yang ramah lingkungan (clean industry).

c. Kawasan peruntukan industri kecil

Dengan prioritas pengembangan meliputi seluruh wilayah Kabupaten/Kota.

Indikasi arahan peraturan zonasi kawasan peruntukan industri di Provinsi Jambi ditetapkan dengan memperhatikan antara lain :

- a. Pemanfaatan ruang untuk kegiatan industri baik yang sesuai dengan penggunaan teknologi, potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia di wilayah sekitarnya,
- b. Pembatasan pembangunan perumahan baru sekitar kawasan peruntukan industri.

Untuk menciptakan iklim investasi yang lebih baik pemerintah Provinsi Jambi melakukan upaya untuk pengembangan kawasan industri melalui penyediaan lokasi industri. Kawasan ini harus terencana dan didukung oleh fasilitas serta prasarana yang lengkap dan berorientasi pada kemudahan dalam pengelolaan dampak lingkungan yang ditimbulkan oleh limbah industri. Dalam pengelolaan kawasan industri disamping oleh pemerintah (BUMN) juga dilakukan oleh pihak swasta.

3.4.2. Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) adalah serangkaian Analisis yang sistematis, menyeluruh dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana dan/atau program (pasal 1 UU No 32/2009 tentang perlindungan lingkungan dan pengelolaan lingkungan hidup). Pemahaman ini menunjukkan bahwa KLHS merupakan sebuah kajian atau suatu analisis untuk mengetahui sejauh mana daya dukung dan daya tampung wilayah mampu mendukung pengembangan wilayah tersebut seperti ketersediaan air, resiko kebencanaan, dan sebagainya .

Dalam Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Provinsi Jambi Tahun 2016-2021, terdapat 4 (empat) isu strategis dalam pembangunan berkelanjutan, yaitu :

1. Kedaulatan Pangan untuk mencegah alih fungsi lahan
2. Belum optimalnya kondisi Infrastruktur
3. Belum optimalnya Kinerja lembaga pengelolaan/ pengawas lingkungan
4. Daya saing Daerah

Di antara keempat isu pembangunan berkelanjutan di atas, beberapa di antaranya terkait dengan sektor industri dan perdagangan, yaitu :

1. Kedaulatan Pangan untuk mencegah alih fungsi lahan

Semakin tingginya aktivitas alih fungsi lahan khususnya pada hutan dan pertanian untuk memenuhi kebutuhan pembangunan. Kondisi ini tentu memiliki dampak positif dan negatif. Dimana dampak positif adalah semakin meningkatnya laju pembangunan perekonomian yang akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sedangkan dampak negatifnya adalah semakin tingginya resiko bencana erosi dan banjir, menurunnya ketahanan pangan, dan ketersediaan air bersih yang semakin sedikit.

Kedaulatan pangan menjadi penting dan diarahkan untuk disesuaikan dengan RTRW Provinsi Jambi yang didukung dengan program-program perlindungan pangan berkelanjutan. Oleh sebab itu motivasi dan regulasi ke arah perlindungan dan kedaulatan pangan menjadi keharusan

2. Belum optimalnya kondisi Infrastruktur

Faktor utama penyebab masalah infrastruktur ini adalah, karena kenaikan jumlah penduduk, kebutuhan yang semakin meningkat, jangkauan akses ke lokasi tujuan produksi dan industri.

Sarana dan prasarana untuk menumbuhkan hilirisasi sangat diperlukan untuk memacu pertumbuhan ekonomi. Tanpa ketersediaan sarana tersebut akan menyebabkan kurang lancarnya arus barang dan jasa. Khusus untuk daerah Jambi keterbatasan sarana transportasi sangat dirasakan terutama untuk daerah pedesaan. Apalagi daerah Jambi sebagian besar merupakan wilayah pegunungan, dataran rendah dan pesisir. Kondisi saat ini masih terbatasnya aksesibilitas dari pedesaan terutama sentra produksi pertanian (khususnya perkebunan) menuju kawasan industri atau pelabuhan. Permasalahannya adalah rendahnya kualitas jalan dan terbatasnya kemampuan jembatan untuk memperlancar arus barang dan jasa. Kondisi tersebut sangat dirasakan bagi pengusaha angkutan jasa hasil perkebunan baik dari sentra produksi (kebun) maupun menuju industri dan pelabuhan terdekat.

3. Daya saing Daerah

Salah satu indikator berkembangnya perekonomian suatu daerah adalah tersedianya prasarana dan sarana transportasi yang mendukung berkembangnya Daya Saing Daerah. Baik untuk memenuhi kebutuhan manusia maupun untuk kelancaran angkutan barang dan jasa dari sentra produksi ke konsumen/pemakai. Kelancaran angkutan barang dan jasa merupakan faktor utama untuk memacu pertumbuhan ekonomi dan ketersediaan kebutuhan masyarakat maupun kebutuhan industri untuk kelancaran produksi

Kebijakan dan strategi pemanfaatan ruang yang hendak dilaksanakan meliputi : kebijakan dan strategi pengembangan wilayah; kebijakan dan strategi pengembangan struktur ruang; dan kebijakan dan strategi pengembangan pola ruang. Dalam hal kebijakan pengembangan wilayah di Provinsi Jambi diwujudkan melalui :

1. Kebijakan Pembangunan yang ditekankan pada peningkatan produktivitas dengan mempertimbangkan daya dukung dan daya tampung lingkungan dengan mempertahankan lahan yang berfungsi lindung serta peningkatan kapasitas sumberdaya manusia;
2. Kebijakan Pembangunan yang memperhatikan arahan Rencana Tata Ruang Wilayah sehingga terwujud pemerataan pembangunan sesuai dengan potensi unggulan masing-masing wilayah dan konektivitas antar daerah guna meminimalisir konflik.

Adapun strategi pengembangan wilayah untuk kawasan diatas dilakukan dengan mengendalikan pengembangan wilayah, mendorong pengembangan wilayah, membatasi pengembangan wilayah dan meningkatkan pengembangan wilayah. Salah satu upaya yang dilakukan dalam membatasi pengembangan wilayah adalah dengan mempertahankan dan menjaga kelestarian kawasan lindung yang telah ditetapkan.

Tabel 3.4. Hasil Analisis Terhadap Dokumen KLHS Provinsi Jambi

No.	Aspek Kajian	Kajian KLHS	Implikasi Terhadap Pelayanan OPD
1.	Kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup untuk Pembangunan	<ul style="list-style-type: none">- Alih fungsi lahan (kawasan lindung, suaka alam, pesawahan) menjadi peruntukkan lain yang berbeda dengan fungsi asalnya- Konflik pemanfaatan ruang pada lokasi tertentu sehingga mengganggu keselarasan dan keseimbangan pembangunan yang berkelanjutan	Memasukkan pertimbangan Lingkungan pada setiap tahap perencanaan program dan kegiatan, mulai dari perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang
2.	Perkiraan mengenai dampak dan risiko lingkungan hidup	Terjadinya penurunan kualitas air sungai dan air permukaan yang diakibatkan oleh Pencemaran limbah industri	Mendorong pelaksanaan Green Industri
3.	Kinerja layanan/jasa ekosistem	Pengelolaan DAS secara terpadu melalui mekanisme jasa lingkungan hulu hilir	Meningkatkan kualitas lingkungan dan perlindungan

		belum diterapkan secara menyeluruh	lingkungan
4.	Efisiensi pemanfaatan sumber daya alam	Ekosistem pesisir dan laut semakin rusak dan terjadi pencurian serta penangkapan ikan yang tidak ramah lingkungan	Mendorong pengembangan Industri berbasis ikan hasil budi daya dan perairan lainnya
5.	Tingkat kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim	Masih rendahnya antisipasi aparat pemerintah dalam memahami arti pelestarian, pengelolaan dan pengendalian Lingkungan hidup untuk menghadapi resiko perubahan iklim	Mendorong pelaksanaan pelestarian, pengelolaan dan pengendalian Lingkungan hidup

3.5. Penentuan Isu-isu Strategis

Pembangunan dan pengembangan sektor industri dan perdagangan tak lepas dari isu strategis yang mempengaruhi kinerja industri dan perdagangan, isu strategis tersebut antara lain :

3.5.1. Isu € isu strategis Provinsi Jambi

Isu € isu strategis yang menjadi perhatian Provinsi Jambi dalam lima tahun kedepan adalah sebagai berikut :

1. **Tata kelola pemerintahan masih memerlukan perbaikan terutama dalam hal akuntabilitas dan pelayanan publik.**

Hal ini berhubungan dengan pembinaan dan pengawasan dalam pengelolaan keuangan daerah yang belum berjalan efektif sehingga masih terjadi penyalahgunaan keuangan daerah dalam bentuk tindak pidana korupsi. Selain itu, belum berkembangnya *e-government system* dan inovasi dalam penggalian sumber-sumber pendapatan daerah menjadi salah satu penyebab belum optimalnya pendapatan asli daerah dan masih lambatnya birokrasi serta rendahnya kualitas pelayanan publik.

2. **Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) belum sesuai dengan kebutuhan pasar dan belum mendukung pembangunan di Provinsi Jambi.**

Belum meratanya akses terhadap pendidikan dan kesehatan yang berkualitas menjadi salah satu penyebab kualitas SDM belum memiliki daya saing sesuai harapan. Disamping itu, mulai lunturnya nilai € nilai luhur agama dan budaya juga berimplikasi pada minimnya SDM yang berkarakter dan berdaya saing. Perbaikan karakter SDM sekaligus dapat mendukung upaya pemerintah pusat melalui gerakan **revolusi mental**.

3. **Predikat Provinsi Jambi sebagai salah satu daerah yang aman di Indonesia** merupakan salah satu hal positif yang harus dipertahankan. Situasi daerah yang kondusif akan menjadi salah satu modal penciptaan iklim investasi di Provinsi Jambi.

4. **Pengelolaan sumberdaya alam (SDA) belum optimal dan kurang mempertimbangkan kelestarian lingkungan hidup.**

Kurang optimalnya pengelolaan SDA tersebut disebabkan oleh kurangnya sentuhan IPTEK dan inovasi, sehingga nilai tambah produk unggulan daerah tidak didapatkan oleh Provinsi Jambi. Demikian pula dengan eksplorasi sumberdaya alam yang hanya berorientasi pada profit tanpa mempertimbangkan aspek sosial dan lingkungan.

5. **Ketersediaan dan kualitas infrastruktur** umum masih kurang memadai dalam mendukung pengembangan wilayah.

6. Adanya **kesenjangan ekonomi ditandai tingginya** angka pengangguran dan jumlah penduduk miskin.

7. Letak Jambi secara geografis sangat strategis dalam kawasan ASEAN dan Interregional Sumatera (Provinsi Sumsel, Sumbar, Riau, Kepulauan Riau, dan Bengkulu) karena dapat menjadi pintu gerbang keluar dan masuknya barang, jasa dan orang dari dan ke Batam, Malaysia dan Singapura serta dari provinsi lain. Peran Jambi ke depan akan semakin strategis sebagai bagian dari **poros maritim dunia, pemberlakuan pasar bebas Asean (AFTA) dan Asean , China (ACFTA) serta Pemberlakuan Masyarakat Ekonomi Asean (MEA).**

8. **Kondisi perekonomian global yang berfluktuatif** berdampak terhadap harga komoditi unggulan Provinsi Jambi seperti Migas, Batubara, Crude Palm Oil (CPO), Karet dan kelapa dalam. Kondisi ini berdampak pada pendapatan masyarakat yang sekitar 65 persen berada disektor pertanian dan perkebunan yang pada gilirannya berdampak pada daya beli masyarakat.

9. **Isu dunia yang tidak kalah pentingnya adalah perubahan iklim terkait program Pengurangan Emisi Karbon akibat Deforestasi dan Degradasi Hutan dan Lahan serta SDGs.** Dalam hal pengurangan emisi, Provinsi Jambi berpotensi menjadi daerah yang potensial untuk menjaga keseimbangan lingkungan. Sebagai jantung pulau Sumatera, posisi hutan Jambi sangat strategis sebagai rumah terakhir bagi keanekaragaman hayati Sumatera. Dengan memiliki 4 Taman Nasional (TNKS, TNBT, TNBD dan TNB) dapat dipastikan Provinsi Jambi merupakan benteng terakhir dari habitat bermacam satwa liar, seperti Harimau Sumatera (*Panthera tigris sumatrae*), Badak Sumatera (*Dicerorhinus sumatraensis*), Gajah Sumatera (*Elephas maximus*) dan lainnya yang terus menurun drastis akibat perburuan dan penyempitan habitat. Selain itu juga sebagai sebagai rumah yang nyaman untuk flora khas seperti cendawan muka harimau (*Rafflesia haseltii*), *Rafflesia arnoldi*, *Amorphopalus titanum* dan berbagai jenis kekayaan,

perdu juga bebungaan. Demikian pula dalam hal pencapaian SDGs, Provinsi Jambi harus ikut berperan sebagai pemenuhan kebutuhan dasar manusia.

10. Upaya yang dilakukan pemerintah dalam mewujudkan **kedaulatan pangan dan energi** harus didukung dengan peningkatan produksi pangan melalui perbaikan sarana prasarana pendukung dan intensifikasi serta pemberian sentuhan ilmu pengetahuan, teknologi dan inovasi dalam pengolahan lahan pertanian serta optimalisasi penggunaan potensi energi baru dan terbarukan guna pemenuhan kebutuhan energi di Provinsi Jambi.
11. **Penyelesaian Batas Provinsi Jambi dan Provinsi tetangga** merupakan agenda yang harus mendapat perhatian untuk pembangunan lima tahun ke depan. Hal ini terkait dengan upaya pembangunan wilayah perbatasan yang sampai saat ini masih belum optimal.

3.5.2. Isu € isu strategis disektor Industri dan Perdagangan

Isu € isu strategis yang menjadi perhatian Sektor Industri dan Perdagangan dalam lima tahun kedepan adalah sebagai berikut :

1. Pengembangan agro industri belum optimal guna meningkatkan nilai tambah dari komoditas unggulan pertanian tanaman pangan dan perkebunan.
2. Menurunnya kinerja ekspor yang antara lain disebabkan biaya ekonomi tinggi; rendahnya infrastruktur ekspor seperti pelabuhan, peti kemas dan angkutan kapal laut serta rendahnya infrastruktur jalan ke pelabuhan; ketergantungan pada produk primer (nilai tambah rendah), penurunan ekspor produk kayu olahan dan karena keterbatasan bahan baku, berpengaruh besar terhadap kinerja ekspor Jambi; masih besarnya ketergantungan pasar ekspor pada negara tertentu seperti Singapura; keragaman ekspor yang masih rendah; lemahnya sistem jaringan informasi pasar ekspor terutama dalam mendukung peningkatan daya saing ekspor.
3. Masih belum berkembangnya sektor hilir (agro industri) sehingga masih rendahnya nilai tambah sektor pertanian komoditas unggulan.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN



DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROVINSI JAMBI

BAB IV

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

*B*erdasarkan kondisi, kinerja dan permasalahan serta tantangan yang dihadapi oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Provinsi Jambi dan sesuai tugas dan fungsinya maka dirumuskanlah visi dan misi. Perumusan visi dan misi jangka menengah SKPD merupakan salah satu tahap penting penyusunan dokumen Renstra SKPD sebagai hasil dari analisis sebelumnya. Pernyataan visi yang artikulatif akan memberikan arah yang jelas bagaimana mencapai masa depan yang diharapkan dan mengatasi kesenjangan yang terjadi. Merealisasikan sebuah visi diartikan sebagai keberhasilan menciptakan perubahan pada dampak yang luas dari tugas dan fungsi yang diemban organisasi. Visi tersebut dijabarkan dengan jelas dalam misi, sebagai manifestasi dari hadirnya semangat atas perubahan dan disertai kepemimpinan yang mumpuni dalam menyelesaikan berbagai masalah dan tantangan organisasi.

Dalam mencapai visi dan misi dibutuhkan tujuan dan sasaran yang ingin diraih dalam lima tahun kedepan untuk pencapaian visi dan misi. Untuk keberhasilan visi, misi, tujuan, dan sasaran diperlukan strategi untuk mencapainya. Strategi dimaknai sebagai aktualisasi berbagai kebijakan untuk mencapai sasaran yang spesifik dan berkesinambungan. Selanjutnya, kebijakan diimplementasikan ke dalam program-program untuk mewujudkan sasaran yang ingin dicapai selama lima tahun

Bab 4 Berisi :

- 4.1. Visi dan Misi*
- 4.2. Tujuan dan Sasaran*
- 4.3. Strategi dan Kebijakan*

4.1. Tujuan dan Sasaran Dinas Perindag Provinsi Jambi

Sebagai salah satu komponen dari perencanaan strategis, tujuan dan sasaran ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi sebagai gambaran tentang kondisi yang ingin dicapai di masa datang. Untuk itu, tujuan disusun guna memperjelas pencapaian sasaran yang ingin diraih dari visi dan misi. Tujuan dan sasaran hendaknya

merupakan arsitektur kinerja tertinggi atau *impact* dari segenap operasionalisasi kebijakan melalui program dan kegiatan sepanjang lima tahun ke depan. Untuk itu, *impact* harus memberi pengertian sebagai *utimate goal* dari keseluruhan kinerja utama Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi.

4.1.1. Tujuan

Pembangunan industri dan perdagangan merupakan bagian dari pembangunan nasional, oleh sebab itu pembangunan sektor industri dan perdagangan harus diarahkan untuk menjadi industri dan perdagangan yang mampu memberikan sumbangan berarti bagi pembangunan ekonomi, sosial dan budaya Indonesia. Pembangunan sektor industri dan perdagangan tidak hanya ditujukan untuk mengatasi permasalahan dan kelemahan di sector industri dan perdagangan yang disebabkan oleh melemahnya daya saing dan krisis global yang melanda dunia saat ini saja, melainkan juga harus mampu turut mengatasi permasalahan nasional dan daerah serta meletakkan dasar-dasar pembangunan industri dan perdagangan andalan masa depan.

Secara kuantitatif, peran industri dan perdagangan ini harus harus tampak pada kontribusi dalam bentuk Produk Domestik Bruto (PDRB), baik kontribusi secara menyeluruh maupun setiap cabang industri dan perdagangan. Dengan memperhatikan Visi dan Misi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi sebagaimana yang telah ditetapkan diatas, maka Visi dan Misi tersebut perlu dirumuskan kedalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa tujuan yang hendak dicapai dalam perencanaan strategis Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi periode 2016-2021 yaitu :

1. Meningkatkan Daya Saing Industri Guna Mendukung Perekonomian Daerah

Pembangunan di sektor industri merupakan prioritas utama pembangunan ekonomi tanpa mengabaikan pembangunan di sektor lain. Meningkatkan daya saing sektor industri dalam perekonomian merupakan kinerja utama pembangunan di sektor industri dan selaras dengan misi pertama Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi yaitu Mengembangkan Sektor Industri Berbasis Unggulan Daerah.

Peran sektor industri pengolahan dalam perekonomian Jambi memberikan sumbangan paling besar pada total PDRB Jambi Untuk meningkatkan kontribusi sektor industri perlu adanya peningkatan mutu di industri besar pada umumnya dan industri kecil menengah pada khususnya.

2. Meningkatkan Stabilitas dan Penguatan Pangsa Pasar yang Terintegrasi dengan Pasar Dalam Negeri

Dengan penguatan pasar dalam negeri maka pertumbuhan ekonomi akan tetap terjaga dan akan terus menjadi kekuatan Indonesia dalam menghadapi ketidakpastian perekonomian global. Indikasi semakin kuatnya pasar dalam negeri dapat dilihat dari peran Perdagangan Besar dan Eceran yang memberikan kontribusi cukup besar terhadap perekonomian Indonesia.

Untuk itu, berbagai upaya yang dilakukan dalam menguatkan pasar dalam negeri diantaranya dengan melakukan peningkatan layanan di sektor perdagangan.

3. Meningkatkan Perdagangan Luar Negeri Yang Berkualitas

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan. Perdagangan Luar Negeri adalah Perdagangan yang mencakup kegiatan Ekspor dan/atau Impor atas Barang dan/atau Perdagangan Jasa yang melampaui batas wilayah negara. Pemerintah mengatur kegiatan Perdagangan Luar Negeri melalui kebijakan dan pengendalian di bidang Ekspor dan Impor.

Kegiatan ekspor dan impor dapat mempengaruhi neraca perdagangan. Keseimbangan yang positif dikenal sebagai surplus perdagangan jika terdiri dari ekspor lebih besar dari impor begitupun sebaliknya, Jika nilai ekspor lebih kecil dibandingkan nilai impor maka keseimbangan akan negatif. Keadaan tersebut dikenal sebagai defisit perdagangan. Agar hal tersebut tidak terjadi maka pemerintah selalu berusaha mendorong melalui kebijakan ekspor dengan cara antara lain :

a. Diversifikasi Ekspor/Menambah Keragaman Barang Ekspor

Diversifikasi ekspor merupakan penganekaragaman barang ekspor dengan memperbanyak macam dan jenis barang yang diekspor.

b. Subsidi Ekspor

Subsidi ekspor diberikan dengan cara memberikan subsidi/bantuan kepada eksportir dalam bentuk keringanan pajak, tarif angkutan yang murah dan kemudahan dalam mengurus ekspor.

c. Insentif Ekspor

Untuk lebih menggiatkan dan mendorong para produsen dan eksportir, pemerintah dapat memberikan premi atau insentif, misalnya penghargaan atas kualitas barang yang diekspor.

d. Meningkatkan Promosi Dagang ke Luar Negeri

Pemasaran suatu produk dapat ditingkatkan dengan mempromosikan produk yang akan dijual. Untuk meningkatkan ekspor ke luar negeri maka pemerintah dapat berusaha dengan melakukan promosi dagang ke luar negeri, misalnya dengan mengadakan pameran dagang di luar negeri agar produk dalam negeri lebih dapat dikenal.

Selain mendorong ekspor, pemerintah perlu juga mengendalikan impor. Agar tidak merugikan produk dalam negeri diperlukan adanya kebijakan impor untuk melindungi produk dalam negeri (proteksi) dengan cara berikut :

d.1. Pengenaan Bea Masuk

Barang impor yang masuk ke dalam negeri dikenakan bea masuk yang tinggi sehingga harga jual barang impor menjadi mahal. Hal ini dapat mengurangi hasrat masyarakat membeli barang impor dan produk dalam negeri dapat bersaing dengan produk impor.

d.2. Kuota Impor

Kuota impor merupakan suatu kebijakan untuk membatasi jumlah barang impor yang masuk ke dalam negeri. Dengan dibatasinya jumlah produk impor mengakibatkan harga barang impor tetap mahal dan produk dalam negeri dapat bersaing dan laku di pasaran.

d.3. Substitusi Impor

Kebijakan mengadakan substitusi impor ditujukan untuk mengurangi ketergantungan terhadap luar negeri dengan mendorong produsen dalam negeri agar dapat membuat sendiri barang-barang yang diimpor dari luar negeri.

4. Meningkatkan Pelayanan kepada Masyarakat dan Dunia Usaha

Dalam mendukung Pelayanan kepada Masyarakat dan Dunia Usaha, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi telah menerapkan Standar Prosedur Operasi/*Standard Operating Procedures* (SOP) yang merupakan pedoman atau acuan untuk melaksanakan tugas pekerjaan sesuai dengan fungsi dan alat penilaian kinerja instansi pemerintah.

Dalam mendukung *good governance* dilakukan pula peningkatan kinerja keuangan dan *performance* organisasi. Pada tahun 2015, berdasarkan hasil pemeriksaan BPK atas laporan keuangan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi tidak termasuk yang terkoreksi dan mendapat nilai baik. Sedangkan dalam penilaian atas akuntabilitas kinerja pada tahun 2014, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi memperoleh nilai 84,85 dengan predikat penilaian € A € atas hasil evaluasi Inspektorat Provinsi Jambi terhadap Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi sebagaimana dipertegas dalam Surat Inspektur Inspektorat Provinsi Jambi Nomor S-700/114/ITPROV-1.1/VIII/2015 tanggal 31 Agustus 2015.

4.2.2. Sasaran

Kondisi sektor industri dan perdagangan pada lima tahun yang akan datang tidak bisa dilepaskan dari keadaan perekonomian dalam negeri saat ini dan proyeksinya untuk lima tahun mendatang. Seperti telah dijelaskan sebelumnya, ada keinginan kuat untuk lebih meningkat peran industri terutama industri kecil dan menengah di semua cabang industri serta peran perdagangan. Untuk itu diharapkan terjadinya peningkatan peran industri dan perdagangan mulai tahun 2016 sampai tahun 2021.

Untuk mewujudkan pencapaian tujuan diatas, maka perlu dirumuskan sasaran-sasaran yang sifatnya kuantitatif sehingga mudah untuk diukur keberhasilan pencapaiannya. Adapun sasaran pembangunan sektor industri dan perdagangan yang ingin diwujudkan selama tahun 2016-2021 adalah sebanyak 4 sasaran yaitu :

1. *Tumbuh dan berkembangnya sektor industri*

Tumbuh dan berkembangnya sektor industri selain sebagai sektor penggerak utama peningkatan nilai tambah komoditi primer utama Provinsi Jambi juga sebagai pendukung penggerak utama perekonomian daerah. Fasilitasi pengembangan, penyebaran dan penguatan daya saing industri daerah menjadi sasaran yang sangat penting dan krusial. Untuk itu peran pemerintah daerah dalam memfasilitasi penumbuhan sektor industri khususnya penumbuhan wirausaha baru menjadi perhatian utama.

Adapun indikator kinerja sasaran strategis 1 yaitu :

1. Kontribusi sektor industri terhadap PDRB
2. Pertumbuhan sektor industri
3. Persentase peningkatan usaha industri
4. Persentase peningkatan tenaga kerja industri

2. *Tumbuh dan Berkembangnya Perdagangan Dalam Negeri*

Sistem distribusi perdagangan dalam negeri yang efisien akan nyata berpengaruh pada daya saing produk dari sentra produksi ke pusat-pusat pemasaran di dalam maupun diluar daerah. Untuk itu upaya-upaya dalam rangka mengendalikan inflansi, perluasan akses pasar produk baik produk industri maupun non industri dan pengembangan sarana perdagangan menjadi lebih krusial.

Pengamanan perdagangan juga dapat menjadikan instrument untuk mengembangkan ekonomi lokal. Tindakan pengamanan perdagangan perlu disenergikan dengan tindakan Aku Cinta Produk Lokal dan Gerakan Konsumen Cerdas akan memacu potensi ekonomi lokal menjadi pesat berkembang,

Adapun indikator kinerja sasaran strategis 2 yaitu :

1. Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB
2. Pertumbuhan sektor perdagangan
3. Persentase peningkatan usaha perdagangan

3. Meningkatkan Ekspor Daerah dan Terkendalinya Impor

Ekspor dan Impor merupakan salah satu komponen utama dalam PDRB Provinsi Jambi. Aktivitas pengembangan ekspor daerah perlu digenjot guna untuk mengatasi defisit neraca perdagangan daerah yang dapat berpengaruh negatif pada perekonomian nasional khususnya daerah. Pemerintah dan pelaku usaha harus bersinergis untuk mendorong ekspor komoditi unggulan daerah yang potensial untuk dikembangkan. Sehingga dapat berkontribusi pada perekonomian melalui pertambahan nilai ekspor.

Selanjutnya pengendalian impor perlu dilakukan untuk masuknya barang-barang konsumsi yang tidak layak dan berbahaya bagi konsumen juga kaitannya dengan pengamanan produk-produk dalam negeri dari persaingan yang tidak sehat akibat masuknya produk serupa dari luar negeri yang masal dan kualitasnya tidak dapat terjamin.

Pembinaan perdagangan lintas batas menjadi salah satu fokus lokasi pengembangan ekspor dan pengendalian impor karena di daerah ini berbagai masalah berkaitan dengan perdagangan ilegal yang sering muncul. Pengendalian Impor dapat dikendalikan dengan instrumen penerbitan Angka Pengenal Impor (API) dan pemantauan masuknya barang-barang impor melalui koordinasi dengan instansi terkait.

Pengembangan ekspor dan pengendalian impor di Provinsi Jambi harus didukung dengan institusi daerah yang memberikan pelayanan kepada dunia usaha terhadap pemberlakuan standarisasi dunia.

Adapun indikator kinerja sasaran strategis 3 yaitu :

1. Persentase peningkatan nilai ekspor non migas
2. Persentase penurunan nilai impor

4. Meningkatkan kualitas kinerja pelayanan eksternal dan internal organisasi

Peningkatan kualitas kinerja pelayanan eksternal dan internal organisasi adalah salah satu faktor pendukung pencapaian sasaran strategis lainnya. Pembinaan kemampuan dan kompetensi disiplin pegawai menjadi prioritas utama untuk mendapat hasil kinerja yang optimal. Disperindag Provinsi Jambi bersama dengan UPTD dibawahnya yang langsung bergerak pada pelayanan dunia usaha dan masyarakat harus didukung dengan peningkatan kompetensi aparatur yang profesional dan responsif terhadap dinamika di dunia usaha dan masyarakat. Tidak saja sistem manajemen kepegawaian yang baik,

fasilitas kerja yang memadai sesuai dengan standar sarana dan prasarana kerja harus disediakan termasuk mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi melalui penyediaan infrastruktur dan jaringan yang mendukung seluruh pelaksanaan kegiatan Dinas.

Hal lain yang tak kalah penting adalah perencanaan. Perencanaan kerja yang baik akan sangat membantu pencapaian kinerja yang telah ditetapkan. Demikian juga pengelolaan keuangan negara dimana pengelolaan keuangan negara yang baik dilakukan secara tertib, taat pada peraturan perundangan yang berlaku dikelola secara ekonomis, efisien, efektif, transparan dan bertanggung jawab. Segala sesuatu pelaksanaan kegiatan diperlukan adanya monitoring dan evaluasi sehingga lebih tepat dan berdaya guna.

Adapun indikator kinerja sasaran 4 yaitu :

1. Persentase layanan administrasi kantor dan layanan jasa yang sesuai dengan SOP
2. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap beberapa pelayanan jasa

Tabel 4.1.
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah
Pelayanan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi 2016 - 2021

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran		Kondisi Awal	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun Ke -					
						2016	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Meningkatkan daya saing industri guna mendukung perekonomian daerah	Tumbuh dan Berkembangnya Sektor Industri	1	Kontribusi sektor industri terhadap PDRB (%)	11,05	11,50	11,60	11,70	11,80	11,90	12,00
			2	Pertumbuhan sektor Industri (%)	2,33	2,5	2,7	2,9	3,1	3,3	3,5
			3.	Persentase peningkatan usaha industri (%)	28.075 unit	4	4	4	4	4	4
			4	Persentase peningkatan tenaga kerja industri (%)	111.390 orang	5	5	5	5	5	5
2.	Meningkatkan stabilitas harga dan penguatan pangsa pasar yang terintegrasi dengan pasar dalam negeri	Tumbuh dan berkembangnya perdagangan dalam negeri	1	Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB (%)	11,12	11,50	11,65	11,80	11,95	12,10	12,25
			2	Pertumbuhan sektor perdagangan (%)	11,02	11,50	11,60	11,70	11,80	11,90	12,00
			3	Persentase peningkatan usaha perdagangan (%)	85.357 unit	7	7	7	7	7	7
3.	Meningkatkan perdagangan luar negeri yang berkualitas	Meningkatnya ekspor daerah dan terkendalinya impor	1	Persentase nilai ekspor non migas (%)	US \$ 930,09 juta	10	10	10	10	10	10
			2	Persentase nilai impor (%)	US \$ 109,03 juta	5	5	5	5	5	5
4.	Meningkatkan pelayanan masyarakat dan dunia usaha	Meningkatnya kualitas kinerja pelayanan eksternal dan internal organisasi	1	Persentase layanan administrasi kantor dan layanan jasa yang sesuai dengan SOP (%)	70%	75	80	85	90	95	100
			2	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap beberapa pelayanan jasa (%)	74%	75	75,2	75,4	75,6	75,8	76

4.2. Strategi dan Kebijakan Disprindag Provinsi Jambi

4.2.1. Strategi

Untuk mencapai tujuan dan sasaran Renstra diperlukan strategi. Strategi adalah langkah-langkah yang berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Rumusan strategi merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana sasaran akan dicapai yang diperjelas dengan serangkaian kebijakan.

Perumusan strategi adalah proses yang kompleks dimana tujuan-tujuan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi yang merupakan *resultante* dari wewenang, misi, visi, maupun nilai-nilai yang akan diserap dan diracik menjadi strategi-strategi yang objektif. Strategi yang telah dirancang tersebut selanjutnya diuraikan dalam berbagai kebijakan. Selanjutnya, masing-masing kebijakan diformulasikan ke dalam program-program.

Berdasarkan analisis terhadap faktor-faktor internal dan eksternal yang telah diidentifikasi, ditetapkanlah strategi pembangunan industri dan perdagangan yang merupakan arah yang akan dilaksanakn untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan Strategi yang ditempuh untuk mewujudkan visi dan misi adalah sebagai berikut :

1. Strategi Sektor Industri

- a. Menumbuh kembangkan Industri Kecil dan Menengah (IKM) berbasis bahan baku local
- b. Penguatan Struktur Industri Berbasis kawasan, sumber daya local yang berkelanjutan
- c. Mendorong sinergi kebijakan dari sektor-sektor pembangunan lainnya dalam mendukung pembangunan industri daerah dan nasional

2. Strategi Sektor Perdagangan

- a. Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri
- b. Meningkatkan Kelancaran Distribusi Barang Pokok dan Barang Strategis
- c. Penataan usaha perdagangan dan pengembangan usaha baru
- d. Meningkatkan sistem perdagangan yang tertib niaga dan berdaya saing dalam rangka perlindungan konsumen.
- e. Mempertahankan pasar yang ada dan mengembangkan pasar baru dengan pelaku dan komoditi ekspor berbasis potensi daerah yang berdaya saing serta upaya mengendalikan impor.

3. Strategi Pelayanan Industri dan Perdagangan

Membangun jejaring sinergitas pembangunan industri dan perdagangan baik di pusat dan di daerah yang didukung dengan tersedianya data, SDM, sarana dan prasana yang memadai

4.2.2. Kebijakan

Kebijakan merupakan pedoman pelaksanaan tindakan-tindakan tertentu untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Dalam menentukan kebijakan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi telah menetapkan beberapa kebijakan pembangunan untuk lima tahun kedepan yaitu :

1. Kebijakan Sektor Industri

- a. Mendorong IKM melalui pendampingan, pelatihan kewirausahaan, pelatihan teknis dan manajerial serta promosi IKM
- b. Penyediaan informasi Pengolahan komoditi dan pasar terutama industri pengolahan yang berbasis bahan baku lokal, sumberdaya setempat.
- c. Mendukung industri yang memberi nilai tambah komoditi utama yang potensi daerah melalui pendekatan kewilayaan.

2. Kebijakan Sektor Perdagangan

- a. Mendorong integrasi aktifitas perekonomian dan terbangunnya kesadaran penggunaan produk dalam negeri
- b. Memperkuat rantai suplay dan pasokan barang komestik terutama bagi bahan kebutuhan pokok
- c. Meningkatkan perdagangan antar wilayah/daerah
- d. Mendorong berkembangnya lembaga perdagangan yang efektif dan persaingan usaha yang sehat
- e. Mendorong upaya-upaya perluasan jenis komoditi dan tujuan pasar ekspor yang berkelanjutan ditunjang dengan pemantauan dan pengawasan atas impor daerah

3. Kebijakan Pelayanan Industri dan Perdagangan

- a. Mendorong upaya-upaya perluasan jenis komoditi dan tujuan pasar ekspor yang berkelanjutan ditunjang dengan pemantauan dan pengawasan atas impor daerah
- b. Penguatan SDM aparatur serta peningkatan Kualitas kinerja pelayanan internal dan eksternal yang berkelanjutan

Hubungan hirarkis antara visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan pembangunan Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi dapat dilihat pada tabel 4.2. berikut ini :

Tabel 4.2.
Hubungan hirarki antara Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

Visi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provonsi Jambi 2016-2021 € TERWUJUDNYA INDUSTRI DAN PERDAGANGAN YANG TANGGUH, BERKEADILAN DAN BERDAYA SAING €			
Mengembangkan Sektor Industri Berbasis Unggulan Daerah			
N	SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN
Daya Guna	Tumbuh dan Berkembangnya Sektor Industri	1 Menumbuh kembangkan Industri Kecil dan Menengah (IKM) berbasis bahan baku lokal	1 Mendorong IKM melalui pendampingan, pelatihan kewirausahaan, pelatihan teknis dan manajerial serta promosi IKM.
		2 Penguatan Struktur Industri Berbasis kawasan, sumber daya local yang berkelanjutan	2. Penyediaan informasi Pengolahan komoditi dan pasar terutama industri pengolahan yang berbasis bahan baku local, sumberdaya setempat.
		3 Mendorong sinergi kebijakan dari sektor-sektor pembangunan lainnya dalam mendukung pembangunan industri daerah dan nasional	3. Mendukung industri yang memberi nilai tambah komoditi utama yang potensi daerah melalui pendekatan kewilayaan.
Meningkatkan Peranan Perdagangan Dalam dan Luar Negeri			
n n ar grasi ar ri	Tumbuh dan Berkembangnya Perdagangan Dalam Negeri	1. Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	1 Mendorong integrasi aktifitas perekonomian dan terbangunnya kesadaran penggunaan produk dalam negeri
		2. Kelancaran Distribusi Barang Pokok dan Barang penting lainnya.	2. Memperkuat rantai suplay dan pasokan barang kometik terutama bagi bahan kebutuhan pokok
		3. Penataan usaha perdagangan dan pengembangan usaha baru	3. Meningkatkan perdagangan antar wilayah/daerah
		4. Peningkatkan Pelaksanaan sistem tata niaga dalam rangka perlindungan konsumen	4. Mendorong berkembangnya lembaga perdagangan yang efektif dan sehat 5. Mendorong Terlaksananya pengawasan perlindungan konsumen dan tertib niaga.

an an	Meningkatkan Ekspor Daerah dan Terkendalnya Impor	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mempertahankan pasar yang ada dan memperluas pasar Ekspor (Penetrasi). 2. Peningkatan komoditi ekspor berbasis potensi daerah yang berdaya saing. 3. Pengendalian Produk impor 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mendorong upaya perluasan jenis komoditi dan tujuan pasar ekspor yang berkelanjutan. 2. Mendorong peningkatan Kualitas dan kuantitas produk Ekspor. 3. Mendorong dan Menumbuhkan Eksportir Baru. 4. Pemantauan dan pengawasan atas impor daerah.
Meningkatkan Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi dan Pelayanan Publik Dalam Urusan Industri dan perdagangan			
ha	Meningkatkan Kualitas Kinerja Pelayanan Eksternal dan Internal Organisasi	Membangun jejaring sinergitas pembangunan industri dan perdagangan baik di pusat dan di daerah yang didukung dengan tersedianya data, SDM, sarana dan prasarana yang memadai	<ol style="list-style-type: none"> 1 Meningkatkan intensitas koordinasi dan konsultasi pengembangan indag dengan instansi terkait baik di pusat dan di daerah 2. Penguatan SDM aparatur serta peningkatan Kualitas kinerja pelayanan internal dan eksternal yang berkelanjutan,

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN



**DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROVINSI JAMBI**

BAB V

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

Bab 5 Berisi :

5.1. Rencana Program dan Kegiatan

5.2. Indikator Kinerja dan Pendanaan

*R*encana Program/Kegiatan, serta Indikator Kinerja dan Pendanaan yang disusun didalam Rencana Strategis Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi bersifat indikatif. Dalam hal ini disusun demikian mengingat paradigma pembangunan 5 (lima) tahunan tentunya tidak akan berjalan statis, tetapi akan mengalami dinamisasi seiring dengan semakin berkembangnya permasalahan pembangunan. Kondisi demikian membutuhkan beberapa penyesuaian didalam penetapan rencana program, kegiatan, indikator kinerja maupun pendanaan khususnya didalam proses perencanaan pembangunan di Provinsi Jambi yang dalam hal ini adalah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi.

5.1. Rencana Program dan Kegiatan

Rencana program/kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi disusun berdasarkan ketentuan dan aturan yang tertuang didalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Lebih dari itu rencana program/kegiatan disusun berdasarkan kewenangan, serta tugas pokok dan fungsi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi yang

berfungsi antara lain sebagai institusi penyelenggara urusan pemerintahan dan pelayanan Umum dibidang Perindustrian dan Perdagangan.

Adapun rencana program/kegiatan pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi Tahun 2016 € 2021 adalah sebagai berikut :

Program Rutin/Penunjang antara lain :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, kegiatan yang dilaksanakan antara lain :

1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
3. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
4. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
5. Penyediaan Alat Tulis Kantor
6. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
7. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor
8. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
9. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
10. Penyediaan Makanan dan Minuman
11. Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, kegiatan yang dilaksanakan antara lain :

1. Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional
2. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
3. Pengadaan Meubeler
4. Pengadaan Komputer
5. Pemeliharaan Rutin /Berkala Gedung Kantor
6. Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
7. Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung Kantor
8. Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor

3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur, kegiatan yang dilaksanakan antara lain :

1. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya

4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, kegiatan yang dilaksanakan antara lain :

1. Pendidikan dan Pelatihan Formal

2. Pembinaan Jasmani dan Rohani
5. **Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan SKPD**, kegiatan yang dilaksanakan antara lain :
 1. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
 2. Penyusunan Laporan Keuangan dan Inventarisasi Aset
 3. Penyusunan Laporan Pengelolaan Kepegawaian
 4. Pengembangan Sarana Informasi yang Dapat Di Akses Masyarakat
 5. Penyusunan Rencana Kerja SKPD
 6. Monitoring dan Evaluasi Program / Kegiatan SKPD
6. **Program Sinkronisasi Perencanaan dan Penganggaran SKPD**, kegiatan yang dilaksanakan antara lain :
 1. Penyusunan Rencana Kerja SKPD
 2. Monitoring dan Evaluasi Program /Kegiatan SKPD

Program Pilihan/Prioritas antara lain :

1. Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah

Program ini bertujuan untuk mengembangkan IKM dengan kinerja yang efisien dan kompetitif serta memiliki ketergantungan rendah terhadap bahan baku impor. Adapun kegiatan yang akan dilaksanakan antara lain :

1. Pelatihan Pengolahan Aneka Makanan Unggulan Daerah
2. Peningkatan SDM Industri Kecil dan Menengah
3. Promosi industri Kecil Regional dan Lokal
4. Penguatan Kelembagaan Industri Kecil
5. Pengembangan Rumah Tenun Jambi
6. Pengembangan Perajin Unit Promosi Jambi
7. Peningkatan Kualitas Aneka Produk Industri Kecil
8. Pengembangan Desain Kerajinan Berbasis Budaya Daerah
9. Pengembangan Sentra Usaha Industri Kecil
10. Temu Bisnis Pelaku IKM
11. Pendataan IKM se Provinsi Jambi
12. Sosialisasi dan Penerapan Mutu Produksi GMP dan HAKI
13. Bimbingan Teknis Pengelolaan Limbah Industri
14. Konvensi Gugus Kendali Mutu Tingkat Provinsi

2. Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri

Program ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan IKM dalam penerapan teknologi dan pengembangan rekayasa teknologi. Adapun kegiatan yang akan dilaksanakan antara lain :

1. Pengembangan Teknologi Industri Tepat Guna
2. Pelatihan Peningkatan Mutu Produk Industri Berbasis Teknologi

3. Program Pengembangan Industri Agro dan Kimia

Program ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan IKM dalam pengembangan industri agro dan kimia. Adapun kegiatan yang akan dilaksanakan antara lain :

1. Pengawasan Teknis Pengembangan AMDK dan Kompon
2. Peningkatan SDM Industri Menengah dan Besar
3. Sosialisasi Pengolahan Industri Berbasis Agro
4. Penguatan Kelembagaan Industri Menengah dan Besar
5. Pelatihan Aneka Hilirisasi Industri Agro dan Kimia
6. Partisipasi Pada Pameran Industri Menengah dan Besar
7. Penyusunan Rencana Induk Pembangunan Industri Provinsi (RIPIP) Jambi
8. Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Industri Agro, Kimia, Mesin dan Logam
9. Pengawasan Teknis Pengembangan Industri Menengah dan Besar
10. Updating Industri Menengah dan Besar se Provinsi Jambi

4. Program Peningkatan Daya Saing Kewirausahaan Industri Kecil dan Menengah.

Program ini bertujuan untuk menumbuhkan dan mengembangkan wirausaha € wirausaha IKM baru serta memperkuat kemampuan wirausaha IKM agar menjadi wirausaha yang mandiri dan professional. Adapun kegiatan yang akan dilaksanakan antara lain :

1. Pengembangan dan Pembinaan Wirausaha Baru Industri Kecil
2. Pelatihan TOT bagi Aparat Pembina IKM
3. Pengembangan One Village One Product (OVOP)
4. Pelatihan Kewirausahaan IKM Potensial

5. Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan

Program ini bertujuan meningkatkan tertib tata niaga, tertib ukur dan kepastian berusaha dalam rangka perlindungan konsumen dan pengawasan barang dan jasa yang beredar di pasaran. Adapun kegiatan yang akan dilaksanakan antara lain :

1. Pengawasan Barang Beredar dan Jasa
2. Pengembangan dan Pembinaan BPSK

3. Survey IKM atas Pelayanan Tera/Tera Ulang Alat UTTP
4. Monitoring Barang yang Kadaluarsa di Pasaran
5. Sosialisasi Kebijakan Perlindungan Konsumen
6. Sosialisasi Kebijakan Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga
7. Survey Indeks Kepuasan Masyarakat atas Perlindungan Konsumen
8. Identifikasi Tertib Niaga

6. Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri

Program ini bertujuan untuk mewujudkan efisiensi dan efektifitas sistem distribusi barang dan jasa guna menjamin pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat. Adapun kegiatan yang akan dilaksanakan antara lain :

1. Pengembangan Pasar Lelang Daerah dan Sistem Resi Gudang
2. Penguatan Kelembagaan Usaha dagang Kecil Informal
3. Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri
4. Penyelenggaraan Pasar Murah
5. Pengolahan Data SIUP dan TDP
6. Pemantauan DAK Sarana Perdagangan
7. Pemantauan Bahan Pokok di Tingkat Distributor dan Pasar Tradisional
8. Pendataan Sarana Perdagangan dan Pedagang Informal

7. Program Peningkatan dan Pengembangan Perdagangan Luar Negeri

Program ini bertujuan meningkatkan ekspor non migas Provinsi Jambi baik volume maupun nilai ekspor. Adapun kegiatan yang akan dilaksanakan antara lain :

1. Peningkatan SDM Perdagangan Luar Negeri
2. Pameran Perdagangan Luar Negeri
3. Forum Koordinasi Peningkatan Kinerja Ekspor Daerah
4. Pemantauan dan Pengendalian Impor Daerah
5. Pelatihan Ekspor Bagi IKM dan UMKM
6. Pengawasan terhadap SKA dan API yang diterbitkan
7. Survey Indeks Kepuasan Masyarakat atas pelayanan penerbitan SKA Ekspor
8. Sosialisasi Peraturan dan Kebijakan Ekspor dan Impor
9. Temu Bisnis antara Produsen, Eksportir dan Importir

8. Program Pengembangan Standarisasi Nasional

Program ini bertujuan untuk memberikan jasa pelayanan Laboratorium pengujian mutu barang ekspor-impor. Hasil yang diharapkan komoditi ekspor sesuai dengan SNI, produk ekspor dapat bersaing dipasar internasional/Global dan Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Adapun kegiatan yang akan dilaksanakan antara lain :

1. Pengembangan Infrastruktur Kelembagaan Standarisasi

2. Peningkatan Kapasitas Lab. Penguji Mutu barang Ekspor dan Impor
3. Sosialisasi laboratorium Kalibrasi yang sudah Terakreditasi
4. Penambahan Peralatan dan Bahan Uji serta Perawatan laboratorium
5. Peningkatan SDM Petugas Kalibrasi BPSMB
6. Survei Indeks Kepuasan Masyarakat atas Pelayanan Lab. Kalibrasi dan Lab. Pengujian

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Program dan Kegiatan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi Tahun 2016 € 2021 dapat dilihat pada tabel 5.1. sebagai berikut :

**Tabel 5.1 Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Program dan Kegiatan
Pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi Tahun 2016 € 2021**

No.	Program / Kegiatan		Indikator dan Tolak Ukur Kinerja			
			Capaian Program	Output / Keluaran	Outcome / Hasil	Kelompok Sasaran
1.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran			
	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	sda	Jumlah surat keluar pertahun	Kelancaran informasi melalui surat menyurat	Surat menyurat
	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan Listrik	sda	Periode pembayaran rekening listrik, telpon, PAM dan Internet	Kelancaran sarana komunikasi dan penunjang	Listrik, telpon, PAM dan Internet
	3	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	sda	Jumlah tenaga administrasi keuangan	Kelancaran pelayanan administrasi keuangan	Pengelola administrasi keuangan
	4	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	sda	Periode pemakaian jasa kebersihan kantor	Terjaganya kebersihan dan kenyamanan kantor	Peralatan, perlengkapan dan petugas kebersihan
	5	Penyediaan Alat Tulis kantor	sda	Jumlah jenis alat tulis kantor	Kelancaran kegiatan organisasi	Alat tulis kantor
	6	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	sda	Jumlah barang cetakan dan penggandaan	Kelancaran kegiatan organisasi	Barang cetakan dan penggandaan
	7	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	sda	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan Kantor	Kelancaran sarana penerangan bangunan kantor	Alat listrik dan penerangan bangunan kantor
	8	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	sda	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor	Terjaganya keamanan bekerja bagi aparatur	Peralatan dan perlengkapan kantor
	9	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	sda	- Jumlah bahan bacaan dan Peraturan Perundang-undangan - Periode pengelolaan perpustakaan Disperindag	Peningkatan pengetahuan dan wawasan aparatur	Bahan bacaan dan Peraturan Perundang-undangan serta pengelola perpustakaan
	10	Penyediaan Makanan dan Minuman	sda	Jumlah peserta rapat/ pertemuan	Penunjang kelancaran rapat/ pertemuan	Peserta rapat
	11	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	sda	Jumlah aparatur yang mengikuti rapat koordinasi dan konsultasi	Terjalannya sinergisitas dan sinkronisasi tugas dengan pihak terkait	Instansi terkait, stakeholder, aparatur Disperindag
2.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		Persentase Peningkatan sarana dan prasarana yang memadai bagi aparatur			
	1	Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional	sda	Jumlah pengadaan kendaraan dinas/operasional	Kelancaran kegiatan organisasi	Kendaraan dinas/operasional roda 2 dan 4
	2	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	sda	Jumlah pengadaan peralatan gedung kantor	Kelancaran kegiatan organisasi	Peralatan gedung kantor
	3	Pengadaan Mebeleur	sda	Jumlah pengadaan peralatan meubeler	Kelancaran kegiatan organisasi	Peralatan meubeler

	4	Pengadaan Komputer	sda	Jumlah pengadaan peralatan komputer	Kelancaran kegiatan organisasi	Peralatan dan perlengkapan komputer
	5	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	sda	Jumlah pemeliharaan gedung kantor	Kelancaran kegiatan organisasi	Petugas keamanan, asset dan lingkungan kantor
	6	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional	sda	Jumlah pemeliharaan kendaraan dinas/operasional	Kelancaran kegiatan organisasi	Kendaraan dinas / operasional
	7	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung kantor	sda	Jumlah pemeliharaan peralatan elektronika	Kelancaran kegiatan organisasi	Peralatan elektronika dan mesin
	8	Rehabilitasi Sedang / Berat Gedung Kantor	sda	Jumlah rehab dan penambahan gedung kantor	Berkurangnya kerusakan dan penambahan gedung kantor	Peralatan dan perlengkapan gedung kantor
3.	Program Peningkatan Disiplin Aparatur		Persentase peningkatan kinerja dan disiplin aparatur			
	1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	sda	Jumlah pengadaan pakaian dinas harian dan perlengkapannya	Peningkatan penampilan dan motivasi kerja aparatur	Aparatur Disperindag Prov. Jambi
4.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		Persentase Peningkatan Kapasitas sumber daya aparatur yang berkualitas dibidangnya			
	1	Pendidikan dan Pelatihan Formal	sda	Jumlah Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis yang diikuti	Meningkatnya wawasan dan pengetahuan aparatur	Aparatur Disperindag Prov. Jambi
	2	Pembinaan Jasmani dan Rohani	sda	Jumlah pelaksanaan senam dan pembinaan rohani	Meningkatkan kebugaran dan keimanan aparatur	Aparatur Disperindag Prov. Jambi
5.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		Persentase Nilai SAKIP			
	1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja	sda	- Jumlah Laporan Realisasi Capaian Kinerja Program dan Kegiatan - Jumlah Aparatur perencanaan yang ditingkatkan kompetensinya	Ketersediaan laporan capaian kinerja program dan kegiatan	Dokumen dan Laporan capaian kinerja
	2	Penyusunan Laporan Keuangan dan Neraca Aset	sda	- Jumlah Laporan Keuangan dan Neraca Aset - Jumlah Aparatur keuangan dan asset yang ditingkatkan kompetensinya	Ketersediaan laporan kinerja keuangan dan aset	Dokumen capaian kinerja keuangan dan asset
	3	Penyusunan Laporan Pengelolaan Kepegawaian	sda	- Jumlah Laporan pengelolaan kepegawaian - Jumlah Aparatur kepegawaian yang ditingkatkan kompetensinya	Ketersediaan laporan kinerja kepegawaian	Dokumen capaian kinerja kepegawaian

	4	Pengembangan Sarana Informasi yang dapat diakses Masyarakat	sda	Periode Informasi perkembangan industri dan perdagangan Disperindag Provinsi Jambi melalui webside	Ketersediaan Informasi perkembangan industri dan perdagangan	Data , perangkat . jaringan dan pengelola website
	5.	Penyusunan Rencana Kerja SKPD	sda	- Jumlah Rencana Kerja selama 1 Tahun - Jumlah Rapat Sinkronisasi Program dan Kegiatan Tahunan	Ketersediaan rencana program dan kegiatan sebagai acuan dalam melaksanakan tupoksi	Dokumen rencana kerja program dan kegiatan
	6.	Monitoring dan Evaluasi Program / Kegiatan SKPD	sda	Periode Monitoring dan Evaluasi Program dan kegiatan yang telah dan sedang dilaksanakan	Termonitornya dan terevaluasinya pelaksanaan program dan kegiatan	Data program dan kegiatan, yang sudah dan akan dilaksanakan
6.	Program Sinkronisasi Perencanaan dan Penganggaran SKPD		Persentase Penyediaan Informasi Rencana Kerja dan Penganggaran			
	1	Penyusunan Rencana Kerja SKPD	sda	- Jumlah Rencana Kerja selama 1 Tahun - Jumlah Rapat Sinkronisasi Program dan Kegiatan Tahunan	Ketersediaan rencana program dan kegiatan sebagai acuan dalam melaksanakan tupoksi	Dokumen rencana kerja program dan kegiatan
	2	Monitoring dan Evaluasi Program / Kegiatan SKPD	sda	Periode Monitoring dan Evaluasi Program dan kegiatan yang telah dan sedang dilaksanakan	Termonitornya dan terevaluasinya pelaksanaan program dan kegiatan	Data program dan kegiatan, yang sudah dan akan dilaksanakan
7.	Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah		Persentase peningkatan usaha Industri Kecil dan Menengah			
	1	Pelatihan Pengolahan Aneka Makanan Unggulan Daerah	sda	Jumlah perajin IK yang mengikuti pelatihan pengolahan aneka makanan	Bertambahnya wawasan dan ketrampilan IK makanan	Aneka makanan unggulan daerah
	2	Peningkatan SDM Industri Kecil dan Menengah	sda	Jumlah perajin IKM yang mengikuti pelatihan peningkatan SDM	Meningkatnya kompetensi SDM pelaku IKM peserta pelatihan	Pelaku IKM dan aparatur pembina
	3	Promosi industri Kecil Regional dan Lokal	sda	- Jumlah promosi Industri Kecil dan Kerajinan yang diikuti - Jumlah IKM yang difasilitasi mengikuri pameran	Meningkatnya pendapatan dan transaksi pasar	Pelaku IKM peserta pameran
	4	Penguatan Kelembagaan Industri Kecil	sda	Jumlah bantuan peralatan/mesin yang diberikan kepada industri kecil	Lancarnya kegiatan industri di sentra industri potensial	Sentra-sentra industry kecil potensial di Kab/Kota
	5	Pengembangan Rumah Tenun Jambi	sda	- Jumlah perajin tenun yang dibina dan dikembangkan - Periode fasilitasi sarana dan prasarana rumah tenun	Meningkatkan kompetensi dan keahlian perajin tenun di Provinsi Jambi	Perajin tenun
	6	Pengembangan Perajin Unit Promosi Jambi	sda	- Jumlah perajin unit promosi yang Dibina dan dikembangkan - Jumlah MUSDA Dewan Kerajinan	Peningkatan pengetahuan, wawasan dan ketrampilan pembina serta pengrajin dalam pengelolaan usahanya	Perajin unit promosi dan Pembina Dewan Kerajinan Nasional Daerah

				- Jumlah Rakor Dewan Kerajinan		
	7	Peningkatan Kualitas Aneka Produk Industri Kecil	sda	- Jumlah pelatihan peningkatan kualitas aneka produk IK - Jumlah produk IK yang ditingkatkan kualitasnya	Meningkatnya kualitas aneka produk IK	Produk industri kecil
	8	Pengembangan Desain Kerajinan Berbasis Budaya Daerah	sda	- Jumlah Lomba Desain Motif hasil kerajinan IK Batik dan peragaan busana batik Jambi, Kab/Kota - Penyusunan katalog Warna Batik hasil kerajinan IK Batik dan HAKI - Jumlah pemenang desain cendramata	Meningkatnya pengetahuan SDM Industri kecil tentang desain kerajinan berbasis budaya daerah	Produk industri kecil
	9	Pengembangan Sentra Usaha Industri Kecil	sda	Jumlah sentra industri kecil yang dibina	Berkembangnya sentra-sentra industri kecil potensial	Sentra-sentra industri kecil potensial di Kab/Kota
	10	Temu Bisnis Pelaku IKM	sda	Jumlah pelaku IKM yang mengikuti Temu Bisnis	Terjalinya kemitraan antar sesama pelaku IKM	Pelaku IKM
	11	Pendataan IKM se Provinsi Jambi	sda	- Jumlah lokasi pendataan - Periode identifikasi produk unggulan	Tersedianya data pendataan IKM se Provinsi Jambi	Data IKM Kab/Kota se Provinsi Jambi
	12	Sosialisasi dan Penerapan Mutu Produksi GMP dan HAKI	sda	Jumlah pelaku IKM yang mengikuti sosialisasi	Bertambahnya wawasan dan pengetahuan IKM dalam Penerapan Mutu Produksi GMP dan HAKI	Pelaku IKM dan aparat pembina
	13	Bimbingan Teknis pengelolaan limbah industri	sda	Jumlah pelaku IKM yang mendapat bimbingan teknis dan magang limbah industri	Tersediannya produk industri yang ramah lingkungan	Pelaku IKM dan aparat pembina
	14	Konvensi Gugus Kendali Mutu Tingkat Provinsi	sda	Jumlah GKM-IKM dan Fasilitator berprestasi Provinsi Jambi yang terpilih mewakili di Tingkat Nasional	Terpilainya GKM- IKM dan Fasilitator berprestasi dalam pengembangan GKM di Provinsi Jambi	Pelaku GKM dan IKM
8.	Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri		Persentase peningkatan SDM IMB yang mendapat pelatihan teknologi industri			
	1	Pengembangan Teknologi Industri Tepat Guna	sda	- Jumlah pelaku IMB yang mendapat pelatihan teknis dibidang teknologi industri - Jumlah pengembangan mesin teknologi tepat guna	Bertambahnya ketrampilan pelaku IMB dalam pemanfaatan teknologi tepat guna	Mesin inovasi hilirisasi industri
	2	Pelatihan Peningkatan Mutu Produk Industri Berbasis	sda	- Jumlah pelaku IMB yang mendapat pelatihan peningkatan mutu produk	Bertambahnya ketrampilan pelaku IMB dalam peningkatan	Pelaku IMB dan produk industri berbasis teknologi

		Teknologi		berbasis teknologi - Jumlah produk industri berbasis teknologi yang ditingkatkan mutunya	mutu produk berbasis teknologi	
9.	Program Pengembangan Industri Agro dan Kimia		Persentase peningkatan usaha Industri Agro dan Kimia			
	1	Pengawasan Teknis Pengembangan AMDK dan Kompon	s d a	Jumlah perusahaan AMDK dan kompon yang diawasi perkembangannya	Meningkatnya kualitas produk AMDK dan Kompon	Perusahaan AMDK dan Kompon
	2	Pengawasan Teknis Pengembangan Industri Menengah dan Besar	s d a	Jumlah perusahaan Industri Menengah dan Besar yang diawasi perkembangannya	Meningkatnya kualitas produk industry menengah dan besar	Perusahaan industry menengah dan besar
	3	Peningkatan SDM Industri Menengah dan Besar	s d a	Jumlah pelaku usaha IMB dan aparat yang mengikuti Diklat/Bimtek Industri	Meningkatnya kinerja dan pengetahuan pelaku usaha IMB serta aparat pembina	Pelaku usaha IMB dan aparat pembina
	4	Penguatan Kelembagaan Industri Menengah dan Besar	s d a	Jumlah bantuan peralatan yang diberikan pelaku IMB	Lancarnya kegiatan IMB di sentra industri potensial	Sentra-sentra IMB potensial di Kab/Kota
	5	Pelatihan Aneka Hilirisasi Industri Agro dan Kimia	s d a	Jumlah Pelatihan Aneka Hilirisasi Industri Agro dan Kimia	Meningkatnya pengetahuan dan kinerja pelaku usaha IMB	Pelaku usaha IMB dan aparat pembina
	6	Partisipasi Pada Pameran Industri Menengah dan Besar	s d a	- Jumlah Pameran Industri Menengah dan Besar yang diikuti - Jumlah pelaku usaha IMB yang difasilitasi mengikuti pameran	Meningkatnya pendapatan pelaku usaha IMB dan bertambahnya investasi di Provinsi Jambi	Pelaku usaha IMB peserta pameran
	7	Penyusunan Rencana Induk Pembangunan Industri Provinsi (RIPIP) Jambi	s d a	Jumlah dokumen RIPIP Provinsi Jambi	Tersedianya Rencana Induk Pembangunan Industri Provinsi (RIPIP) Jambi	Dokumen RIPIP Provinsi Jambi
	8	Updating Industri Menengah dan Besar se Provinsi Jambi	s d a	Jumlah dokumen hasil pendataan IMB se Provinsi Jambi	Tersedianya data pendataan IMB se Provinsi Jambi	Data IMB Kab/Kota se Provinsi Jambi
	9	Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Industri Agro, Kimia, mesin dan logam	s d a	Jumlah pelaku IMB yang mengikuti sosialisasi	Bertambahnya pengetahuan IKM dan aparat Pembina tentang Kebijakan dan Peraturan Industri agro, kimia, mesin dan logam	Pelaku IMB dan aparat pembina
	10	Sosialisasi Pengolahan Industri Berbasis Agro	s d a	Jumlah Pelaksanaan Sosialisasi Pengolahan Industri Berbasis Agro	Bertambahnya wawasan dan pengetahuan IMB dalam Pengolahan Industri Berbasis Agro	Pelaku usaha IMB dan aparat pembina
10.	Program Peningkatan Daya Saing Kewirausahaan Industri Kecil dan Menengah		Persentase Pengembangan wirausaha baru			
	1	Pengembangan dan Pembinaan Wirausaha Baru Industri Kecil	s d a	Jumlah wirausaha baru yang dikembangkan dan dibina	Meningkatnya pendapatan perajin IK di sentra pembinaan wira	Wirausaha baru

					usaha	
	2	Pelatihan TOT bagi Aparat Pembina IKM	s d a	Jumlah aparat yang mendapat pelatihan TOT	Bertambahnya wawasan dan pengetahuan aparat Pembina tentang TOT	Aparat Pembina IKM
	3	Pengembangan One Village One Product (OVOP)	s d a	Jumlah wilayah pengembangan OVOP	Berkembangnya potensi daerah di satu wilayah dalam mendorong pengembangan suatu produk kelas global yang unik khas daerah dengan memanfaatkan sumber daya dan budaya lokal	Wilayah pengembangan OVOP
	4	Pelatihan Kewirausahaan IKM Potensial	s d a	Jumlah IKM yang mendapat pelatihan kewirausahaan	Meningkatnya pengetahuan wirausaha baru potensial dalam kewirausahaan	IKM potensial
11.	Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap perlindungan konsumen			
	1	Pengawasan Barang Beredar dan Jasa	s d a	Jumlah produk Barang Ber-SNI Wajib dan Barang Strategis yang diawasi di Pasaran	Berkurangnya Peredaran Barang Ber SNI Wajib dan Barang Strategis yang tidak memenuhi ketentuan	Barang Beredar dan Jasa
	2	Pengembangan dan Pembinaan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)	s d a	Jumlah Pembinaan BPSK	Terbinanya dan terbentuknya BPSK di Kab/Kota	Sengketa konsumen
	3	Survey IKM atas Pelayanan Tera/Tera Ulang Alat UTTP		- Skor hasil survey IKM atas Pelayanan Tera/Tera Ulang Alat UTTP - Jumlah responden yang diikuti dalam survey IKM terhadap Pelayanan Tera / Tera Ulang Alat UTTP	Diketahuinya Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Tera/Tera Ulang Alat UTTP	Konsumen pengguna jasa tera/tera ulang UTTP
	4	Monitoring Barang yang kadaluarsa di Pasaran	s d a	Periode Pengawasan terhadap barang yang kadaluarsa di pasaran	Berkurangnya Peredaran Barang yang kadaluarsa di pasaran	Barang beredar produk makanan minuman dalam kemasan yang ada dipedagang
	5	Sosialisasi Kebijakan Perlindungan Konsumen	s d a	Jumlah pelaksanaan Sosialisasi Kebijakan Perlindungan Konsumen	Bertambahnya wawasan dan pengetahuan pelaku usaha perdagangan tentang Kebijakan Perlindungan Konsumen	Pelaku usaha perdagangan
	6.	Sosialisasi Kebijakan Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga	s d a	Jumlah pelaksanaan Sosialisasi Kebijakan Perlindungan Konsumen dan tertib Niaga	Bertambahnya wawasan dan pengetahuan pelaku usaha perdagangan tentang Kebijakan	Pelaku usaha perdagangan

					Perlindungan Konsumen dan TN	
	7.	Survey Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Perlindungan Konsumen	s d a	<ul style="list-style-type: none"> - Skor hasil survey IKM perlindungan Konsumen - Jumlah responden yang diikuti dalam survey IKM terhadap perlindungan konsumen 	Diketahuinya Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap perlindungan konsumen	Konsumen perdagangan
	8	Identifikasi Tertib Niaga	sda	Periode identifikasi tertib niaga terhadap barang pokok dan barang yang diatur peredarannya	Teraturannya tata niaga terhadap barang yang diatur peredarannya	Pelaku usaha
12.	Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri		Persentase peningkatan unit usaha perdagangan dalam negeri			
	1	Pengembangan Pasar Lelang Daerah dan Sistem Resi Gudang	s d a	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah fasilitasi pendampingan pelaksanaan lelang agro - Jumlah peserta sosialisasi peraturan dan kebijakan bidang PDN - Jumlah peserta pelatihan pengawas/verifikator mutu bokar 	Meningkatnya peluang dan daya saing pasar komoditi agro dan karet Jambi	Petani, pedagang dan produsen
	2	Penguatan Kelembagaan Usaha dagang Kecil Informal	s d a	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah pelaksanaan Sosialisasi kewirausahaan untuk peningkatan Usaha Dagang Kecil / Informal - Jumlah Sosialisasi HAKI dan Produk Halal 	Meningkatnya kualitas kelembagaan dan produk.	Pedagang kecil informal
	3	Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri	s d a	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah Pameran Dalam Negeri yang diikuti - Jumlah pelaku usaha yang difasilitasi mengikuti pameran - Jumlah Partisipasi Pada Pawai Kendaraan Hias - Jumlah Sosialisasi Penggunaan Produk Dalam Negeri 	Meningkatnya Penghargaan masyarakat terhadap Produk Dalam Negeri	Pasar / Masyarakat / Konsumen / Produsen
	4	Penyelenggaraan Pasar Murah	s d a	Jumlah kebutuhan barang pokok yang disubsidi	Terwujud bantuan subsidi Bahan Pokok Bagi masyarakat kurang mapu pada saat hari besar dan keagamaan	Masyarakat kurang mampu di lokasi pasar murah
	5	Pengolahan Data SIUP dan TDP	s d a	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah SIUP yang terdata - Jumlah TDP yang terdata 	Tersedianya data SIUP dan TDP se Provinsi Jambi	Data SIUP dan TDP Kab/Kota
	6	Pemantauan DAK Sarana Perdagangan	s d a	Jumlah dokumen hasil pemantauan DAK Sarana Perdagangan Se Provinsi Jambi	Tersediannya data DAK sarana perdagangan	Sarana perdagangan
	7	Pemantauan Bahan Pokok di	s d a	Jumlah laporan hasil pemantauan	Tersedianya Data Bapok di tingkat	Bahan pokok

		Tingkat Distributor dan Pasar Tradisional		Bapak di Tingkat Distributor dan Pasar Tradisional	distributor dan pasar tradisional	
	8	Pendataan Sarana Perdagangan dan Pedagang Informal	s d a	Jumlah dokumen hasil pendataan Sarana Perdagangan dan pedagang informal Se Provinsi Jambi	Tersedianya data sarana perdagangan dan pedagang informal	Sarana perdagangan dan pedagang informal
13.	Program Peningkatan dan Pengembangan Perdagangan Luar Negeri		Persentase peningkatan Nilai Ekspor			
	1	Peningkatan SDM Perdagangan Luar Negeri	s d a	Jumlah aparatur yang ditingkatkan kompetensinya dibidang ekspor	Meningkatnya pengetahuan dan kemampuan aparatur Bidang PLN	Aparatur bidang PLN
	2	Pameran Perdagangan Luar Negeri	s d a	- Jumlah pameran PLN yang diikuti - UKM daerah yang difasilitasi mengikuti pameran ekspor	Meningkatnya pemasaran produk ekspor daerah Jambi	UKM ekspor peserta pameran
	3	Forum Koordinasi Peningkatan Kinerja Ekspor Daerah	s d a	- Jumlah pelaku ekspor yang mengikuti forum	Meningkatnya kinerja para eksportir	Eksportir, aparat pembina
	4	Pemantauan dan Pengendalian Impor Daerah	s d a	Jumlah perusahaan yang dipantau pra dan pasca penerbitan API	Terpantaunya kinerja perusahaan pemilik API	Importir pemegang dokumen API
	5	Pelatihan Ekspor Bagi IKM dan UMKM	s d a	Jumlah IKM dan UMKM yang mengikuti pelatihan ekspor	Meningkatnya pengetahuan peserta UMKM dan Koperasi dalam Pelaksanaan Ekspor	IKM dan UMKM calon pelaku ekspor
	6	Pengawasan terhadap SKA dan API yang diterbitkan	s d a	Jumlah perusahaan yang memiliki SKA dan API yang diawasi	Diketuainya Kinerja para eksportir dan importir	Eksportir pemegang dokumen SKA dan Importir pemegang dokumen API
	7	Survey Indeks Kepuasan Masyarakat atas pelayanan penerbitan SKA Ekspor	s d a	- Skor IKM atas Pelayanan Penerbitan SKA Ekspor - Jumlah responden yang diikuti dalam survey IKM pelayanan penerbitan SKA Ekspor	Diketuainya IKM di Provinsi Jambi atas pelayanan penerbitan SKA Ekspor	Eksportir pemegang dokumen SKA
	8	Sosialisasi Peraturan dan Kebijakan Ekspor dan Impor	s d a	Jumlah pelaku ekspor dan impor yang mengikuti sosialisasi	Bertambahnya wawasan dan pengetahuan peserta sosialisasi tentang peraturan dan kebijakan, Ekspor dan Impor	Eksportir, Importir dan aparat Pembina PLN
	9	Temu Bisnis antara Produsen, Eksportir dan Importir	s d a	Jumlah pelaku ekspor dan impor serta produsen yang mengikuti temu bisnis	Terjalinnnya kemitraan antar sesama pelaku ekspor dan impor	Produsen, Eksportir, Importir dan aparat pembina
14.	Program Pengembangan Standarisasi Nasional		Persentase peningkatan ruang lingkup dan pemeliharaan Lab. BPSMB			
	1	Pengembangan Infrastruktur Kelembagaan Standarisasi	s d a	Periode pemeliharaan dan penggantian suku cadang alat laboratorium	Meningkatkan kemampuan lab dalam melakukan kalibrasi dan	Peralatan laboratorium kalibrasi dan pengujian

					pengujian	
	2	Peningkatan Kapasitas Lab. Penguji Mutu barang Ekspor dan Impor	s d a	<ul style="list-style-type: none"> - Periode penambahan ruang lingkup Laboratorium - Jumlah pengawasan dan pengendalian mutu barang SNI wajib di pasaran 	<ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan akreditasi, kepercayaan pelanggan dan PAD - Konsumen terlindungi dari produk non standar 	Laboratorium kalibrasi dan pengujian, petugas laboratorium
	3	Sosialisasi laboratorium Kalibrasi yang sudah Terakreditasi	s d a	Jumlah pelaksanaan sosialisai lab kalibrasi	Peningkatan akreditasi, kepercayaan pelanggan dan PAD	Perusahaan yang melakukan ekspor
	4	Penambahan Peralatan dan Bahan Uji serta Perawatan laboratorium	s d a	Jumlah pengadaan peralatan dan bahan uji serta perawatan laboratorium	Peningkatan pelayanan jasa pengujian dan PAD	Laboratorium kalibrasi dan akreditasi
	5	Peningkatan SDM Petugas Kalibrasi BPSMB	s d a	Jumlah SDM fungsional kalibrasi yang ditingkatkan kompetensinya	Meningkatnya kinerja pelayanan laboratorium	Petugas Fungsional UPTD BPSMB
	6	Survei Indeks Kepuasan Masyarakat atas Pelayanan Lab. Kalibrasi dan Lab. Pengujian	s d a	<ul style="list-style-type: none"> - Skor IKM atas Pelayanan Lab. Kalibrasi dan Lab. Penguji - Jumlah responden yang diikuti dalam survey IKM 	Diketahuinya IKM di Provinsi Jambi terhadap pelayanan Lab. Kalibrasi dan Lab. Penguji	Perusahaan yang melakukan ekspor

5.2. Indikator Kinerja dan Pendanaan

Indikator kinerja dan pendanaan Satuan kerja Perangkat Daerah pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi disusun dengan memperhatikan indikator dan pendanaan yang telah dirumuskan didalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) di Provinsi Jambi, perumusan indikator kinerja pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi dilakukan dengan mempertimbangkan pada penentuan dan perumusan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi yang dalam hal ini meliputi 2 (dua) komponen utama, yaitu :

1. Unsur Perencanaan;
2. Unsur Pengendalian.

Kelompok sasaran program dan kegiatan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi Tahun 2016-2021 sebagian besar berada di Wilayah Provinsi Jambi sedangkan Indikatif alokasi anggaran dalam Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi Tahun 2016-2021 bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jambi sebesar Rp. 65.146.970, dengan perincian sebagaimana pada tabel 5.2 berikut ini :

Tabel 5.2. Lokasi Pelaksanaan dan Pendanaan Indikatif Program Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi Tahun 2016-2021

NO.	PROGRAM	ALOKASI ANGGARAN (Rp. 000)						TOTAL ALOKASI Rp. (000)	LOKASI PELAKSANAAN
		2016	2017	2018	2019	2020	2021		
1.	Administrasi Perkantoran	1.532.857	1.206.074	1.466.518	1.509.000	1.533.018	1.573.018	8.820.485	Provinsi Jambi
2.	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1.111.942	944.594	1.361.951	1.141.951	1.465.951	1.206.951	7.233.340	Provinsi Jambi
3.	Peningkatan Disiplin Aparatur	80.080	97.200	99.000	99.000	99.000	99.000	573.280	Provinsi Jambi
4.	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	113.575	49.850	60.100	61.000	61.000	61.000	403.8258	Provinsi Jambi
5.	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	195.766	537.740	577.000	587.000	613.000	623.000	3.133.506	Provinsi Ja bi
6.	Sinkronisasi Perencanaan dan Penganggaran SKPD	400.292	0	0	0	0	0	400.292	Provinsi Jambi
7.	Pengembangan Industri Kecil	1.912.441	1.559.202	2.550.000	2.460.000	2.695.000	2.805.000	13.981.643	Dalam dan Luar Provinsi Jambi

	dan Menengah								
8.	Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri	0	500.705	575.000	600.000	700.000	700.000	3.1250.705	Dalam dan Luar Provinsi Jambi
9.	Pengembangan Industri Agro dan Kimia	858.608	1.054.755	970.000	875.000	935.000	1.040.905	5.740.363	Dalam dan Luar Provinsi Jambi
10.	Peningkatan Daya Saing Kewirausahaan Industri Kecil dan Menengah	93.715	118.000	345.000	200.000	205.000	445.000	1.406.715	Dalam dan Luar Provinsi Jambi
11.	Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan	1.122.157	626.430	945.000	1.025.000	1.165.000	1.195.000	6.121.287	Dalam dan Luar Provinsi Jambi
12.	Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	903.215	642.425	950.000	860.000	1.140.000	1.175.000	5.713.050	Dalam dan Luar Provinsi Jambi
13.	Peningkatan dan Pengembangan Perdagangan Luar Negeri	336.004	245.641	445.000	555.000	500.000	575.000	2.773.984	Dalam dan Luar Provinsi Jambi
14.	Pengembangan Standarisasi Nasional	1.069.392	910.347	1.095.000	1.160.000	1.200.000	1.220.000	6.671.389	Dalam dan Luar Provinsi Jambi
	Jumlah	9.730.044	8.492.963	10.119.011	11.489.569	12.346.969	12.758.874	65.966.370	

Perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi Tahun 2016-2021 dapat dilihat pada tabel 5.3 dibawah ini :

Tabel 5.3.
Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan
Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi 2016 - 2021

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data capaian pada awal tahun perencanaan (2015)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (Rp. 000)													
							Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD	
							Tar get	Rp. (000)	Tar get	Rp. (000)	Tar get	Rp. (000)	Tar get	Rp. (000)	Tar get	Rp. (000)	Tar get	Rp. (000)	Tar get	Rp. (000)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Meningkatkan daya saing industri guna mendukung perekonomian daerah	Tumbuh dan berkembangnya sektor industri	Kontribusi Sektor Industri Terhadap PDRB				11,05 %	11,50 %		11,60 %		11,70 %		11,80 %		11,90 %		12,00 %		12,00 %	
		Pertumbuhan Sektor Industri				2,33 %	2,50 %		2,70 %		2,90 %		3,10 %		3,30 %		3,50 %		3,50 %	
		Persentase Peningkatan Usaha Industri				28.075 unit	4,00 %		4,00 %		4,00 %		4,00 %		4,00 %		4,00 %		24 %	
		Persentase Peningkatan Tenaga Kerja Industri				111.390 orang	5,00 %		5,00 %		5,00 %		5,00 %		5,00 %		5,00 %		30,00 %	
				Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	Persentase peningkatan usaha IKM	27.871 unit	3,00 %	1.912.441	3,00 %	1.550.202	3,00 %	2.550.000	3,00 %	2.460.000	3,00 %	2.695.000	3,00 %	2.805.000	18,00 %	14.279.346
					Persentase peningkatan tenaga kerja IKM	70.367 orang	3,00 %		3,00 %		3,00 %		3,00 %		3,00 %		3,00 %		18,00 %	
				Kegiatan Pelatihan Pengolahan Aneka Makanan Unggulan Daerah	Jumlah perajin IK yang mengerti dan paham dalam pengolahan aneka makanan	200 org	60org	119.467	0	0	60 org	125.000	0	0	60 org	125.000	60 org	135.000	240 org	364.467
				Kegiatan Peningkatan SDM Industri	Jumlah perajin IKM yang mengikuti	400 org	75	137.525	30	65.950	75	160.000	75	170.000	75	180.000	75	190.000	405	905.475

				Kecil dan Menengah	pelatihan peningkatan SDM		org		org		org		org		org		org		org	
				Kegiatan Promosi Industri Kecil Regional dan Lokal	- Jumlah promosi Industri Kecil dan Kerajinan yang diikuti - Jumlah IKM yang difasilitasi mengikutsertakan pameran	33 kali 100 IKM	8 kali 12 IKM	414.450	4 kali 12 IKM	265.884	8 kali 20 IKM	650.000	8 kali 20 IKM	660.000	8 kali 20 IKM	670.000	8 kali 20 IKM	680.000	46 kali 112 IKM	3.484.900
				Kegiatan Penguatan Kelembagaan Industri Kecil	Jumlah bantuan peralatan/ mesin yang diberikan kepada industri kecil	26 paket	2 paket	103.075	3 paket	152.170	3 paket	200.000	4 paket	200.000	4 paket	225.000	4 paket	225.000	20 paket	1.106.020
				Kegiatan Pengembangan Rumah Tenun Jambi	- Jumlah perajin tenun yang dibina dan di-kembangkan - Periode fasilitasi sarana dan prasarana rumah tenun	96 org 60 bln	16 org 12 bln	280.052	15 org 12 bln	242.775	18 org 12 bln	300.000	18 org 12 bln	300.000	20 org 12 bln	325.000	20 org 12 bln	325.000	108 org 72 org	1.772.827
				Kegiatan Pengembangan Perajin Unit Promosi Jambi	- Jumlah perajin unit promosi yang dibina dan di-kembangkan - Jumlah MUSDA Dewan Kerajinan - Jumlah Rakor Dewan Kerajinan	500 org 1 kali 3 kali	150 org 1 kali 0	423.460	160 org 0 1 kali	507.630	150 org 0 1 kali	425.000	150 org 0 1 kali	430.000	150 org 0 1 kali	435.000	150 org 0 1 kali	440.000	910 org 1 kali 5 kali	2.744.530
				Kegiatan Peningkatan Kualitas Aneka Produk Industri Kecil	- Jumlah IK yang mengikuti pelatihan peningkatan kualitas aneka produk IK - Jumlah produk IK yang di-tingkatkan kualitasnya	NA NA4	25 IK 2 produk	61.100	0 0	0	25 IK 2 produk	80.000	30 IK 4 produk	100.000	0 0	0	25 IK 2 produk	125.000	105 IK 10 produk	376.100
				Kegiatan Pengembangan	- Jumlah Lomba	4 kali	1 kali		1 kali		1 kali		1 kali		1 kali		1 kali		6 kali	

				Desain Kerajinan Berbasis Budaya Daerah	Desain Motif hasil kerajinan IK Batik dan peragaan busana batik Jambi, Kab/Kota - Penyusunan katalog Warna Batik hasil kerajinan IK Batik dan HAKI - Jumlah pemenang Desain cendramata	NA	1 dok	119.922	2 dok	146.263	2 dok	200.000	2 dok	220.000	2 dok	240.000	2 dok	160.000	11 dok	1.117.327
				Kegiatan Pengembangan Sentra Usaha Industri Kecil	Jumlah sentra industri kecil yang dibina	NA	1 sen tra	118.200	0	0	1 sen tra	120.000	1 sen tra	130.000	1 sen tra	140.000	1 sen tra	150.000	5 sen tra	658.200
				Kegiatan Temu Bisnis Pelaku IKM	Jumlah pelaku IKM yang mengikuti Temu Bisnis	NA	50 org	44.790	0	0	50 org	50.000	0	0	50 org	60.000	0	0	150 org	154.790
				Kegiatan Pendataan IKM se Provinsi Jambi	Jumlah dokumen hasil pendataan IKM se Provinsi Jambi	3 dok	1 dok	90.400	1 dok	82.220	1 dok	100.000	1 dok	100.000	1 dok	120.000	1 dok	120.000	6 dok	655.400
				Kegiatan Sosialisasi dan Penerapan Mutu Produksi GMP dan HAKI	Jumlah pelaku IKM yang mengikuti sosialisasi	NA	0	0	50 org	37.460	0	0	50 org	75.000	0	0	50 org	90.000	150 org	205.460
				Kegiatan Bimbingan Teknis pengelolaan limbah industri	Jumlah pelaku IKM yang mendapat bimbingan teknis dan magang limbah industri	NA	0	0	25 org	58.850	25 org	60.000	25 org	75.000	25 org	75.000	25 org	85.000	125 org	353.850
				Konvensi Gugus Kendali Mutu Tingkat Provinsi	Jumlah GKM-IKM dan Fasilitator berprestasi Provinsi Jambi yang terpilih mewakili di tingkat nasional	NA	0	0	0	0	2 kel	80.000	0	0	2 kel	100.000	2 kel	80.000	6 kel	260.000

				Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri	Persentase peningkatan SDM IMB yang mendapat pelatihan teknologi industri	389 org	0	0	10 %	500.705	10 %	575.000	10 %	600.000	10 %	700.000	10 %	750.000	50 %	3.125.705
				Kegiatan Pengembangan Teknologi Industri Tepat Guna	- Jumlah pelaku IMB yang mendapat pelatihan teknis dibidang teknologi industri - Jumlah pengembangan mesin teknologi tepat guna	0	0	0	30 IMB	349.870	30 IMB	400.000	30 IMB	400.000	45 IMB	450.000	45 IMB	450.000	180 IMB	2.049.870
						0	0		5 mesin		5 mesin		5 mesin		5 mesin		5 mesin		25 mesin	
				Kegiatan Pelatihan Peningkatan Mutu Produk Industri Berbasis Teknologi	- Jumlah pelaku IMB yang mendapat pelatihan peningkatan mutu produk berbasis teknologi - Jumlah produk industri berbasis teknologi yang ditingkatkan mutunya	0	0	0	45 IMB	150.835	45 IMB	175.000	45 IMB	200.000	45 IMB	250.000	45 IMB	300.000	225 IMB	1.075.835
						0	0		3 produk		3 produk		4 produk		4 produk		4 produk		18 produk	
				Program Pengembangan Industri Agro dan Kimia	Persentase peningkatan Industri Agro dan Kimia	204 unit	1 %	858.608	1 %	1.054.755	1 %	970.000	1 %	875.000	1 %	935.000	1 %	1.040.000	6 %	5.740.363
					Persentase peningkatan tenaga kerja Industri Agro dan Kimia	41.023 orang	2 %		2 %		2 %		2 %		2 %		2 %		12 %	
				Kegiatan Pengawasan Teknis Pengembangan AMDK dan Kompon	Jumlah perusahaan AMDK dan kompon yang diawasi perkembangannya	75 perusahaan	15 perusahaan	42.950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 perusahaan	54.100
				Kegiatan Pengawasan Teknis Pengembangan Industri	Jumlah perusahaan industri menengah dan besar yang	NA	0	0	15 perusa	38.600	15 Perusa	50.000	15 Perusa	75.000	15 Perusa	80.000	15 Perusa	80.000	75 Perusa	323.600

				Menengah dan Besar	diawasi perkembangan-annya				haan		haan		haan		haan		haan		haan	
				Kegiatan Peningkatan SDM Industri Menengah dan Besar	Jumlah pelaku usaha IMB dan aparat yang mengikuti Diklat/Bimtek Industri	NA	60 org	192.732	17 org	67.715	20 org	80.000	20 org	85.000	20 org	90.000	20 org	120.000	157 org	635.447
				Kegiatan Penguatan Kelembagaan Industri Menengah dan Besar	-Jumlah Peralatan/ /mesin yang diberikan ke pelaku IMB -Jumlah dokumen pendukung penguatan kelembagaan	5 org 2 dok	0 2 dok	 96.100	3 unit 0	 465.550	3 unit 0	 500.000	3 unit 1 dok	 550.000	3 unit 0	 600.000	3 unit 0	 650.000	15 unit 3 dok	 2.861.650
				Kegiatan Pelatihan Aneka Hilirisasi Industri Agro dan Kimia	Jumlah IMB yang ikut Pelatihan Aneka Hilirisasi Industri Agro dan Kimia	NA	200 org	352.016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200 org	352.016
				Kegiatan Partisipasi Pada Pameran Industri Menengah dan Besar	- Jumlah pameran Industri Menengah dan Besar yang diikuti - Jumlah pelaku usaha IMB yang difasilitasi mengikuti pameran	NA NA	3 kali 6 IMB	 126.000	1 kali 3 IMB	 55.565	1 kali 3 IMB	 80.000	1 kali 3 IMB	 90.000	1 kali 3 IMB	 90.000	1 kali 3 IMB	 100.000	1 kali 3 IMB	 541.565
				Kegiatan Updating Industri Menengah dan Besar se Provinsi Jambi	Jumlah dokumen hasil pendataan IMB se Provinsi Jambi	2 dok	0	0	0	0	1 dok	200.000	0	0	0	0	0	0	1 dok	200.000
				Kegiatan Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Industri Agro, Kimia,mesin dan logam	Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Industri Agro, Kimia, mesin, dan logam transportasi	NA	0	0	50 org	37.525	0	0	50 org	75.000	0	0	50 org	90.000	150 org	212.325
				Kegiatan Penyusunan Rencana Induk	Jumlah dokumen RIPIP Provinsi Jambi															

				Pembangunan Industri Provinsi (RIPIP) Jambi		0	0	0	1 dok	390.000	0	0	0	0	0	0	0	1 dok	390.000	
				Kegiatan Sosialisasi Pengolahan Industri Berbasis Agro	Jumlah peserta yang mengikuti Sosialisasi Pengolahan Industri Berbasis Agro	NA	50 org	37.660	0	0	50 org	60.000	0	0	50 org	75.000	0	0	150 org	172.660
				Program Peningkatan daya Saing Kewirausahaan Industri Kecil dan Menengah	Persentase Pengembangan wira usaha baru	88 wub	10%	93.715	10%	118.000	10%	325.000	10%	375.000	10%	375.000	10%	445.000	60%	1.411.715
				Kegiatan Pengembangan dan Pembinaan Wirausaha Baru Industri Kecil	Jumlah wirausaha baru yang dikembangkan	NA	10 WUB	93.715	8 WUB	60.000	8 WUB	150.000	10 WUB	175.000	10 WUB	175.000	10 WUB	110.000	98 WUB	563.715
				Kegiatan Pelatihan TOT bagi Aparat Pembina IKM	Jumlah aparat yang mendapat pelatihan TOT	NA	0	0	0	0	25 IKM	50.000	0	0	0	0	25 IKM	60.000	50 IKM	110.000
				Kegiatan Pengembangan One Village One Product (OVOP)	Jumlah wilayah pengembangan OVOP	NA	0	0	0	0	2 wil	125.000	3 wil	200.000	3 wil	200.000	2 wil	150.000	2 wil	275.000
				Kegiatan Pelatihan Kewirausahaan IKM Potensial	Jumlah IKM yang mendapat pelatihan kewirausahaan	NA	0	0	25 WUB	58.000	0	0	0	0	0	0	30 WUB	125.000	145 WUB	460.000
Meningkatkan stabilitas dan penguatan pangsa pasar yang terintegrasi dengan pasar dalam negeri	Tumbuh dan berkembangnya perdagangan dalam negeri	Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB				11,12 %	11,50 %		11,65 %		11,80 %		11,95 %		12,10 %		12,25 %		12,25 %	
		Pertumbuhan sektor perdagangan				11,02 %	11,50 %		11,60 %		11,70 %		11,80 %		11,90 %		12,00 %		12,00 %	
		Persentase Peningkatan usaha perdagangan				85.357 unit	7 %		7 %		7 %		7 %		7 %		7 %		42 %	
				Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan	Persentase IKM terhadap Perlindungan Konsumen	74 %	75 %	1.122.157	75,2 %	642.425	75,4 %	945.000	75,6 %	1.025.000	75,8 %	1.165.000	76 %	1.195.000	76 %	6.121.287
				Kegiatan Pengembangan Infrastruktur Lembaga Laboratorium Metrologi Legal	Periode Kompetensi pelayanan laboratorium kemetrolagian	72 bln	12 bln	59.012	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 bln	0

				Kegiatan Kalibrasi dan Verifikasi Peralatan Standar Lab. Kemetrolagian	Sertifikasi Standar Ukuran dan Peralatan Standar	120 unit	20 unit	64.450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 unit	0	
				Kegiatan Tera Ulang Alat UTTP Kemetrolagian	Jumlah Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya yang ditera	91.468 unit	12.000 unit	689.470	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12.000 unit	454.470	
				Kegiatan Pengawasan UTTP dan BDKT	Jumlah Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya yang dikontrol	48.000 unit	8.000 unit	63.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.000 unit	63.600	
				Kegiatan Pengawasan Barang Beredar dan Jasa	Jumlah produk Barang Ber-SNI Wajib dan Barang Strategis yang diawasi di Pasaran	54 produk	9 produk	101.750	9 produk	69.030	9 produk	110.000	9 produk	115.000	9 produk	120.000	9 produk	125.000	54 produk	676.780
				Kegiatan Pengembangan dan Pembinaan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)	<div> Fasilitasi penyelesaian sengketa konsumen </div> <div> Jumlah lokasi pembinaan BPSK </div>	<div>NA</div> <div>NA</div>	<div>0 sidang</div> <div>11 lok</div>	<div>48.375</div>	<div>30 sidang</div> <div>11 lok</div>	<div>440.000</div>	<div>30 sidang</div> <div>11 lok</div>	<div>200.000</div>	<div>45 sidang</div> <div>11 lok</div>	<div>550.000</div>	<div>45 sidang</div> <div>11 lok</div>	<div>650.000</div>	<div>45 sidang</div> <div>11 lok</div>	<div>650.000</div>	<div>195 sidang</div> <div>11 lok</div>	<div>2.798.375</div>
				Kegiatan Monitoring Barang yang kadaluarsa di Pasaran	Periode Pengawasan terhadap barang yang kadaluarsa di pasaran	NA	4 kali	40.600	2 kali	66.200	2 kali	55.000	2 kali	60.000	2 kali	65.000	2 kali	70.000	14 kali	343.850
				Kegiatan Sosialisasi Kebijakan Perlindungan Konsumen	Jumlah pelaksanaan Sosialisasi Kebijakan Perlindungan Konsumen	2 kali	0	0	2 kali	19.750	0	0	0	0	0	0	0	0	2 kali	19.750
				Kegiatan Sosialisasi Kebijakan Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga	Jumlah pelaksanaan Sosialisasi Kebijakan Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga	0	0	0	0	0	4 kali	250.000	4 kali	250.000	4 kali	275.000	4 kali	275.000	16 kali	1.050.000
				Kegiatan Identifikasi Tertib Niaga	Periode identifikasi tertib niaga	NA	0	0	0	0	2 kali	180.000	3 kali	200.000	3 kali	210.000	4 kali	230.000	12 kali	820.000

					terhadap barang pokok dan barang yang diatur peredarannya															
				Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	Persentase peningkatan unit usaha perdagangan dalam negeri	85.357 unit	7 %	903.215	7 %	642.425	7 %	950.000	7 %	860.000	7 %	1.140.000	7 %	1.175.000	42 %	5.709.850
				Kegiatan Pengembangan Pasar Lelang Daerah dan Sistem Resi Gudang	- Jumlah Fasilitas pendampingan pelaksanaan lelang agro - Jumlah Peserta sosialisasi kebijakan PDN - Jumlah Peserta pelatihan pengawas verifikator mutu bokar	NA NA NA	2 kali 25 org 20 org		2 kali 25 org 20 org		2 kali 2,2 Milyar 25 org		2 kali 2,4 Milyar 25 org		2 kali 2,6 Milyar 30 lok		2 kali 2,8 Milyar 30 org		12 kali 14 Milyar 150 org	
				Kegiatan Penguatan Kelembagaan Usaha dagang Kecil Informal	- Jumlah peserta sosialisasi kewirausahaan untuk peningkatan Usaha Dagang Kecil / Informal - Jumlah Peserta Sosialisasi HAKI dan Produk Halal	225 org 225 org	50 org 50 org		0 0		50 org 50 org		0 0		50 org 50 org		50 org 50 org		200 org 200 org	
				Kegiatan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri	- Jumlah Pameran Dalam Negeri yang diikuti - Jumlah pelaku usaha yang difasilitasi mengikuti pameran - Jumlah Partisipasi pada Pawai Kendaraan Hias - Jumlah peserta Sosialisasi	15 kali 30 org 3 kali 300 org	3 kali 6 org 1 kali 100 org		2 kali 6 org 1 kali 100 org		2 kali 6 org 1 kali 100 org		2 kali 6 org 1 kali 100 org		2 kali 6 org 1 kali 100 org		2 kali 6 org 1 kali 100 org		13 kali 36 org 6 kali 600 org	
								177.125		188.415		220.000		240.000		260.000		280.000		1.366.540
								117.430		0		125.000		0		130.000		130.000		502.430
								227.010		191.110		205.000		210.000		215.000		220.000		1,248.955

					Penggunaan Produk Dalam Negeri															
				Kegiatan Penyelenggaraan Pasar Murah	Jumlah kebutuhan barang pokok yang disubsidi	45.000 paket	9.000 paket	166.350	10.000 paket	160.500	10.000 paket	200.000	10.000 paket	200.000	11.000 paket	250.000	11.000 paket	250.000	61.000 paket	1.241.400
				Kegiatan Pengolahan Data SIUP dan TDP	- Jumlah SIUP yang terdata - Jumlah TDP yang terdata	NA NA	8.630 unit 8.820 unit	61.200	9.061 unit 9.261 unit	53.325	9.200 unit 9.400 unit	70.000	9.400 unit 9.600 unit	75.000	9.600 unit 9.800 unit	80.000	9.800 unit 10.000 unit	85.000	55.691 unit 56.881 unit	436.200
				Kegiatan Pemantauan DAK Sarana Perdagangan	Jumlah dokumen hasil pemantauan DAK Sarana Perdagangan Se Provinsi Jambi	NA	1 dok	40.475	0	0	0	0	1 dok	50.000	1 dok	55.000	1 dok	60.000	4 dok	205.475
				Kegiatan Pemantauan Bahan Pokok di Tingkat Distributor dan Pasar Tradisional	Jumlah laporan hasil pemantauan Bapok di Tingkat Distributor dan Pasar Tradisional	NA	1 dok	32.800	0	0	0	0	0	0	1 dok	50.000	1 dok	50.000	4 dok	177.800
				Kegiatan Pendataan sarana Perdagangan dan Pedagang Informal	Jumlah dokumen hasil pendataan Sarana Perdagangan dan pedagang informal Se Provinsi Jambi	4 dok	2 dok	80.825	2 dok	49.075	2 dok	85.000	2 dok	85.000	2 dok	100.000	2 dok	100.000	12 dok	529.850
Meningkatkan perdagangan luar negeri yang berkualitas	Meningkatnya ekspor daerah dan terkendalinya impor	Persentase peningkatan nilai ekspor				US \$ 2.635,8 juta	10%		10%		10%		10%		10%		10%		60%	
		Persentase penurunan nilai impor				US \$ 109 juta	5%		5%		5%		5%		5%		5%		30%	
				Program Peningkatan dan Pengembangan Perdagangan Luar Negeri	Persentase kenaikan Nilai Ekspor	US \$ 2.635,8 juta	10%	336.004	10%	245.641	10%	405.000	10%	510.000	10%	455.000	10%	525.000	60%	2.623.954
				Kegiatan Peningkatan SDM Perdagangan Luar Negeri	Jumlah aparatur yang ditingkatkan kompetensinya dibidang ekspor	12 org	8 org	46.500	4 org	20.500	8 org	60.000	8 org	70.000	8 org	70.000	8 org	80.000	48 org	374.000
				Kegiatan Pameran	-Jumlah pameran	5 kali	1 kali		0		1 kali		1 kali		1 kali		1 kali		5 kali	

				Perdagangan Luar Negeri	PLN yang diikuti - UKM daerah yang difasilitasi mengikuti pameran ekspor	15 UKM	3 UKM	86.650	0	0	3 UKM	90.000	3 UKM	90.000	3 UKM	95.000	3 UKM	95.000	15 UKM	533.704
				Kegiatan Forum Koordinasi Peningkatan Kinerja Ekspor Daerah	- Jumlah pelaku ekspor yang mengikuti forum	400 org	80 org	62.230	80 org	67.120	40 org	50.000	40 org	50.000	40 org	60.000	40 org	60.000	320 org	349.350
				Kegiatan Pemantauan dan Pengendalian Impor Daerah	Jumlah perusahaan yang dipantau pra dan pasca penerbitan API	NA	15 perusahaan	35.467	0	0	0	0	15 perusahaan	45.000	0	0	15 perusahaan	50.000	45 perusahaan	130.467
				Kegiatan Pelatihan Ekspor Bagi IKM dan UMKM	IKM dan UMKM yang difasilitasi mengikuti pelatihan ekspor	NA	25 org	64.588	25 org	71.411	25 org	75.000	25 org	75.000	25 org	80.000	25 org	80.000	150 org	446.354
				Kegiatan Pengawasan terhadap SKA dan API yang diterbitkan	Jumlah perusahaan yang memiliki SKA dan API yang diawasi	NA	20 perusahaan	40.570	30 perusahaan	27.500	45 perusahaan	70.000	45 perusahaan	80.000	45 perusahaan	80.000	45 perusahaan	100.000	230 perusahaan	419.070
				Kegiatan Temu Bisnis antara Produsen, Eksportir dan Importir	Jumlah pelaku ekspor dan impor serta produsen yang mengikuti Temu bisnis	NA	0	0	0	0	40 org	60.000	0	0	40 org	70.000	0	0	80 org	130.000
				Kegiatan Sosialisasi peraturan dan kebijakan ekspor dan impor	Jumlah pelaku ekspor dan impor yang mengikuti Sosialisasi	NA	0	0	80 org	59.110	0	0	80 org	60.000	0	0	80 org	60.000	240 org	191.110
				Program Pengembangan Standarisasi Nasional	Persentase peningkatan jasa pengujian mutu komoditi ekspor	9.250 sampel	10%	1.029.392	10%	910.347	10%	1.035.000	10%	1.095.000	10%	1.135.000	10%	1.150.000	60%	6.369.219
				Kegiatan Pengembangan Infrastruktur Kelembagaan Standarisasi	Periode pemeliharaan dan penggantian suku cadang alat laboratorium	60 bln	12 bln	100.000	12 bln	90.000	12 bln	125.000	12 bln	125.000	12 bln	150.000	12 bln	150.000	72 bln	750.000
				Kegiatan Peningkatan Kapasitas Lab. Penguji Mutu barang Ekspor	Periode penambahan ruang lingkup Laboratorium	60 bln	12 bln	199.410	12 bln	220.370	12 bln	210.000	12 bln	220.000	12 bln	230.000	12 bln	240.000	72 bln	1.304.260

				dan Impor																
				Kegiatan Sosialisasi laboratorium Kalibrasi yang sudah Terakreditasi	Jumlah pelaksanaan sosialisasi lab kalibrasi	159 kali	53 kali	70.000	40 kali	34.250	53 kali	75.000	53 kali	75.000	53 kali	80.000	53 kali	80.000	318 kali	450.000
				Kegiatan Penambahan Peralatan dan Bahan Uji serta Perawatan laboratorium	Jumlah pengadaan peralatan dan bahan uji serta perawatan laboratorium	190 jenis	31 jenis	599.557	13 jenis	499.552	35 jenis	555.000	40 jenis	600.000	40 jenis	600.000	45 jenis	650.000	228 jenis	3.604.109
				Kegiatan Peningkatan SDM Petugas Kalibrasi BPSMB	Jumlah SDM fungsional kalibrasi yang ditingkatkan kompetensi-nya	20 org	10 org	60.425	6 org	36.425	10 org	70.000	10 org	75.000	10 org	75.000	10 org	80.000	60 org	420.900
Meningkat-kan Pelayanan Masyarakat dan Dunia Usaha	Meningkat-kan Kualitas Kinerja Pelayanan Eksternal dan Internal Organisasi	Persentase layanan administrasi kantor dan layanan jasa yang sesuai dengan SOP				100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%	
		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap beberapa pelayanan jasa				74 %	75 %		75,2 %		75,4 %		75,6 %		75,8 %		76 %		76 %	
				Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	70%	75%	1.532.857	80%	1.206.074	85%	1.466.518	90%	1.509.000	95%	1.533.018	100%	1.573.018	100%	9.005.186
				Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat keluar pertahun	8,250 surat	3.000 surat	73.610	3.100 surat	70.860	3.200 surat	73.610	3.300 surat	73.610	3.400 surat	73.610	3.500 surat	73.610	19.500 surat	438.910
				Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik	Periode pembayaran rekening listrik, telpon, PAM dan Internet	72 bln	12 bln	342.000	12 bln	288.600	12 bln	300.000	12 bln	310.000	12 bln	320.000	12 bln	330.000	72 bln	1.893.600
				Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah tenaga administrasi keuangan	182 org	39 org	182.508	45 org	199.726	46 org	190.000	46 org	200.000	46 org	210.000	46 org	220.000	268 org	1.190.260
				Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan	Periode pemakaian jasa kebersihan kantor	72 bln	12 bln	102.831	12 bln	95.356	12 bln	105.000	12 bln	110.000	12 bln	115.000	12 bln	120.000	72 bln	653.087

				Kantor																
				Kegiatan Penyediaan Alat Tulis kantor	Jumlah jenis alat tulis kantor	234 jenis	51 jenis	101.650	53 jenis	93.905	53 jenis	101.650	53 jenis	101.650	53 jenis	101.650	53 jenis	101.650	316 jenis	655.555
				Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan	10 item	2 item	39.950	5 item	32.500	5 item	39.950	5 item	39.950	5 item	39.950	5 item	39.950	27 item	232.250
				Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan Kantor	100 jenis	15 jenis	47.808	13 jenis	38.902	13 jenis	47.808	15 jenis	47.808	15 jenis	47.808	15 jenis	47.808	86 jenis	277.942
				Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor	15 item	4 item	58.500	3 item	8.500	4 item	30.000	4 item	30.000	4 item	50.000	4 item	50.000	23 item	227.000
				Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	- Jumlah bahan bacaan dan Peraturan Perundang-undangan - Periode pengelolaan perpustakaan Disperindag	300 Ekpls 72 bln	60 ekspl 12 bln	28.500	60 ekspl 12 bln	21.900	60 ekspl 12 bln	25.000	60 ekspl 12 bln	25.000	60 ekspl 12 bln	30.000	60 ekspl 12 bln	30.000	360 ekspl 72 bln	159.400
				Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah peserta rapat/pertemuan	4.870 ok	860 ok	15.500	580 ok	9.500	580 ok	9.500	580 ok	10.000	580 ok	10.000	580 ok	10.000	3.760 ok	64.500
				Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi yang dilaksanakan	480 kali	50 kali	540.000	30 kali	355.206	50 kali	550.000	50 kali	550.000	50 kali	560.000	50 kali	560.000	300 kali	3.280.000
				Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Peningkatan sarana dan prasarana yang memadai bagi aparatur	70%	100%	1.111.942	75%	944.594	80%	1.361.951	85%	1.141.951	95%	1.465.951	100%	1.206.951	100%	7.250.340
				Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional	Jumlah pengadaan kendaraan dinas/ operasional	15 unit	3 unit	48.000	0	0	2 unit	266.000	1 unit	16.000	1 unit	300.000	1 unit	16.000	8 unit	646.000
				Kegiatan Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah pengadaan peralatan gedung kantor	41 item	7 item	80.951	7 item	24.886	7 item	80.951	7 item	80.951	7 item	80.951	7 item	80.951	43 item	485.706
				Kegiatan Pengadaan	Jumlah pengadaan	39 item	3	89.858	8	90.580	9	130.000	9	130.000	9	140.000	9	140.000	47	740.598

				Mebeleur	peralatan meubeler		item		item		item		item		item		item		item	
				Kegiatan Pengadaan Komputer	Jumlah pengadaan peralatan komputer	24 item	2 item	91.183	4 item	46.788	4 item	65.000	4 item	65.000	4 item	70.000	4 item	70.000	22 item	470.506
				Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah pemeliharaan gedung kantor	24 item	2 item	101.600	2 item	100.400	2 item	110.000	2 item	120.000	2 item	130.000	2 item	140.000	12 item	702.000
				Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional	Jumlah pemeliharaan kendaraan dinas/ operasional	136 unit	47 unit	253.000	49 unit	246.020	50 unit	250.000	52 unit	260.000	53 unit	265.000	54 unit	270.000	305 unit	1.539.400
				Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung kantor	Jumlah pemeliharaan peralatan elektronika	282 unit	106 unit	50.000	120 unit	55.000	126 unit	60.000	134 unit	70.000	142 unit	80.000	150 unit	90.000	778 unit	415.000
				Kegiatan Rehabilitasi Sedang / Berat Gedung Kantor	Jumlah rehab dan penambahan gedung kantor	58 paket	8 paket	397.850	7 paket	380.920	7 paket	400.000	7 paket	400.000	7 paket	400.000	7 paket	400.000	63 paket	2.385.890
				Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase peningkatan kinerja dan disiplin aparatur	70%	75%	72.800	80%	97.200	85%	99.000	90%	99.000	95%	99.000	100%	99.000	100%	573.280
				Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah pengadaan pakaian dinas harian dan perlengkapannya	1.126 stel	182 stel	80.800	162 stel	97.200	165 stel	99.000	165 stel	99.000	165 stel	99.000	165 stel	99.000	1.004 stel	573.280
				Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Peningkatan Kapasitas sumber daya aparatur yang berkualitas dibidangnya	70%	75%	113.575	80%	49.850	85%	60.100	90%	61.000	95%	61.000	100%	61.000	100%	416.775
				Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis yang diikuti	33 kali keg	20 kali keg	80.000	6 kali keg	27.000	8 kali keg	36.000	8 kali keg	36.000	8 kali keg	36.000	8 kali keg	36.000	60 kali keg	260.000
				Pembinaan Jasmani dan Rohani	Jumlah pelaksanaan senam dan pembinaan rohani	NA	12 kali	33.575	12 kali	22.850	12 kali	24.100	12 kali	25.000	12 kali	25.000	12 kali	25.000	72 kali	156.775
				Program Peningkatan Pengembangan	Persentase Peningkatan Pengembangan															

				Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	an Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan SKPD	70%	75%	195.766	80%	537.740	85%	577.000	90%	587.000	95%	613.000	100%	623.000	100%	3.201.839
				Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja	- Jumlah Laporan Realisasi Capaian Kinerja Program dan Kegiatan - Jumlah Aparatur perencanaan yang ditingkatkan kompetensinya	24 dok/ 265 buku 18 org	4 dok/ 75 buku 6 org	29.920	4 dok/ 75 buku 6 org	537.740	5 dok/ 85 buku 6 org	577.000	5 dok/ 85 buku 6 org	587.000	5 dok/ 85 buku 6 org	613.000	5 dok/ 85 buku 6 org	623.000	29 dok/ 500 buku 36 org	141.200
				Penyusunan Laporan Keuangan dan Neraca Aset	- Jumlah Laporan Keuangan dan Neraca Aset - Jumlah Aparatur keuangan dan asset yang ditingkatkan kompetensinya	4 dok/ 540 buku 16 org	4 dok/ 90 buku 8 org	45.625	4 dok/ 66 buku 3 org	537.740	4 dok/ 90 buku 3 org	577.000	4 dok/ 90 buku 3 org	587.000	4 dok/ 90 buku 3 org	613.000	4 dok/ 90 buku 3 org	623.000	4 dok/ 540 buku 23 org	253.250
				Penyusunan Laporan Pengelolaan Kepegawaian	- Jumlah Laporan pengelolaan kepegawaian - Jumlah Aparatur kepegawaian yang ditingkatkan kompetensinya	6 dok/ 60 buku 12 org	3 dok/ 30 buku 6 org	35.371	5 dok/ 25 buku 3 org	537.740	5 dok/ 25 buku 3 org	577.000	5 dok/ 25 buku 3 org	587.000	5 dok/ 25 buku 3 org	613.000	5 dok/ 25 buku 3 org	623.000	28 dok/ 155 buku 21 org	218.496
				Pengembangan Sarana Informasi yang dapat diakses Masyarakat	Periode Informasi perkembangan industri dan perdagangan Disperindag Provinsi Jambi melalui webside	NA	12 bln	84.850	12 bln	537.740	12 bln	577.000	12 bln	587.000	12 bln	613.000	12 bln	623.000	72 bln	606.700
				Penyusunan Rencana Kerja SKPD	- Jumlah Rencana Kerja selama 1 Tahun - Jumlah Rapat	60 dok/ 235 buku 4 kali	0 0	0	6 dok/ 175 buku 1 kali	537.740	6 dok/ 175 buku 1 kali	577.000	6 dok/ 175 buku 1 kali	587.000	6 dok/ 175 buku 1 kali	613.000	6 dok/ 175 buku 1 kali	623.000	36 dok/ 875 buku 5 kali	1.203.293

					Sinkronisasi Program dan Kegiatan Tahunan															
				Monitoring dan Evaluasi Program / Kegiatan SKPD	Periode Monitoring dan Evaluasi Program dan kegiatan yang telah dan sedang dilaksanakan	24 bulan	0	0	12 biln	104.255	12 biln	150.000	12 biln	150.000	12 biln	155.000	12 biln	155.000	72 biln	758.000
				Program Sinkronisasi Perencanaan dan Penganggaran SKPD	Persentase Penyediaan Informasi Rencana Kerja dan Penganggar-an	70%	75%	400.292	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100%	400.292
				Penyusunan Rencana Kerja SKPD	- Jumlah Rencana Kerja selama 1 Tahun - Jumlah Rapat Sinkronisasi Program dan Kegiatan Tahunan	NA NA	5 dok 1 kali		0		0		0		0		0		5 dok 1 kali	
				Monitoring dan Evaluasi Program / Kegiatan SKPD	Periode Monitoring dan Evaluasi Program dan kegiatan yang telah dan sedang dilaksanakan	NA	12 bln	148.900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 bln	148.900
				Program Pengembangan Standarisasi Nasional	Persentase peningkatan jasa pengujian mutu komoditi ekspor	9.250 sampel	10%	40.000	10%	30.500	10%	40.000	10%	45.000	10%	45.000	10%	50.000	60%	220.000
				Kegiatan Survei IKM atas Pelayanan Lab. Kalibrasi dan Lab. Pengujian	- Skor IKM atas Pelayanan Lab. Kalibrasi dan Lab. Penguji - Jumlah responden yang diikuti dalam survey IKM	74,5 % 53 poereusahaan	75 % 53 perusahaan	40.000	75,2 % 40 perusahaan	30.500	75,4 % 53 perusahaan	40.000	75,6 % 53 perusahaan	45.000	75,8 % 53 perusahaan	45.000	76 % 53 perusahaan	50.000	76 % 318 perusahaan	220.000
				Program Peningkatan dan Pengembangan	Persentase kenaikan Nilai Ekspor	US \$ 2.635,8	10%	0	10%	0	10%	40.000	10%	45.000	10%	45.000	10%	50.000	60%	220.000

				Perdagangan Luar Negeri		juta														
				Kegiatan Survey IKM atas pelayanan penerbitan SKA Ekspor	- Skor IKM atas Pelayanan Penerbitan SKA Ekspor - Jumlah responden yang diikuti dalam survey IKM pelayanan penerbitan	NA NA	0 0		0 0	75,4 % 50 respo nden		75,6 % 50 respo nden		75,8 % 50 respo nden		76 % 50 respo nden		76 % 250 respo nden		220.000
				Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan	Persentase IKM terhadap Perlindungan Konsumen	74 %	75 %	54.850	75,2 %	19.750	75,4 %	60.000	75,6 %	65.000	75,8 %	65.000	76 %	70.000	76 %	368.850
				Kegiatan Survey IKM atas Pelayanan Tera/Tera Ulang Alat UTTP	- Skor hasil survey IKM atas Pelayanan Tera/Tera Ulang Alat UTTP - Jumlah responden yang diikuti dalam survey IKM terhadap perlindungan konsumen	74,5 % 700 respon den	75 % 250 respo nden		0 0	0 0		0 0		0 0		0 0		0 250 respo nden		54.850
				Kegiatan Survey IKM terhadap Perlindungan Konsumen	- Skor hasil survey IKM perlindungan Konsumen - Jumlah responden yang diikuti dalam survey IKM terhadap perlindungan konsumen	NA NA	0 0		75,2 % 40 respo nden	75,4 % 50 respo nden		75,6 % 50 respo nden		75,8 % 50 respo nden		76 % 50 respo nden		76 % 250 respo nden		168.000
Jumlah anggaran								9.730.044		8,492,963		10.119.011		11.489.569		12.346.969		12.758.874		65.966.370

BAB VI INDIKATOR KINERJA



**DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROVINSI JAMBI**

BAB VI

INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

*I*ndikator kinerja adalah ukuran keberhasilan yang dicapai pada setiap unit kerja. Indikator kinerja atau indikator Keberhasilan untuk setiap jenis pelayanan pada bidang - bidang € bidang kewenangan yang diselenggarakan oleh unit organisasi perangkat daerah dalam bentuk standar pelayanan yang ditetapkan oleh masing-masing daerah. Penetapan standard pelayanan merupakan cara untuk menjamin dan meningkatkan akuntabilitas pelayanan pemerintah daerah kepada masyarakat.

Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja harus merupakan sesuatu yang akan dihitung dan diukur serta digunakan sebagai dasar untuk menilai atau melihat tingkatan kinerja baik dalam tahap perencanaan (*ex ante*), tahap pelaksanaan (*on going*), maupun tahap setelah kegiatan selesai dan berfungsi (*ex post*)

Sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah merupakan suatu instrument pertanggungjawaban yang terdiri dari berbagai indikator dan mekanisme kegiatan pengukuran, penilaian dan pelaporan kinerja secara menyeluruh dan terpadu untuk memenuhi kewajiban pemerintah dalam mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan tugas, fungsi dan misi organisasi.

Pada sektor publik, sistem akuntabilitas kinerja menghadapi masalah berupa sulitnya mengukur kinerja dan menentukan indikator kinerja yang tepat. Problematik tersebut timbul karena sektor publik memiliki karakteristik yang sangat berbeda dengan sektor bisnis, terutama menyangkut output, outcome dan tujuan utama entitas. Output entitas pemerintahan sebagian besar berupa jasa pelayanan publik yang sulit diukur kuantitas maupun kualitasnya.

Bab 6 berisi :

- 6.1. Tujuan dan Sasaran RPJMD
- 6.2. Indikator Kinerja Yang mengacu RPJMD

6.1. Tujuan dan Sasaran RPJMD

Dalam mewujudkan Visi melalui pelaksanaan Misi yang telah ditetapkan dalam RPJMD Provinsi Jambi Tahun 2016 - 2021, maka perlu adanya kerangka yang jelas pada setiap misi menyangkut tujuan dan sasaran yang akan dicapai. Tujuan dan sasaran pada setiap misi akan memberikan arahan bagi pelaksanaan setiap urusan pemerintahan daerah baik urusan wajib maupun urusan pilihan dalam mendukung pelaksanaan misi dimaksud.

Pembangunan dan pengembangan industri dan perdagangan termasuk dalam misi ke-4 Pemerintah Provinsi Jambi, yaitu **•Meningkatkan daya saing daerah melalui optimalisasi pembangunan ekonomi kerakyatan yang didukung oleh penerapan Ilmu Pengetahuan, teknologi, dan inovasi (IPTEKIN) berwawasan lingkungan**. Adapun tujuan yang hendak dicapai adalah **Meningkatkan daya saing daerah berbasis IPTEKIN**. dengan sasaran yaitu **Perubahan struktur ekonomi yang mampu memberikan nilai tambah**.

6.2. Indikator kinerja yang mengacu pada RPJMD

Indikator Kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Dinas Perindustrian dan Perdagangan dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Indikator kinerja ini juga berhubungan dengan arah kebijakan dan kebijakan umum dalam RPJMD Provinsi Jambi Tahun 2016-2021 yang diamanatkan secara khusus kepada Dinas Perindustrian dan Perdagangan.

Indikator kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD terdiri dari :

Urusan Perindustrian:

1. Kontribusi sektor industri terhadap PDRB
2. Pertumbuhan sektor industri.
3. Persentase peningkatan usaha industri
4. Persentase peningkatan tenaga kerja industri .

Urusan Perdagangan:

1. Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB
2. Pertumbuhan sektor perdagangan
3. Persentase peningkatan usaha perdagangan
4. Persentase peningkatan nilai ekspor
5. Persentase penurunan nilai impor

Rincian indikator sebagaimana tersebut di atas disajikan sebagaimana pada Tabel 6.1 sebagai berikut :

TABEL 6.1.

**INDIKATOR KINERJA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI JAMBI
YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD**

No.	Indikator	Kondisi Kinerja pada Awal periode RPJMD (2015)	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD (2021)
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	
A.	URUSAN PERINDUSTRIAN								
	1. Kontribusi sektor industri terhadap PDRB	11,05 %	11,50 %	11,60 %	11,70 %	11,80 %	11,90 %	12, 00 %	12,00 %
	2. Pertumbuhan sektor industri	2,33 %	2,50 %	2,70 %	2,90 %	3,10 %	3,30 %	3,50 %	3,50 %
	3. Persentase Peningkatan usaha industri	28.075 unit	4 %	4 %	4 %	4 %	4 %	4 %	24 %
	4. Persentase peningkatan tenaga kerja industri	111.390 orang	5 %	5 %	5 %	5 %	5 %	5 %	30 %
B.	URUSAN PERDAGANGAN								
	1. Kontribusi sektor perdagangan Terhadap PDRB	11,12 %	11,50 %	11,65 %	11,80 %	11,95 %	12,10 %	12,25 %	12,25 %
	2. Pertumbuhan sektor perdagangan	11,02 %	11,50 %	11,60 %	11,70 %	11,80 %	11,90 %	12, 00 %	12,00 %
	3. Persentase peningkatan usaha Perdagangan	85.357 unit	7 %	7 %	7 %	7 %	7 %	7 %	42 %
	4. Persentase peningkatan nilai ekspor	US \$ 2.635,8 juta	10,00 %	10,00 %	10,00 %	10,00 %	10,00 %	10,00 %	60,00 %
	5. Persentase penurunan nilai impor	US \$ 109 juta	5,00 %	5,00 %	5,00 %	5,00 %	5,00 %	5,00 %	30,00 %

BAB VII PENUTUP



**DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROVINSI JAMBI**

BAB VII

PENUTUP

7.1. Kesimpulan

*R*enstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi 2016 € 2021 merupakan penjabaran visi Dan penjabaran visi dan misi Renstra dan penerjemahan kebijakan RPJMD Provinsi Jambi 2016-2021 di bidang perindustrian dan perdagangan. Renstra ini sebagai acuan bagi pelaksanaan kebijakan dan Pogram serta kegiatan yang akan dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi dalam 5 (lima) tahun kedepan. Rencana Strategis ini juga menjadi pedoman bagi seluruh stakeholder di lingkungan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi guna mendukung pencapaian sasaran.

Rencana Strategis (Renstra) ini memuat Visi, Misi, Strategi, kebijakan, program dan kegiatan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi dalam pelaksanaan pembangunan Jambi selama lima tahun kedepan sebagai acuan panduan bagi seluruh unit kerja di lingkungan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi. Renstra disusun untuk memberikan arah yang jelas dalam melaksanakan kegiatan sesuai posisi, tugas pokok, fungsi dan peran Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi dalam pelaksanaan pembangunan sekaligus sebagai rambu-rambu strategis untuk mengukur kinerja tahunan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi berupa Laporan Kinerja (LKj). Selanjutnya, renstra ini segera diimplementasi dan dicermati akuntabilitasnya agar sesuai dengan parameter pencapaian sasaran yang terdapat dalam lampiran dokumen Renstra 2016 2021.

Sesuai dengan perkembangan lingkungan internal dan eksternal yang terus mengalami perubahan, maka Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi Tahun 2016-2021 tidak bersifat kaku dan senantiasa harus memperhatikan perubahan-perubahan yang terjadi. Dalam rangka peningkatan kapasitas, kerjasama dan loyalitas dalam pelaksanaan tugas sesuai dengan wewenang yang diberikan, maka komitmen dari semua aparatur dalam pelaksanaannya sangat diharapkan, sehingga visi dan misi yang

Bab 7 Berisi :

7.1. Kesimpulan

7.2. Kaidah Transisi

*7.3. Kaidah
Pelaksanaan*

telah ditetapkan dapat terwujud. Dengan demikian, penting bagi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi untuk mengedepankan, tidak saja aspek perencanaan dokumen, tetapi juga bagaimana fungsi pengendalian dan evaluasi digunakan secara tepat guna mengoordinasikan SKPD dan Kabupaten/Kota dalam bersama-sama mencapai sasaran RPJMD yang pada dasarnya adalah untuk menyejahterakan masyarakat Jambi.

7.2. Kaidah Transisi

Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan dan mengisi kekosongan rencana kerja pembangunan daerah tahun 2021, dimana masa bakti Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi 2016-2021 yang berakhir pada tanggal 12 Pebruari 2021, sedangkan periode akhir rencana strategis ini berakhir sampai dengan Desember 2021 Oleh karena itu dokumen ini tetap akan menjadi acuan penyusunan rencana kerja pembangunan daerah Tahun 2021. Program yang akan dilaksanakan pada tahun 2021 tersebut adalah program transisi, disebut program transisi karena program yang menjadi landasan (legal formal) perencanaan tahun 2021 adalah •program sementara, sebelum ditetapkan Renstra baru yang merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Gubernur dan Wakil Gubenur terpilih untuk masa jabatan tahun 2016-2021. Program transisi ini tetap mengacu pada Prioritas Pembangunan Daerah yang sudah termuat dalam renstra dan RPJMD Provinsi Jambi 2016-2021.

7.3. Kaidah Pelaksanaan

Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi 2016-2021 merupakan penjabaran dari RPJMD Provinsi Jambi 2016-2021 yang disusun melalui berbagai tahapan: persiapan, penyusunan rancangan, akhir Renstra dan diakhiri dengan penetapan. Setelah RPJMD ditetapkan dalam Peraturan Daerah maka dilakukan penyempurnaan rancangan Renstra SKPD menjadi Rancangan Akhir Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi. Tujuannya adalah untuk mempertajam visi dan misi serta menyelaraskan tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan daerah sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD yang ditetapkan dalam RPJMD.

Rancangan akhir Renstra SKPD telah diverifikasi oleh BAPPEDA dalam rangka penyelarasan akhir dengan RPJMD dan telah diajukan kepada kepala daerah guna memperoleh pengesahan. Berdasarkan keputusan kepala daerah tentang pengesahan Renstra SKPD, kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi menetapkan Renstra menjadi pedoman unit kerja di lingkungan SKPD dalam menyusun rancangan Renja

SKPD. Atas dasar itulah, beberapa hal yang perlu menjadi perhatian sebagai kaidah pelaksanaan Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi ini adalah sebagai berikut:

1. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi bertanggungjawab atas pencapaian kinerja sasaran (*impact*) Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi;
2. Pejabat eselon III di lingkungan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi bertanggungjawab atas pencapaian kinerja program (*outcome*) Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi
3. Pejabat eselon IV dan aparatur di lingkungan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi bertanggungjawab atas pencapaian kinerja kegiatan (*output*) Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi;
4. Evaluasi pencapaian sasaran Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi dilakukan sekurang-kurangnya dilakukan sekali dalam lima tahun;
5. Pelaksanaan Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi dilakukan melalui Renja setiap tahun dan realisasinya melalui DPA - Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi setiap tahun.
6. Pengendalian dan evaluasi hasil Renja tiap tahun melalui evaluasi hasil pelaksanaan DPA € per triwulan merupakan bagian integral dari pengendalian dan evaluasi hasil RKPD dan digunakan juga untuk menyusun Laporan Kinerja (LKj) sekaligus dijadikan sebagai instrumen untuk mengendalikan dan mengevaluasi efektivitas strategi dan kebijakan Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi dalam mencapai sasaran Renstra.
7. Dalam hal suatu pengendalian dan evaluasi terhadap Rensra dan Renja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi memerlukan perbaikan atau revisi Renstra maka perbaikan tersebut dapat dituangkan pada Renja periode berikutnya atau dilakukan revisi Renstra jika pada kesempatan yang sama RPJMD Provinsi Jambi dilakukan revisi oleh alasan yang dibenarkan menurut peraturan-perundangan.

Jambi, Mei 2018

KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROVINSI JAMBI

Drs. ARIANSYAH. ME
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19720630 199302 1 001